

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
(022.12.2900.288127)**



**LAPORAN KEUANGAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023
(AUDITED)**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Politeknik Penerbangan Indonesia Curug adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan uang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Curug, 08 Mei 2024
Kuaa Pengguna Anggaran,

Agustono, S.Sos., M.MTr.
NIP. 196908311991031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi
DAFTAR ISIii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang	1
II. Ruang Lingkup.....	2
BAB II LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAP	3
I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	3
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	3
2. NERACA	3
3. LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	3
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	4
5. LAPORAN ARUS KAS (LAK).....	4
6. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL).....	4
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	5
II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	6
III. NERACA	7
IV. LAPORAN OPERASIONAL.....	8
V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	9
VI. LAPORAN ARUS KAS (LAK)	10
VII. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL).....	12
VIII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	13
A. PENJELASAN UMUM	13
A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR PPI CURUG.....	13
A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	14
A.3. BASIS AKUNTANSI.....	14
A.4. DASAR PENGUKURAN.....	15
A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	15

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN..	23
B.1 Pendapatan.....	23
B.2 Belanja.....	23
B.3 Belanja Pegawai.....	25
B.4 Belanja Barang.....	26
B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27
B.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	28
B.7 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	28
B.8 Belanja Modal Lainnya.....	28
B.9 Belanja Modal BLU.....	28
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA.....	29
ASET LANCAR	29
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	29
C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	29
C.3. Kas pada Badan Layanan Umum.....	29
C.4. Piutang Bukan Pajak	31
C.5. Penyisihan Piutang Bukan Pajak.....	31
C.6. Piutang dari kegiatan operasional BLU	32
C.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan operasional BLU	33
C.8. Persediaan	34
ASET TETAP.....	34
C.9. Tanah.....	34
C.10. Peralatan dan Mesin	35
C.11. Gedung dan Bangunan	36
C.12. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	36
C.13. Aset Tetap Lainnya	37
C.14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	37
C.15. Aset Tak Berwujud	38
C.16. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya.....	38
C.17. Aset Lain Lain	38
C.18. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	39
KEWAJIBAN	39

C.19. Utang kepada Pihak Ketiga.....	39
C.20. Pendapatan Diterima Dimuka.....	40
C.21. Uang Muka dari KPPN.....	40
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	41
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	41
D.2. Beban Pegawai.....	41
D.3. Beban Persediaan.....	42
D.4. Beban Barang dan Jasa.....	42
D.5. Beban Pemeliharaan.....	43
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	44
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	44
D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	45
D.9. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional.....	45
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS..	46
E.1. Ekuitas Awal.....	46
E.2. Surplus (Defisit) LO.....	46
E.3. Penyesuaian Nilai Aset.....	46
E.4. Koreksi Nilai Persediaan.....	46
E.5. Koreksi atas Reklasifikasi.....	46
E.6. Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	46
E.7. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	46
E.8. Koreksi Lain-Lain.....	46
E.9. Transaksi Antar Entitas.....	47
E.10. Ekuitas Akhir.....	47
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS.....	48
F.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi.....	48
F.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi.....	51
F.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan.....	52
F.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.....	52
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO	
 ANGGARAN LEBIH	53
G.1. Saldo Anggaran Lebih Awal.....	53

G.2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	53
G.3. Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN.....	53
G.4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) setelah Penyesuaian... ..	53
G.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir	53
H. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	54
H.1 KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA	54
H.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	54
BAB III ANALISIS LAPORAN KEUANGAN.....	56
A. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	56
1. Analisis Horizontal /Analisis Dinamis	56
2. Analisis Vertikal/ Analisis Statis	60
B. ANALISIS RASIO KEUANGAN.....	60
1. Rasio Likuiditas	61
2. Rasio Utang (Leverage Ratio).....	62
3. Rasio POBO	63
4. Rasio Kemandirian.....	64
5. Rasio Efektifitas	64
6. Rasio Serapan Anggaran.....	65
BAB IV PENUTUP.....	66



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG**

JL. RAYA PLP CURUG
TANGERANG 15820

Telp. (021) 598-2203/04/05
Fax, (021) 598-2234

email : ppi@ppicurug.ac.id
website : www://ppicurug.ac.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tangerang, 8 Mei 2023
Kuas Penguasa Anggaran,

Agusmono, S.Sos., M.MTr.
NIP. 196908311991031001



Laporan Keuangan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tahunan Tahun Anggaran 2023 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp58.189.802.683 atau mencapai 50% dari alokasi anggaran sebesar Rp116.680.360.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp191.595.958.760 atau mencapai 99% dari alokasi anggaran sebesar Rp191.723.658.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.569.118.257.527 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp89.050.582.895, Aset Tetap (neto) sebesar Rp3.460.864.677.109, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp19.203.015.523.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.301.145.863 dan Rp3.564.925.431.607.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional untuk periode

sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp193.126.483.082 sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp232.410.393.620, sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai (Rp39.283.910.538) Kegiatan Non Operasional terdiri atas Surplus Pelepasan Aset Non Lancar Rp112.266.880 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (Rp55.597.665) sehingga Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp56.669.215. Entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp39.227.241.323).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp3.610.881.639.836, dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp39.227.241.323) kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah ekuitas senilai (Rp6.944.676.906) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp215.710.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp3.564.925.431.607.

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas setara kas pada tanggal pelaporan. Saldo awal kas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp10.588.296.340. Arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris masing-masing adalah sebesar Rp33.922.923.971; (Rp31.621.275.857), Rp0, (Rp1.165.447.999). Sehingga saldo akhir kas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp11.724.496.455.

6. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih pada tanggal pelaporan dibandingkan Tahun sebelumnya. Saldo Anggaran lebih awal sebesar Rp8.542.781.212. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran setelah penyesuaian adalah sebesar Rp2.301.648.114, sehingga Saldo Anggaran Lebih akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 10.844.429.326.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 2022 AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	% thd Angg	REALISASI 2022
PENDAPATAN						
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
Penerimaan Perpajakan		-	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak		116,680,360,000	58,189,802,683	(58,490,557,317)	49.87	57,280,766,475
Penerimaan Hibah		-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan dan Hibah		116,680,360,000	58,189,802,683	(58,490,557,317)	49.87	57,280,766,475
BELANJA						
Belanja Pegawai	B.2					
Belanja Pegawai		17,518,458,000	17,405,997,733	(112,460,267)	99.36	17,024,897,778
Belanja Barang		142,557,811,000	142,456,418,290	(101,392,710)	99.93	108,532,672,570
Belanja Modal		31,743,148,000	31,733,542,737	(9,605,263)	99.97	52,460,234,498
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang		-	-	-	0.00	-
Belanja Subsidi		-	-	-	0.00	-
Belanja Hibah		-	-	-	0.00	-
Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	0.00	-
Belanja Lain-lain		-	-	-	0.00	-
Jumlah Belanja	B.3	191,819,417,000	191,595,958,760	(223,458,240)	99.88	178,017,804,846
SURPLUS / (DEFISIT)		-	(133,406,156,077)	(133,406,156,077)	-	(120,737,038,371)
PEMBIAYAAN						
Penerimaan Pembiayaan						
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri		-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan						
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri		-	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	-	-
SILPA / (SIKPA)		-	(133,406,156,077)	-	-	(120,737,038,371)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
AUDITED**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2023	2022	Jumlah	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	880,067,129	2,045,515,128	(1,165,447,999)	(56.98)
Kas pada Badan Layanan Umum	C.3	10,844,429,326	8,542,781,212	2,301,648,114	26.94
Piutang Bukan Pajak	C.4	430,659,300	-	430,659,300	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.5	(430,659,300)	-	(430,659,300)	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		-	-	-	-
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.6	8,113,000,513	9,487,278,971	(1,374,278,458)	(14.49)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.7	(2,736,265,866)	(2,804,736,018)	68,470,152	(2.44)
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)		5,376,734,647	6,682,542,953	(1,305,808,306)	(19.54)
Persediaan	C.8	71,949,351,793	71,408,081,589	541,270,204	0.76
JUMLAH ASET LANCAR		89,050,582,895	88,678,920,882	371,662,013	0.42
ASET TETAP					
Tanah	C.9	2,702,017,500,000	2,702,017,500,000	-	-
Peralatan dan Mesin	C.10	2,327,439,153,615	2,296,700,740,064	30,738,413,551	1.34
Gedung dan Bangunan	C.11	398,019,126,750	398,019,126,750	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.12	23,705,500,855	27,684,794,712	(3,979,293,857)	(14.37)
Aset Tetap Lainnya	C.13	29,975,048,140	31,127,088,574	(1,152,040,434)	(3.70)
Akumulasi Penyusutan	C.14	(2,020,291,652,251)	(1,946,367,053,741)	(73,924,598,510)	3.80
JUMLAH ASET TETAP		3,460,864,677,109	3,508,182,196,359	(48,317,519,250)	(1.38)
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	C.15	35,438,237,692	35,438,237,692	-	-
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	C.16	907,096,681	-	907,096,681	-
Aset Lain-lain	C.17	6,002,177,000	6,002,177,000	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.18	(23,144,495,850)	(23,144,049,450)	(446,400)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA		19,203,015,523	18,296,365,242	906,650,281	4.96
JUMLAH ASET		3,569,118,275,527	3,616,157,482,483	(47,039,206,956)	(1.30)
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.19	4,141,803,420	4,774,983,647	(633,180,227)	(13.26)
Pendapatan Diterima Dimuka	C.20	51,040,500	500,859,000	(449,818,500)	-
Uang Muka dari KPPN	C.21	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		4,192,843,920	5,275,842,647	(1,082,998,727)	(20.53)
JUMLAH KEWAJIBAN		4,192,843,920	5,275,842,647	(1,082,998,727)	(20.53)
EKUITAS					
Ekuitas		3,564,925,431,607	3,610,881,639,836	(45,956,208,229)	(1.27)
JUMLAH EKUITAS		3,564,925,431,607	3,610,881,639,836	(45,956,208,229)	(1.27)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3,569,118,275,527	3,616,157,482,483	(47,039,206,956)	(1.30)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2023	2022	Jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
	D.1				
Pendapatan Alokasi APBN		135,934,606,562	121,805,885,118	14,128,721,444	11.60
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		28,134,689,150	36,376,663,003	(8,241,973,853)	(22.66)
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain		5,853,554,000	9,232,540,750	(3,378,986,750)	(36.60)
Pendapatan Hibah BLU		-	-	-	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU		19,267,514,225	8,258,084,109	11,009,430,116	133.32
Pendapatan BLU Lainnya		3,936,119,145	2,332,516,585	1,603,602,560	68.75
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		193,126,483,082	178,005,689,565	15,120,793,517	8.49
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2	36,763,594,296	32,251,943,903	4,511,650,393	13.99
Beban Persediaan	D.3	9,068,724,060	7,437,766,755	1,630,957,305	21.93
Beban Barang dan Jasa	D.4	83,930,555,399	70,875,510,861	13,055,044,538	18.42
Beban Pemeliharaan	D.5	21,872,105,869	11,196,214,681	10,675,891,188	95.35
Beban Perjalanan Dinas	D.6	6,866,770,347	6,473,678,325	393,092,022	6.07
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	72,891,929,963	95,377,573,422	(22,485,643,459)	(23.58)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	1,016,713,686	288,930,754	727,782,932	251.89
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		232,410,393,620	223,901,618,701	8,508,774,919	3.80
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(39,283,910,538)	(45,895,929,136)	6,612,018,598	(14.41)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		112,266,880	(13,303,299,864)	13,415,566,744	26
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		112,266,880	429,543,437	(317,276,557)	(73.86)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	13,732,843,301	(13,732,843,301)	(100.00)
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9	(55,597,665)	(301,507,323)	245,909,658	14
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		171,248,045	355,033,024	(183,784,979)	(51.77)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya		226,845,710	656,540,347	(429,694,637)	(65.45)
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional		56,669,215	(13,604,807,187)	13,661,476,402	(100.42)
SURPLUS/DEFISIT - LO		(39,227,241,323)	(59,500,736,323)	20,273,495,000	(34.07)
POS LUAR BIASA					
Pendapatan PNBPN		-	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-	-	-
Beban Persediaan		-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(39,227,241,323)	(59,500,736,323)	20,273,495,000	(34.07)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2023	2022	Jumlah	%
EKUITAS AWAL	E.1	3,610,881,639,836	3,817,161,604,132	(206,279,964,296)	(5.40)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(39,227,241,323)	(59,500,736,323)	20,273,495,000	(34.07)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		(6,944,676,906)	4,577,756,800	(11,522,433,706)	(251.70)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3	-	-	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	-	-	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.5	-	-	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.6	(7,371,398,424)	3,223,081,058	(10,594,479,482)	(328.71)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.7	426,721,518	1,354,675,742	(927,954,224)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		215,710,000	(151,356,984,773)	151,572,694,773	(100.14)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(45,956,208,229)	(206,279,964,296)	160,323,756,067	(77.72)
EKUITAS AKHIR		3,564,925,431,607	3,610,881,639,836	(45,956,208,229)	(1.27)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. LAPORAN ARUS KAS

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2023	2022	Jumlah	%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.1				
ARUS MASUK KAS					
Pendapatan dari Alokasi APBN		135,934,606,562	121,805,885,118	14,128,721,444	11.60
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat		28,884,999,850	38,936,129,403	(10,051,129,553)	(25.81)
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain		5,853,554,000	9,232,540,750	(3,378,986,750)	(36.60)
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama		19,233,019,663	6,491,330,000	12,741,689,663	196.29
Pendapatan dari Hibah		-	-	-	-
Pendapatan Usaha Lainnya		3,936,119,145	1,838,071,585	2,098,047,560	114.14
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL		55,307,654	127,682,869	(72,375,215)	-
Pendapatan PNBP Umum		114,535,491	225,468,431	(110,932,940)	(49.20)
JUMLAH ARUS MASUK KAS		194,012,142,365	178,657,108,156	15,355,034,209	8.59
ARUS KELUAR KAS					
Pembayaran Pegawai		34,871,896,239	32,251,943,903	2,619,952,336	8.12
Pembayaran Barang		57,176,039,248	50,468,886,627	6,707,152,621	13.29
Pembayaran Jasa		14,849,568,518	10,759,428,099	4,090,140,419	38.01
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan		4,782,369,886	6,225,907,600	(1,443,537,714)	(23.19)
Pembayaran Pemeliharaan		27,365,107,333	8,547,981,437	18,817,125,896	220.14
Pembayaran Perjalanan Dinas		27,365,107,333	6,473,678,325	20,891,429,008	322.71
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU		13,771,506,379	10,829,744,357	2,941,762,022	27.16
Pembayaran Bantuan Sosial		-	-	-	-
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		-	-	-	-
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL		-	-	-	-
Penyetoran PNBP ke Kas Negara		226,802,371	655,011,868	(428,209,497)	(65.37)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		180,408,397,307	126,212,582,216	54,195,815,091	42.94
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		13,603,745,058	2,678,903,189	10,924,841,869	407.81
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2				
ARUS MASUK KAS					
Penjualan atas Tanah		-	-	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		112,266,880	7,766,660	104,500,220	-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	277,777,777	-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-	-	-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya		-	143,999,000	(143,999,000)	(100.00)
JUMLAH ARUS MASUK KAS		112,266,880	429,543,437	(317,276,557)	(73.86)
ARUS KELUAR KAS					
Perolehan atas Peralatan dan Mesin		31,733,542,737	12,917,361,868	18,816,180,869	-
Perolehan atas Gedung dan Bangunan		-	38,581,087,630	-	-
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-	-	-
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya		-	961,785,000	(961,785,000)	-
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		31,733,542,737	52,460,234,498	(20,726,691,761)	-
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		(31,621,275,857)	(832,243,920)	(30,789,031,937)	3,699.52
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.3				
ARUS MASUK KAS					
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara		-	-	-	-
JUMLAH ARUS MASUK KAS		-	-	-	-
ARUS KELUAR KAS					
Penyetoran ke Kas Negara		-	-	-	-
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		-	-	-	-
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		-	-	-	-

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2022	2022	Jumlah	%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.4				
ARUS MASUK KAS					
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		6,026,654,232	6,337,733,635	(311,079,403)	(4.91)
JUMLAH ARUS MASUK KAS		6,026,654,232	1,328,396,628	4,698,257,604	353.68
ARUS KELUAR KAS					
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		7,192,102,231	5,009,337,007	2,182,765,224	44
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		7,192,102,231	5,009,337,007	2,182,765,224	44
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		(1,165,447,999)	(3,680,940,379)	2,515,492,380	(68.34)
KENAIKAN/PENURUNAN KAS		1,136,200,115	1,742,231,507	(606,031,392)	(34.78)
Penyesuaian atas Selisih Kurs		-	-	-	-
Saldo Awal Kas		10,588,296,340	10,935,966,969	(347,670,629)	(3.18)
Koreksi Saldo Kas		-	-	-	-
SALDO AKHIR KAS		11,724,496,455	12,678,198,476	(953,702,021)	(7.52)
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :					
Saldo Akhir Kas pada BLU		10,844,429,326	8,542,781,212	2,301,648,114	26.94
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas		880,067,129	2,045,515,128	(1,165,447,999)	(56.98)
Investasi Jangka Pendek BLU		-	-	-	-
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU		-	-	-	-
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya		-	-	-	-
Jumlah Rincian Saldo		11,724,496,455	10,935,966,969	788,529,486	7.21
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :					
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)		-	-	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

VI. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2023	2022	Jumlah	%
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	G.1	8,542,781,212	8,128,946,333	413,834,879	5.09
Penggunaan SAL		-	-		
Sub Total		8,542,781,212	8,128,946,333	413,834,879	5.09
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	G.2	(133,406,156,077)	(120,737,038,371)	(12,669,117,706)	10.49
Penyesuaian SILPA/SIKPA		-	-		
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN :	G.3	135,707,804,191	121,150,873,250	14,556,930,941	12.02
Pendapatan Alokasi APBN		135,934,606,562	121,805,885,118	14,128,721,444	11.60
Penyetoran PNPB Ke Kas Negara		(226,802,371)	(655,011,868)	428,209,497	(65.37)
Penyetoran Surplus BLU Ke Kas Negara		-	-		
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL		-	-		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Setelah Penyesuaian	G.4	2,301,648,114	413,834,879	1,887,813,235	456.18
Sub Total		10,844,429,326	8,542,781,212	2,301,648,114	26.94
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-		
Lain-Lain		-	-		
Saldo Anggaran Lebih Akhir	G.5	10,844,429,326	8,542,781,212	2,301,648,114	26.94

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPI Curug) merupakan instansi pendidikan pemerintah dibawah Kementerian Perhubungan yang bertugas menyiapkan SDM Perhubungan melalui jalur pendidikan dan pelatihan.

Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan PLP Curug – Curug, Legok, Tangerang, Banten.

Politeknik Penerbangan Indonesia Curug didirikan dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang transportasi udara, guna memenuhi kebutuhan SDM dibidang penerbangan PPI Curug secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas *output*-nya guna mendukung pengembangan profesionalisme SDM dibidang penerbangan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Politeknik Penerbangan Indonesia Curug berkomitmen dengan visi ***“Menghasilkan lulusan yang diakui secara nasional dan internasional untuk menuju pusat unggulan yang berstandar internasional.”*** Sedangkan misi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug ***“Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian teknologi penerapan di bidang penerbangan dalam rangka mencerdaskan bangsa dengan membangun sumber daya manusia (SDM) penerbangan yang memiliki iman dan taqwa, berkualitas internasional mampu bersaing, mandiri dan profesional”***. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut: Mengedepankan prinsip-prinsip *good corporate governance* (transparansi, akuntabilitas, kemandirian, integritas dan partisipasi) dalam setiap kegiatannya;

- Peningkatan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan setiap pengajar yang berstatus PNS dalam berbagai diklat, workshop atau

seminar yang sesuai kompetensinya, baik dalam negeri maupun luar negeri;

- Pengembangan kreativitas dan inovasi program diklat berbasis kompetensi;
- Berorientasi pada keberhasilan program pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan penerbangan;
- Peningkatan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di bidang penerbangan;
- Peningkatan pengelolaan sumber daya diklat;
- Aktif mengikuti perkembangan dunia pendidikan dan teknologi;
- Bekerja keras dan penuh tanggung jawab berdasarkan sistem yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh **Politeknik Penerbangan Indonesia Curug**. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Politeknik Penerbangan Indonesia Curug menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan **Politeknik Penerbangan Indonesia Curug** dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh **Politeknik Penerbangan Indonesia Curug**. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan **Politeknik Penerbangan Indonesia Curug** adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang

dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: **69/PMK.06/2014** tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo. (Umur Piutang 0 s.d. 90 hari)	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan. (Umur Piutang 91 s.d. 180 hari)	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan. (Umur Piutang 181 s.d. 360 hari)	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN. (Umur Piutang lebih dari 360 hari)	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas

sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp58.189.802.683

B.1 Pendapatan

Pendapatan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug terdiri dari Pendapatan Badan Layanan Umum dan Pendapatan PNBP lainnya. Adapun realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp58.189.802.683. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Badan Layanan Umum	116,680,360,000	57,963,000,312	47.85
Pendapatan PNBP Lainnya	-	226,802,371	100,00
Jumlah	116,680,360,000	58,189,802,683	49.87

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Badan Layanan Umum	57,963,000,312	56,625,754,607	2.36
Pendapatan PNBP Lainnya	226,802,471	655,011,868	(65.37)
Jumlah	58,189,802,783	57,280,766,475	1.59

Dari tabel diatas terlihat bahwa apabila dibandingkan secara persentase, realisasi pendapatan Badan Layanan Umum 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,59% dibandingkan 31 Desember 2022. Realisasi pendapatan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp57.280.766.475 sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023, realisasi pendapatan naik menjadi Rp58.189.802.783.

Realisasi Belanja
Negara
Rp253.787.279.000

B.2. Belanja

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp191.595.958.760 atau 99,88 % dari anggaran belanja sebesar Rp253.787.279.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	17,518,458,000	17,405,997,733	99.36
Belanja Barang dan Jasa	142,557,811,000	142,456,418,290	99.93
Belanja Modal	31,743,148,000	31,733,542,737	99.97
Jumlah	191,819,417,000	191,595,958,760	99.88

Adapun rincian belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	17,405,997,733	17,024,897,778	2.24
Belanja Barang	142,456,418,290	108,532,672,570	31.26
Belanja Modal	31,733,542,737	52,460,234,498	(39.51)
Jumlah	191,595,958,760	178,017,804,846	7.63

Tabel diatas memperlihatkan bahwa realisasi belanja tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,61% dibandingkan realisasi belanja tahun 2022.

Hingga tanggal 31 Desember 2023, output strategis yang telah dicapai oleh Politeknik Penerbangan Indonesia Curug sebagai berikut:

DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO								
periode : DESEMBER satker : 288127								
No	Kegiatan	KRO/RO	Keluaran (Data Sakti)				GAP**	Keterangan
			Target	Satuan	S.d Bulan Ini			
					RVRO	PCRO (%)		
1	3996	AEC003	10	esepakata	10	100	0.21	Kerja sama diklat PPI Curug sebanyak 10 kerja sama diklat di tahun 2023
2	4627	EBA962	1	Layanan	1	100	0.01	kegiatan ini merupakan pelaksanaan rapat-rapat, kehumasan serta protokoler dan telah terealisasi
3	4627	EBD952	10	Dokumen	10	100	2.76	kegiatan merupakan proses perencanaan PPI Curug seperti pembuatan RKAKL, PK, RKT dan telah rampung
4	3996	RAA003	14	Paket	14	100	0.02	kegiatan yang telah rampung ialah OVERHAUL PESAWAT LATH SAYAP TETAP SINGLE ENGINE, PENGADAAN AVIONIC CBT, PENGADAAN AIRFRAME AND STRUCTURE MAINTENANCE CBT, PENGADAAN POWERPLANT MAINTENANCE CBT, UPGRADE PERALATAN NAVIGASI PESAWAT LATH, Meubelair Asrama Curug 1 (Bravo), Meubelair Gedung Kantor, Pengadaan Komputer/PC
5	3996	SCB006	2800	Orang	2800	100	0.03	diklat pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan peserta berasal dari masyarakat umum dengan diklat yang berhubungan dengan industri penerbangan dengan total 2800 diklat DPM di tahun 2023
6	4627	EBD953	4	Dokumen	4	100	0.08	kegiatan ini merupakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan telah rampung sebanyak 4 kegiatan
7	3996	DCB020	32	Orang	37	100	0.02	Kegiatan yang berlangsung terkait peningkatan kompetensi tenaga pendidik di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
8	3996	AFA003	5	NSPK	5	100	1.13	Pelaksanaan pembuatan dokumen terkait dengan kurikulum, modul, dan bahan ajar masih berkoordinasi dengan PPSDMPU selaku pengawas kegiatan dengan target rampung di akhir tahun, dengan kegiatan yang telah rampung di bulan ini ialah PENYUSUNAN PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL), PENYUSUNAN REVIU RENSTRA 2020 - 2024, PENYUSUNAN DRAFT RENSTRA 2025-2029, PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PELATIHAN, PENYUSUNAN IJIN PEMBUKAAN PROGRAM S2 MAGISTER TERAPAN
9	3996	BMA006	1	layanan	1	100	0	Kegiatan penyusunan indeks Kepuasan Masyarakat telah rampung dengan nilai indeks sebesar 3,12
10	3996	BMA009	1	layanan	1	100	0	Sistem informasi PPI Curug seperti pengerjaan yaitu ebook, erepository, turnitin dan zoom dapat diakses seluruhnya

DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO								
periode : DESEMBER satker : 288127								
No	Kegiatan	KRO/RO	Keluaran (Data Sakti)				GAP**	Keterangan
			Target	Satuan	S.d Bulan Ini			
					RVRO	PCRO (%)		
11	3996	CAA003	6	Paket	6	100	0.05	kegiatan ini telah terealisasi dengan tersisa finalisasi kontrak
12	3996	DCB012	1755	Orang	1857	100	0.18	diklat teknis diselenggarakan sesuai dengan perjanjian kerjasama ppicurug dengan stakeholder dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan total peserta diklat teknis sebanyak 1857 peserta
13	3996	SAB008	191	Orang	188	98.43	-1.54	kegiatan pelaksanaan pembelajaran diklat pembentukan dilaksanakan sesuai kalender pendidikan dengan peserta diklat pembentukan taruna baru dari beberapa program studi di bulan September
14	4627	EBD955	7	Dokumen	7	100	0.2	Kegiatan penyusunan laporan keuangan pada tahun 2023 sudah selesai. Laporan keuangan tahunan 2023 akan disusun pada tahun 2024.
15	4626	EBC954	211	Orang	211	100	0.23	kegiatan ini merupakan pelaksanaan kepegawain
16	3996	BMA003	1	layanan	1	100	0.03	Kegiatan tracer study telah terlaksana dalam bentuk laporan tracer study lulusan 2022
17	4627	EBA994	1	Layanan	1	100	0.17	kegiatan ini merupakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai PPIC
18	3996	DCB021	10	Orang	29	100	0	Kegiatan yang berlangsung terkait peningkatan kompetensi tenaga pendidik di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug yakni Pelatihan Asesor Kompetensi BNSP
19	3996	SAB009	858	Orang	852	99.3	-0.65	kegiatan pelaksanaan pembelajaran diklat pembentukan dilaksanakan sesuai kalender pendidikan dengan peserta diklat pembentukan taruna baru dari beberapa program studi di bulan September

*Belanja Pegawai
Rp17.405.997.733*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai posisi bulan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.405.997.733 dan Rp17.024.897.778. Belanja pegawai merupakan belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	10,957,870,240	10,848,887,900	1.00
Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	-728,655	-	(100.00)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	170,499	153,880	10.80
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	(3,134)	-485	546.19
Belanja Tunj. Suami/istri PNS	825,497,886	859,728,874	(3.98)
Pengembalian Belanja Tunj. Suami/istri PNS	(14,280)	-	(100.00)
Belanja Tunj. Anak PNS	204,830,172	205,272,532	(0.22)
Belanja Tunj. Struktural PNS	82,435,000	137,300,000	(39.96)
Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	(8,100,000)	-	(100.00)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	927,311,000	744,955,000	24.48
Belanja Tunj. PPh PNS	51,054,308	49,903,917	2.31
Belanja Tunj. Beras PNS	594,640,620	600,941,160	(1.05)
Belanja Uang Makan PNS	1,547,967,000	1,730,526,000	(10.55)
Belanja Tunj. Umum PNS	332,825,000	301,330,000	10.45
Pengembalian Belanja Tunj. Umum PNS	-7,845,000	301,330,000	(102.60)
Belanja Tunj. Profesi Dosen	1,458,337,600	1,429,620,000	100.00
Belanja Gaji Pokok PPPK	286,064,500	-	100.00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,205	-	100.00
Belanja Tunj. Suami/istri PPPK	14,620,480	-	100.00
Belanja Tunj. Anak PPPK	4,990,172	-	100.00
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	28,535,000	-	100.00
Belanja Tunj. Beras PPPK	16,533,120	-	100.00
Belanja Uang Makan PPPK	61,530,000	-	
Belanja Uang Lembur	27,473,000	116,279,000	(76.37)
Jumlah	17,405,997,733	17,024,897,778	2.24

Belanja Barang

Rp142.456.418.290

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp142.456.418.290 dan Rp108.532.672.570. Realisasi Belanja Barang 2023 mengalami penurunan sebesar 2,97% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang 2022.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	9,580,368,554	15,367,828,398	(37.66)
Belanja Barang Non Operasional	29,199,004,228	15,676,148,764	86.26
Belanja Persediaan	4,178,474,086	3,517,508,700	18.79
Belanja Jasa	9,904,868,518	7,603,231,799	30.27
Belanja Pemeliharaan	27,315,322,333	7,795,060,387	250.42
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6,288,488,301	2,311,470,415	172.06
Belanja Perjalanan Luar Negeri	328,540,072	49,504,379	563.66
Belanja BLU	55,661,352,198	56,211,919,728	(0.98)
- Belanja Gaji dan Tunjangan	17,465,898,506	15,227,046,125	14.70
- Belanja Barang	18,396,666,466	19,341,826,865	(4.89)
- Belanja Jasa	4,944,700,000	3,156,196,300	56.67
- Belanja Pemeliharaan	49,785,000	752,921,050	(93.39)
- Belanja Perjalanan	428,900,047	4,112,703,531	(89.57)
- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	13,771,506,379	10,829,744,357	27.16
- Belanja Barang Persediaan Konsumsi - BLU	603,895,800	2,708,398,900	(77.70)
- Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	-	83,082,600	(100.00)
Jumlah Belanja	142,456,418,290	108,532,672,570	31.26

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp31.743.148.000

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp31.743.148.000

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	15,940,175,656	9,435,165,142	68.94
Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	15,793,367,081	3,482,196,726	-
Jumlah Belanja	31,733,542,737	12,917,361,868	69

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Nomor	Uraian Kontrak	Nilai Kontrak
1	'03.SP/PJ.OPSE/PPK-1/III/PPIC-2023	OVERHAUL PESAWAT LATIH SAYAP TETAP SINGLE ENGINE	6,994,875,900
2	'04.SP/PB.MEAB/PPK-1/II/PPIC-2023	MEUBELAIR ASRAMA CURUG I (BRAVO)	3,692,480,869
3	'05.SP/PJ.PPME/PPK-1/III/PPIC-2023	OVERHAUL PROPELLER DUE TO CALENDER PESAWAT SAYAP TETAP MULTI ENGINE	792,478,701
4	'07.SP/PJ.USAB/PPK-1/III/PPIC-2023	UPGRADE SIMULATOR KOMERSIAL AIRBUS A320 DAN BOEING 737-NG	7,982,862,480
5	11.SP/PJ.UPNP/PPK-1/IV/PPIC-2023	UPGRADE PERALATAN NAVIGASI PESAWAT LATIH	3,422,115,126
6	10.SP/PJ.ACBT/PPK-1/IV/PPIC-2023	POWERPLANT MAINTENANCE CBT	2,170,310,661
7	'09.SP/PJ.ASMC/PPK-1/IV/PPIC-2023	PENGADAAN AIRFRAME AND STRUCTURE MAINTENANCE CBT	2,697,166,800
8	'08.SP/PJ.ACBT/PPK-1/IV/PPIC-2023	AVIONIC COMPUTER BASE TRAINING (CBT)	2,414,827,200
9	1.86/SPK-NT/PPK-RM/XII/PPIC-2023	PENGADAAN PROFESIONAL DISPLAY	119,880,000
10	13.E-SP/PB.PMAR/PPK-1/XII/PPIC-2023	PENGADAAN MEUBELAIR ASRAMA CURUG I	1,150,848,000
11	1.87/SPK-NT/PPK-RM/XII/PPIC-2023	PENGADAAN MEUBELAIR GEDUNG KANTOR	198,997,000
12		Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Administrasi Lelang	96,700,000
		Jumlah	31,733,542,737

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0

B.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0. Tidak ada Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan	-	32,775,573,500	-
Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	-	1,053,650,560	-
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	4,751,863,570	-
Jumlah Belanja	-	38,581,087,630	100.00

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp0

B.7 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0. Tidak ada Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Jaringan	-	-	-
KDP	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.8 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp961.785.000. Tidak ada Belanja Modal Lainnya pada tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Modal Lainnya	-	961,785,000	(100.00)
Jumlah Belanja	-	961,785,000	-

Belanja Modal
Badan Layanan
Umum Rp0

B.9 Belanja Modal Badan Layanan Umum

Belanja Modal Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada Belanja Modal Badan Layanan Umum pada tahun 2023.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang telah dipertanggungjawabkan atau telah disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp880.067.129

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp880.067.129 dan Rp2.045.515.128.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan dan pengeluaran Badan Layanan Umum yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	2023	2022
BNI RPL 127 STPI untuk Dana Kelolaan BLU - 2312201542		
Uang Tunai		
Bank Mandiri RPL 127 STPI untuk Dana Kelolaan - 1760000874071	880,067,129	2,045,515,128
Bank Mandiri RPL 127 STPI untuk Operasional Penerimaan 1760000874055		
Jumlah	880,067,129	2,045,515,128

Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp880.067.129 merupakan kelebihan pendapatan yang telah diterima dari taruna semester berjalan untuk digunakan pada semester berikutnya senilai Rp77.510.000 serta dari pendapatan-pendapatan yang belum diketahui pengirimnya senilai Rp802.557.129.

Kas pada Badan
Layanan Umum
Rp10.844.429.326

C.3 Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp10.844.429.326 dan Rp8.542.781.212 Kas pada Badan Layanan Umum merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang sumbernya berasal dari dana Badan Layanan Umum yang telah disahkan kepada negara melalui SP2B. Sampai dengan 31 Desember 2023 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug memiliki beberapa rekening yang digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran dana kas, dengan rincian

sebagai berikut:

- Rekening Dana Kelolaan BLU PT Bank BNI (Persero), Tbk dengan nama RPL 127 STPI untuk Dana Kelola BLU dengan nomor rekening 2312201542.
- Rekening Dana Kelolaan BLU PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nama RPL 127 STPI untuk Dana Kelolaan BLU dengan nomor rekening 1760000874071.
- Rekening Dana Kelolaan BLU PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nama RPL 127 STPI untuk Operasional Penerimaan BLU dengan nomor rekening 1760000874055.
- Rekening Operasional Belanja BLU PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nama RPL 127 STPI untuk Operasional Belanja BLU dengan nomor rekening 1760000874030.

Selain Rekening untuk penerimaan dan pengeluaran kas, PPI Curug juga memiliki rekening Deposito yaitu:

Beberapa Rekening yang telah ditutup adalah;

- Rekening Deposito di Bank Mandiri RPL 127 BLU STPI untuk PKD dengan nomor rekening 176-02-0013705-5. Rekening Deposito ini telah ditutup pada tanggal 30 April 2020.
- Rekening Giro Valas USD PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan nama RPL 127 BLU STPI untuk OPS P dalam USD dengan nomor rekening 1760001146727. Rekening ini ditutup pada tanggal 8 Juli 2020.
- Rekening Deposito di Bank BNI RPL 127 BLU STPI untuk PKD dengan nomor rekening 0830750628. Rekening Deposito ini telah ditutup pada tanggal 29 Mei 2023.
- Rekening Deposito di Bank BTN RPL 127 BLU STPI untuk PKD dengan nomor rekening 00043.01.40.011058.6. Rekening Deposito ini telah ditutup pada tanggal 29 Mei 2023.

Rincian Kas pada Badan Layanan Umum pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas pada Badan Layanan Umum

Jenis	2023	2022
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk - Rek. 1760000874055	5,884,581,173	908,692,057
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk - Rek. 1760000874071	2,490,092,649	2,930,961,421
PT Bank BNI (Persero), Tbk - Rek. 2312201542	535,613,985	608,760,149
Deposito Bank BTN	-	2,596,412,263
Deposito Bank BNI	-	1,497,955,322
Jumlah	8,910,287,807	8,542,781,212

Terdapat perbedaan antara saldo Kas pada Badan Layanan Umum dengan Rekening Koran yang disebabkan karena adanya uang tunai atas belanja remunerasi yang belum dibayarkan senilai Rp1.934.141.519.

Piutang Bukan
Pajak
Rp430.659.300

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp430.659.300 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	2023	2022
Piutang PNBP	430,659,300	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Piutang sebesar Rp430.659.300 adalah piutang atas temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu BLU tahun 2020 atas kelebihan pembayaran belanja barang.

Penyisihan Piutang
Bukan Pajak
Rp430.659.300

C.5 Penyisihan Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp430.659.300 dan Rp0.

Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak

Uraian	2023	2022
Piutang PNBP	430,659,300	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang sebesar Rp430.659.300 merupakan penyisihan dari Piutang atas temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu BLU tahun 2020 atas kelebihan pembayaran belanja barang yang macet.

Piutang dari
kegiatan
Operasional Badan
Layanan Umum
Rp8.113.000.513

C.6 Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp8.113.000.513 dan Rp9.487.278.971. Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum merupakan piutang yang berasal dari jasa layanan Badan Layanan Umum namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Uraian	2023	2022
Piutang Pelayanan Pendidikan		
PENERBANG	1,575,720,000	2,142,182,500
TEKNIK PENERBANG	1,055,400,300	1,787,980,500
TEKNIK PESAWAT UDARA	786,984,900	1,187,072,100
TEKNIK NAVIGASI UDARA	246,215,400	158,300,400
TEKNIK BANGUNAN DAN LANDASAN	13,600,000	107,890,000
TEKNIK LISTRIK BANDARA	8,600,000	255,804,000
TEKNIK MEKANIKAL BANDARA	-	78,914,000
KESELAMATAN PENERBANG	19,245,000	159,719,000
PEMANDU LALU LINTAS UDARA	-	111,764,000
KP	19,245,000	47,955,000
PKP-PK	-	-
PENERANGAN AERONAUTIKA	-	-
MANAJEMEN PENERBANG	771,350,000	110,854,000
OPERASI BANDAR UDARA	771,350,000	110,854,000
Jumlah Piutang Pelayanan Pendidikan	3,421,715,300	4,200,736,000
Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU		
FLYBEST	686,850,000	959,850,000
BUILDING PLANT SAFETY	46,200,000	46,200,000
LKP YUMA	205,200,000	205,200,000
ANGKASA PURA SOLUSI	32,310,000	362,410,000
LPPNPI	2,637,200,000	600,000,000
PANCA JIWA MANUNGGAL	451,000,000	451,000,000
SYAHRUL YAZID	9,000,000	9,000,000
ELI RAMOSDO SARAGIH	9,000,000	9,000,000
TAQWA HUUUDALLOH	500,000	500,000
MOCHAMAD REZKY ZULKARNAEN	2,030,000	2,030,000
BPPT DARAT MEMPAWAH	25,438,471	25,438,471
FERDINAND MARCOS WONMALY	7,000,000	7,000,000
TIMOR LESTE	5,714,242	-
BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT	133,380,000	-
PEMKOT JAYAPURA	440,460,000	-
JATC	2,500	874,656,000
ANGKASA PURA SUPPORT	-	133,500,000
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA	-	98,000,000
ANGKASA PURA 2	-	770,975,000
PELITA AIR SERVICE	-	16,500,000
SUNANTO AJIDARMO	-	60,800,000
AGOES HARDIANTO	-	95,500,000
RB. SUNDOKO HARYO PERMADI	-	95,500,000
SENA MAULANA	-	115,150,000
PT. KALTIM PRIMA COAL	-	200,000,000
PT BHINNEKA DWI PERKASA	-	148,333,500
Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU	4,691,285,213	5,286,542,971
Jumlah Piutang dari kegiatan Operasional BLU	8,113,000,513	9,487,278,971

Data saldo Piutang awal tahun 2023 sebesar Rp9.487.278.971 terdapat penambahan piutang sebesar Rp32.935.327.000 dan pengurangan sebesar Rp34.148.171.958. Rincian Mutasi Piutang adalah sebagai berikut:

Mutasi Piutang

URAIAN	SALDO AWAL 31 DES 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2023
PIUTANG BLU PELAYANAN PENDIDIKAN	4,200,736,000	24,181,550,000	24,960,570,700	3,421,715,300
PENERBANG	2,142,182,500	2,419,850,000	2,986,312,500	1,575,720,000
TEKNIK PENERBANG	1,787,980,500	13,220,100,000	13,952,680,200	1,055,400,300
TEKNIK PESAWAT UDARA	1,187,072,100	4,915,260,000	5,315,347,200	786,984,900
TEKNIK NAVIGASI UDARA	158,300,400	2,193,690,000	2,105,775,000	246,215,400
TEKNIK BANGUNAN DAN LANDASAN	107,890,000	1,794,000,000	1,888,290,000	13,600,000
TEKNIK LISTRIK BANDARA	255,804,000	2,024,050,000	2,271,254,000	8,600,000
TEKNIK MEKANIKAL BANDARA	78,914,000	2,293,100,000	2,372,014,000	-
KESELAMATAN PENERBANG	159,719,000	2,820,720,000	2,961,194,000	19,245,000
PEMANDU LALU LINTAS UDARA	111,764,000	749,520,000	861,284,000	-
KP	47,955,000	-	28,710,000	19,245,000
PKP-PK	-	1,562,400,000	1,562,400,000	-
PENERANGAN AERONAUTIKA	-	508,800,000	508,800,000	-
MANAJEMEN PENERBANG	110,854,000	5,720,880,000	5,060,384,000	771,350,000
OPERASI BANDAR UDARA	110,854,000	5,720,880,000	5,060,384,000	771,350,000
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL LAINNYA BL	5,286,542,971	8,753,777,900	9,200,701,258	4,691,285,213
IATC	874,656,000	-	874,653,500	2,500
FLYBEST	959,850,000	452,648,000	725,648,000	686,850,000
BUILDING PLANT SAFETY	46,200,000	-	-	46,200,000
ANGKASA PURA SUPPORT	133,500,000	-	133,500,000	-
LKP YUMA	205,200,000	-	-	205,200,000
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA	98,000,000	-	98,000,000	-
ANGKASA PURA 2	770,975,000	-	770,975,000	-
ANGKASA PURA SOLUSI	362,410,000	-	330,100,000	32,310,000
LPPNPI	600,000,000	2,637,200,000	600,000,000	2,637,200,000
TNI AU	-	3,159,000,000	3,159,000,000	-
Panca Jiwa Manunggal	451,000,000	-	-	451,000,000
Pelita Air Service	16,500,000	-	16,500,000	-
PEMKOT JAYAPURA	-	440,460,000	-	440,460,000
SYAHRUL YAZID	9,000,000	-	-	9,000,000
ELI RAMOSDO SARAGIH	9,000,000	-	-	9,000,000
TAQWA HUDAUDALLOH	500,000	-	-	500,000
MOCHAMAD REZKY ZULKARNAEN	2,030,000	-	-	2,030,000
PT. MY INDO AIRLINES	-	228,160,000	228,160,000	-
BPPT DARAT MEMPAWAH	25,438,471	-	-	25,438,471
FERDINAND MARCOS WONMALLY	7,000,000	-	-	7,000,000
SUNANTO AJIDARMO	60,800,000	-	60,800,000	-
AGDES HARDIANTO	95,500,000	-	95,500,000	-
RB. SUNDOKO HARYO PERMADI	95,500,000	-	95,500,000	-
SENA MAULANA	115,150,000	-	115,150,000	-
PT. KALTIM PRIMA COAL	200,000,000	-	200,000,000	-
TIMOR LESTE	-	880,000,000	874,285,758	5,714,242
PT RIMBUN ABADI AVIASI	-	92,000,000	92,000,000	-
PT. BHIINNEKA DWI PERSADA	-	593,334,000	593,334,000	-
PT. BURUNG BESI BERJAYA	-	83,595,000	83,595,000	-
PT. ANGKASA PURA AVIASI	-	54,000,000	54,000,000	-
BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT	-	133,380,000	-	133,380,000
JUMLAH	9,487,278,971	32,935,327,000	34,161,271,958	8,113,000,513

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang dari
kegiatan
Operasional Badan
Layanan Umum
(Rp2.736.265.866)

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp2.496.239.046) dan (Rp2.736.265.866). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Layanan Pendidikan

Uraian	Nilai Piutang	Klasifikasi Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
PENERBANG	1,575,720,000			1,432,140,000	143,580,000
TEKNIK PENERBANG	1,055,400,300	302,309,000	33,740,000	67,936,000	571,415,300
TEKNIK PESAWAT UDARA	788,984,900	261,440,000		67,936,000	457,608,900
TEKNIK NAVIGASI UDARA	248,215,400	98,669,000	33,740,000		113,806,400
TEKNIK BANGUNAN DAN LANDASAN	13,600,000	13,600,000			
TEKNIK LISTRIK BANDARA	8,600,000	8,600,000			
TEKNIK MEKANIKAL BANDARA	-				
KESELAMATAN PENERBANG	19,245,000				19,245,000
PEMANDU LALU LINTAS UDARA	-				
KP	19,245,000				19,245,000
PKP-PK	-				
PENERANGAN AERONAUTIKA	-				
MANAJEMEN PENERBANG	771,350,000	676,070,000		95,280,000	
OPERASI BANDAR UDARA	771,350,000	676,070,000		95,280,000	
JUMLAH	3,421,715,300	1,058,379,000	33,740,000	1,595,356,000	734,240,300
PENYISIHAN PIUTANG	1,540,584,195	5,291,895	3,374,000	797,676,000	734,240,300

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Kerja Sama

Uraian	Nilai Piutang	Klasifikasi Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
FLYBEST	686,850,000		260,850,000	426,000,000	
BUILDING PLANT SAFETY	46,200,000				46,200,000
LKP YUMA	205,200,000				205,200,000
ANGKASA PURA SOLUSI	32,310,000		32,310,000		
LPPNPI	2,637,200,000	2,637,200,000			
PANCA JIWA MANUNGGAL	451,000,000				451,000,000
SYAHRUL YAZID	9,000,000			9,000,000	
ELI RAMOSDO SARAGIH	9,000,000			9,000,000	
TAQWA HUDAUDALLOH	500,000			500,000	
MOCHAMAD REZKY ZULKARNAEN	2,030,000			2,030,000	
BPPT DARAT MEMPAWAH	25,438,471		25,438,471		
FERDINAND MARCOS WONIMALY	7,000,000			7,000,000	
TIMOR LESTE	5,714,242		5,714,242		
BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT	133,380,000	133,380,000			
PEMKOT JAYAPURA	440,460,000.00			440,460,000	
IATC	2,500				2,500
JUMLAH	4,691,285,213	2,770,580,000	324,312,713	893,990,000	702,402,500
PENYISIHAN PIUTANG	1,195,681,671	13,852,900	32,431,271	446,995,000	702,402,500

Persediaan
Rp71.949.351.793

C.8 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp71.949.351.793 dan Rp71.408.081.589. Rincian Persediaan adalah sebagai berikut:

No	Jenis	2023	2022
1	Barang Konsumsi	5,046,863,575	170,613,400
2	Bahan untuk Pemeliharaan	625,000	625,000
3	Suku Cadang	64,037,984,740	67,904,912,681
4	Bahan Baku	2,431,220,575	2,865,912,745
5	Persediaan Lainnya	432,657,903	466,017,763
	Jumlah	71,949,351,793	71,408,081,589

Tanah
Rp2.702.017.500.000

C.9 Tanah

Saldo aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2.702.017.500.000 dan Rp2.702.017.500.000. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	2,702,017,500,000
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Reklasifikasi	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Aset	-
Hibah	-
Transfer Masuk	-
Normalisasi BMN	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	2,702,017,500,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2,702,017,500,000

Peralatan dan Mesin
Rp2.327.439.153.615

C.10 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2.327.439.153.615 dan Rp2.296.700.740.064.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	2,296,700,740,064
Mutasi tambah:	46,930,364,042
Pembelian	1,492,085,000
Transfer Masuk	8,097,522,115
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	11,005,935,530
Pengembangan Nilai Aset	792,478,701
Pencatatan Nilai Bertambah	7,103,189,190
Pengembangan Melalui KDP	18,439,153,506
Hibah	
Normalisasi BMN	
Mutasi kurang:	16,191,950,491
Koreksi Pencatatan Nilai Aset	7,103,189,190
Penghentian Aset dari Penggunaan	9,088,761,301
Transfer Keluar	
Penghapusan	
Saldo per 31 Desember 2023	2,327,439,153,615
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	1,952,015,054,070
Nilai Buku per 31 Desember 2023	375,424,099,545

Transfer masuk senilai Rp8.097.522.115 berupa peralatan instrument test laboratorium teknik navigasi penerbangan pada Direktorat Navigasi Penerbangan yang diserahterimakan kepada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug berdasarkan BAST Nomor: 1021/BA/PU/DNP/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

Gedung dan Bangunan
Rp398.019.126.750

C.11 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp398.019.126.750 dan Rp398.019.126.750. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	398,019,126,750
Mutasi tambah:	-
Pengembangan Melalui KDP	
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	
Saldo Awal	
Transfer Masuk	
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	
Transfer Keluar	
Normalisasi	
Penghentian Aset dari Penggunaan	
Saldo per 31 Desember 2023	398,019,126,750
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	56,911,455,770
Nilai Buku per 31 Desember 2023	341,107,670,980

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp23.705.500.855

C.12 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp23.705.500.855 dan Rp27.684.794.712. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	27,684,794,712
Mutasi tambah:	-
Saldo Awal	
Hibah	
Koreksi Aset	
Transfer Masuk	
Mutasi kurang:	3,979,293,857
Penghentian Aset dari Penggunaan	3,979,293,857
Penghapusan	
Saldo per 31 Desember 2023	23,705,500,855
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	11,018,560,901
Nilai Buku per 31 Desember 2023	12,686,939,954

Aset Tetap Lainnya
Rp29.975.048.140

C.13 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp29.975.048.140 dan Rp31.127.088.574. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	31,127,088,574
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Normalisasi	
Reklasifikasi Masuk	
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	1,152,040,434
Penghentian dari Penggunaan	1,152,040,434
Transfer Keluar	
Saldo per 31 Desember 2023	29,975,048,140
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	99,610,000
Nilai Buku per 31 Desember 2023	29,875,438,140

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp2.020.291.652.251)

C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing (Rp2.020.291.652.251) dan (Rp1.946.367.053.743). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Badan Layanan Umum merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai BMN	Akumulasi Penyusutan	Nilai Netto
1	Peralatan dan Mesin	2,327,439,153,615	1,952,015,054,070	375,424,099,545
2	Gedung dan Bangunan	398,019,126,750	56,911,455,770	341,107,670,980
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	23,705,500,855	11,018,560,901	12,686,939,954
4	Aset Tetap Lainnya	29,975,048,140	99,610,000	29,875,438,140
	Jumlah	2,779,138,829,360	2,020,044,680,741	759,094,148,619

Aset Tak Berwujud
Rp35.438.237.692

C.15 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp35.438.237.692 dan Rp35.438.237.692.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

No	Jenis	2023	2022
1	Hak Cipta	31,247,000	31,247,000
2	Software	17,133,985,300	17,133,985,300
3	Lisensi	3,200,000	3,200,000
4	Hasil Kajian/Penelitian	5,200,215,047	5,200,215,047
5	Aset Tak Berwujud Lainnya	13,069,590,345	13,069,590,345
Jumlah		35,438,237,692	35,438,237,692

Dana yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp907.096.681

C.16 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 adalah Rp907.096.681. Dana yang Dibatasi Penggunaannya timbul karena adanya mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima di mana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembauaran akhir tahun anggaran.

Aset Lain-lain
Rp6.002.177.000

C.17 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp6.002.177.000 dan Rp6.002.177.000. Aset Lain-Lain senilai Rp6.002.177.000 terdiri dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

Rincian Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	6,002,177,000
Mutasi tambah:	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	
Reklasifikasi	
Normalisasi	
Transfer Masuk	
Mutasi kurang:	-
Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan	
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	6,002,177,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	6,002,177,000
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

*Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp23.144.049.450)*

C.18 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah (Rp23.144.049.450) dan (Rp23.144.049.450)

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai BMN	Akumulasi Penyusutan	Nilai Netto
1	Hak Cipta	31,247,000	5,133,550	26,113,450
2	Software	17,133,985,300	17,133,985,300	-
3	Lisensi	3,200,000	3,200,000	-
4	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	5,200,215,047	6,002,177,000	-
	Jumlah	13,069,590,345	23,144,495,850	26,113,450

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp4.141.803.420*

C.19 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp4.141.803.420 dan Rp4.774.983.647. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Kegiatan	Rincian
1	Beban pegawai yang masih harus dibayar	1.891.698.057
2	Beban barang yang masih harus dibayar	431.226.553
3	Utang kepada pihak ketiga BLU	31.715.000
4	Utang kepada pihak ketiga Lainnya	907.096.681
5	Dana pihak ketiga BLU	880.067.129
	Jumlah	4.141.803.420

Beban Pegawai yang masih harus dibayar adalah remunerasi pegawai bulan November sedangkan Beban barang yang masih harus dibayar terdiri dari belanja pelayanan jasa navigasi penerbangan senilai Rp208.726.553 dan belanja bahan diklat program studi Rp222.500.000. Utang kepada pihak ketiga BLU merupakan belanja perjalanan dinas sedangkan Dana pihak ketiga BLU terdiri dari kelebihan pembayaran dari taruna senilai Rp77.510.000 dan uang

masuk yang belum ada konfirmasi senilai Rp802.557.129.

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya muncul sehubungan dengan adanya kewajiban sampai dengan akhir periode pelaporan yang belum dibayarkan ke rekening penyedia atas progress penyelesaian pekerjaan pada pembayaran dengan mekanisme RPATA. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya

DAFTAR SP2D SATKER				
Jenis SPM : PEMBAYARAN RPATA				
No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nominal	Deskripsi
1	249991303001022	05-01-2024	124,416,681	Pembayaran PEKERJAAN PAVING BLOCK GEDUNG TEKPEN sesuai BAST Nomor 97/BAST/1.92/SPK-NT/PPK-RM/XII/PPIC-2023 Tanggal 31-12-2023
2	249991303001021	05-01-2024	140,850,000	Pembayaran PENGADAAN LANGGANAN INTERNET sesuai BAST Nomor 90/BAST/1.54/SPK/PJ.INT/PPK/XII/PPIC-2023 Tanggal 31-12-2023
3	249991303001023	05-01-2024	72,560,000	Pembayaran PEMELIHARAAN HALAMAN GEDUNG UTAMA sesuai BAST Nomor 99/BAST/1.94/SPK-NT/PPK-RM/XII/PPIC-2023 Tanggal 31-12-2023
4	249991303001020	05-01-2024	448,720,000	Pembayaran PENGADAAN PELUMAS PESAWAT W120 sesuai BAST Nomor 93/BAST/14.E-SP/PB.PPPS/PPK-1/XII/PPIC-2023 Tanggal 31-12-2023
5	249991303001025	05-01-2024	120,550,000	Pembayaran PEKERJAAN PEMELIHARAAN TARUNI sesuai BAST Nomor 98/BAST/1.93/SPK-NT/PPK-RM/XII/PPIC-2023 Tanggal 31-12-2023
JUMLAH			907,096,681	

Pendapatan Diterima Dimuka Rp51.040.500

C.20 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp51.040.500 dan Rp500.859.000. Pendapatan diterima di muka senilai Rp51.040.500 adalah pendapatan sewa untuk untuk periode tahun 2024 yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2023.

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.21 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikelola oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
Operasional
Rp193.126.483.082

D.1 Pendapatan Operasional

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp193.126.483.082 dan Rp178.005.689.565. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Alokasi APBN	135,934,606,562	121,805,885,118	11.59
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	28,134,689,150	36,376,663,003	(22.65)
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	5,853,554,000	9,232,540,750	(36.59)
Pendapatan Hibah BLU	-	-	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	19,267,514,225	8,258,084,109	133.31
Pendapatan BLU Lainnya	3,936,119,145	2,332,516,585	68.74
Jumlah	193,126,483,082	178,005,689,565	8.49

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat merupakan pendapatan yang diperoleh dari pembayaran taruna. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain merupakan pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian dan diluar Kementerian. Sedangkan Pendapatan BLU Lainnya merupakan pendapatan yang diperoleh dari optimalisasi aset serta bunga bank.

Beban Pegawai
Rp36.763.594.296

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp36.763.594.296 dan Rp32.251.943.903. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	10,957,141,585	10,848,887,900	1.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	167,365	153,395	9.11
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	825,483,606	859,728,874	(3.98)
Beban Tunj. Anak PNS	204,830,172	205,272,532	(0.22)
Beban Tunj. Struktural PNS	74,335,000	137,300,000	(45.86)
Beban Tunj. Fungsional PNS	927,311,000	744,955,000	24.48
Beban Tunj. PPh PNS	51,054,308	49,903,917	2.31
Beban Tunj. Beras PNS	594,640,620	600,941,160	(1.05)
Beban Uang Makan PNS	1,547,967,000	1,730,526,000	(10.55)
Beban Tunj. Umum PNS	324,980,000	301,330,000	7.85
Beban Tunj. Profesi Dosen	1,458,337,600	1,429,620,000	2.01
Beban Gaji Pokok PPPK	286,064,500	-	100.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	3,205	-	100.00
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	14,620,480	-	100.00
Beban Tunj. Anak PPPK	4,990,172	-	100.00
Beban Tunj. Fungsional PPPK	28,535,000	-	100.00
Beban Tunj. Beras PPPK	16,533,120	-	100.00
Beban Uang Makan PPPK	61,530,000	-	100.00
Beban Uang Lembur	27,473,000	116,279,000	(76.37)
Beban Gaji dan Tunjangan	19,357,596,563	15,227,046,125	27.13
Jumlah	36,763,594,296	32,251,943,903	13.99

*Beban Persediaan
Rp9.068.724.060*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.068.724.060 dan Rp7.437.766.755. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	7,100,448,230	5,087,806,100	39.56
Beban Persediaan Bahan Baku	1,934,915,970	2,216,983,440	(12.72)
Beban Persediaan Lainnya	33,359,860	132,977,215	(74.91)
Jumlah Beban Persediaan	9,068,724,060	7,437,766,755	21.93

*Beban Jasa
Rp83.930.555.399*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp83.930.555.399 dan Rp70.875.510.861. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	8,333,313,554	8,432,319,000	(1.17)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	190,150,000	176,000,000	8.04
Beban Barang Operasional Lainnya	182,127,693	6,090,456,906	(97.01)
Beban Honor Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	441,610,000	877,779,045	(49.69)
Beban Bahan	7,813,223,016	2,772,480,980	181.81
Beban Honor Output Kegiatan	7,773,150,000	6,575,850,000	18.21
Beban Barang Non Operasional Lainnya	13,779,003,863	6,476,171,029	112.76
Beban Barang Non Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19	-	175,000,000	(100.00)
Beban Langganan Listrik	5,475,748,162	4,568,502,198	19.86
Beban Langganan Telepon	-	10,812,268	(100.00)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,739,600,000	1,689,000,000	3.00
Beban Jasa Konsultan	196,894,500	195,012,000	0.97
Beban Sewa	1,748,328,000	507,470,000	244.52
Beban Jasa Profesi	358,012,500	317,525,000	12.75
Beban Jasa Lainnya	120,774,266	256,301,333	(52.88)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	58,609,000	(100.00)
Beban Barang	17,438,903,466	18,201,380,245	(4.19)
Beban Jasa	4,564,320,000	2,899,696,300	57.41
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	13,771,506,379	10,512,062,957	31.01
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	-	83,082,600	(100.00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan mesin	3,890,000	-	100.00
Jumlah	83,930,555,399	70,875,510,861	18.42

*Beban
Pemeliharaan
Rp21.872.105.869*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21.872.105.869 dan Rp11.196.214.681. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,901,738,289	2,771,154,248	112.97
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19			100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,506,743,673	198,590,000	1,162.27
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,717,792,755	3,750,140,239	105.80
Beban Pemeliharaan	49,785,000	752,921,050	(93.39)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	6,768,000	14,016,000	(51.71)
Beban Persediaan Suku Cadang	5,689,278,152	3,709,273,144	53.38
Jumlah	21,872,105,869	11,196,094,681	95.35

Beban Perjalanan
Dinas
Rp6.866.770.347

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.866.770.347 dan Rp6.473.678.325. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	5,571,234,526	1,951,531,593	185.48
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	490,000	8,388,000	(94.16)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	507,486,395	323,631,322	56.81
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53,136,500	27,919,500.00	90.32
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Negeri	328,540,072	49,504,379.00	563.66
Beban Perjalanan	405,882,854	4,112,703,531	(90.13)
Jumlah	6,866,770,347	6,473,678,325	6.07

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp72.891.929.963

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp72.891.929.963 dan Rp95.377.573.422. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	62,243,911,516	84,588,520,028	(26.42)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9,389,196,420	9,023,040,485	4.06
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	1,175,570,427	1,160,216,509	1.32
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
Jumlah Penyusutan	72,808,678,363	94,771,777,022	(23.17)
Beban Amortisasi Hak Cipta	446,400	446,400	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	82,805,200	605,350,000	(86.32)
Beban Penyusutan aset lain-lain			
Jumlah Amortisasi	83,251,600	605,796,400	(86.26)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	72,891,929,963	95,377,573,422	(23.57)

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp1.016.713.686

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.016.713.686 dan Rp288.930.754 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	430,359,860	-	100.00
Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	338,895,262	-	100.00
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Kegiatan Lainnya BLU	247,159,124	-	100.00
Beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	-	288,930,754	-100.00
Jumlah	1,016,414,246	288,930,754	251.78

Surplus (Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Rp56.669.215

D.9 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 adalah Rp56.669.215 sedangkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2022 adalah (Rp13.604.807.187). Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	112,266,880	(13,303,299,864)	(100.84)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	112,266,880	429,543,437	(73.86)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	13,732,843,301	(100.00)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(55,597,665)	(301,507,323)	(81.56)
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	171,248,045	355,033,024	(51.76)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	226,845,710	656,540,347	(65.44)
Defisit Selisih Kurs	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	56,669,215	(13,604,807,187)	(272.90)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp3.610.881.639.836

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.610.881.639.836 dan Rp3.817.161.604.132.

Defisit LO

(Rp39.227.241.323)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp39.227.241.323) dan (Rp59.500.736.323) Surplus/Defisit LO merupakan selisih tambah antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp0

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Penyesuaian aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan merupakan koreksi yang berasal dari penyesuaian ekuitas atas Koreksi Nilai Persediaan. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Atas

Reklasifikasi Rp0

E.5 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi yang berasal dari Reklasifikasi aset. Koreksi atas Reklasifikasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih Revaluasi Aset

Tetap Rp0

E.6 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap berasal dari penyesuaian ekuitas dari Revaluasi Aset Tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset

Tetap Non Revaluasi

(Rp7.371.398.424)

E.7 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp7.371.398.424) dan Rp3.223.081.058.

Koreksi Lain-Lain

Rp426.721.518

E.8 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain Lain per 31 Desember tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp426.721.518 dan Rp1.354.675.742. Koreksi Lain Lain timbul untuk menghilangkan Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih bersaldo

negatif (kredit) dalam rangka penyajian laporan keuangan yang lebih wajar, sesuai S-27/PB/PB.6/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2023 Audited serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun.

Transaksi Antar
Entitas sebesar
Rp215.710.000

E.9 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp215.710.000 dan (Rp151.356.984.773). Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda, baik internal KL antar KL antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian dari Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Transfer Keluar	-	(151,356,984,773)	(100.00)
Transfer Masuk	215,710,000	-	#DIV/0!
Jumlah	215,710,000	(151,356,984,773)	(100.14)

Ekuitas Akhir sebesar
Rp3.564.925.431.607

E.10 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.564.925.431.607 dan Rp3.610.881.639.836.

*Arus Keluar dari
Aktivitas Operasi
Rp33.922.923.971*

F.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Nilai Arus Kas Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp33.922.923.971 merupakan selisih dari Nilai Arus Kas Masuk pada aktivitas Operasi sebesar Rp194.012.142.365 dan Nilai Arus Kas Keluar pada aktivitas Operasi sebesar Rp160.089.218.394.

Arus Kas Masuk terdiri dari:

- Jumlah Pendapatan dari Badan Layanan Umum yang terdiri dari Pendapatan dari Alokasi APBN sebesar Rp135.934.606.562 dan Jasa Layanan kepada Masyarakat sebesar Rp28.884.999.850. Jasa Layanan kepada Entitas Lain sebesar Rp5.853.554.000, Pendapatan dari Hasil Kerja Sama sebesar Rp19.233.019.663, Pendapatan Usaha Lainnya sebesar Rp3.936.119.145, Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp55.307.654, dan Pendapatan PNBPU Umum sebesar Rp114.535.491.

Arus Keluar terdiri dari :

- Belanja Pegawai, yaitu beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

- Belanja Pegawai adalah sebesar Rp34.871.896.239

Rincian Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022
Belanja Gaji Pokok PNS	10,957,870,240	10,848,887,900
Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	(728,655)	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	170,499	153,880
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	(3,134)	-485
Belanja Tunj. Suami/istri PNS	825,497,886	859,728,874
Pengembalian Belanja Tunj. Suami/istri PNS	(14,280)	-
Belanja Tunj. Anak PNS	204,830,172	205,272,532
Belanja Tunj. Struktural PNS	82,435,000	137,300,000
Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	(8,100,000)	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	927,311,000	744,955,000
Belanja Tunj. PPh PNS	51,054,308	49,903,917
Belanja Tunj. Beras PNS	594,640,620	600,941,160
Belanja Uang Makan PNS	1,547,967,000	1,730,526,000
Belanja Tunj. Umum PNS	332,825,000	301,330,000
Pengembalian Belanja Tunj. Umum PNS	(7,845,000)	301,330,000
Belanja Tunj. Profesi Dosen	1,458,337,600	1,429,620,000
Belanja Gaji Pokok PPPK	286,064,500	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,205	-
Belanja Tunj. Suami/istri PPPK	14,620,480	-
Belanja Tunj. Anak PPPK	4,990,172	-
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	28,535,000	-
Belanja Tunj. Beras PPPK	16,533,120	-
Belanja Uang Makan PPPK	61,530,000	-
Belanja Uang Lembur	27,473,000	116,279,000
Belanja Gaji dan Tunjangan	17,465,898,506	15,227,046,125
Jumlah	34,871,896,239	32,251,943,903

- Belanja Barang adalah sebesar Rp57.176.039.248

Rincian Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	2023	2022
Belanja Keperluan Perkantoran	8,339,423,000	8,432,319,000
Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	(6,109,446)	-
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	190,150,000	176,000,000
Belanja Barang Operasional Lainnya	615,295,000	5,881,730,353
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	441,610,000	877,779,045
Belanja Bahan	7,813,223,016	2,772,480,980
Belanja Honor Output Kegiatan	7,873,650,000	6,475,350,000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13,512,131,212	6,253,317,784
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	175,000,000
Belanja Barang	18,396,666,466	19,341,826,865
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	-	83,082,600
Jumlah	57,176,039,248	50,468,886,627

- Belanja Jasa adalah sebesar Rp14.849.568.518

Rincian Belanja Jasa 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	2023	2022
Belanja Langganan Listrik	5,475,748,162	4,568,502,198
Belanja Langganan Telepon	-	10,812,268
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,739,600,000	1,689,000,000
Belanja Jasa Konsultan	196,894,500	195,012,000
Belanja Sewa	1,748,328,000	507,470,000
Belanja Jasa Profesi	358,012,500	317,525,000
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	58,609,000
Belanja Jasa Lainnya	386,285,356	256,301,333
Belanja Jasa	18,396,666,466	3,156,196,300
Jumlah	28,301,534,984	10,759,428,099

- Belanja Barang Menghasilkan Persediaan adalah sebesar Rp4.782.369.886

Rincian Belanja Barang Menghasilkan Persediaan 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	2023	2022
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,513,097,000	2,625,221,700
Belanja Barang Persediaan Lainnya	665,377,086	892,287,000
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	603,895,800	2,708,398,900
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	-	-
Jumlah	4,782,369,886	6,225,907,600

- Belanja Pemeliharaan adalah sebesar Rp27.365.107.333

Rincian Belanja Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	2023	2022
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,901,738,289	2,890,790,100
Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	(119,635,852)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,506,743,673	198,590,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,717,792,755	3,750,140,239
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,822,350,211	1,075,175,900
Belanja Pemeliharaan	49,785,000	752,921,050
Jumlah	17,998,409,928	8,547,981,437

- Belanja Perjalanan Dinas adalah sebesar Rp7.045.928.420

Rincian Belanja Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	2023	2022
Belanja Perjalanan Biasa	5,727,375,406	1,951,531,593
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	490,000	8,388,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	507,486,395	323,631,322
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53,136,500	27,919,500
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	328,540,072	49,504,379
Belanja Perjalanan	428,900,047	4,112,703,531
Jumlah	7,045,928,420	6,473,678,325

- Belanja Barang dan Jasa Kekhususan BLU Rp 13.771.506.379

Rincian Belanja Barang dan Jasa Kekhususan BLU 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	2023	2022
Belanja Ketersediaan Layanan BLU		
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	13,771,506,379	10,829,744,357
Jumlah	13,771,506,379	10,829,744,357

- Penyetoran PNBP ke Kas Negara sebesar Rp 226.802.371

Rincian Penyetoran PNBP ke Kas Negara 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	2023	2022
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	226,802,371	655,011,868
Jumlah	226,802,371	655,011,868

*Arus Kas dari
Aktivitas Investasi
(Rp31.621.275.857)*

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Nilai Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar (Rp31.621.275.857). Arus kas masuk sebesar Rp.112.266.880 dan Arus kas keluar sebesar (Rp31.733.542.737) merupakan perolehan Aset Tetap yang terdiri dari:

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	2023	2022
Arus Kas Masuk	112,266,880	429,543,437
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	112,266,880	7,766,660
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	277,777,777
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	-	143,999,000
Arus Kas Keluar	31,733,542,737	52,460,234,498
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	31,733,542,737	12,917,361,868
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	-	38,581,087,630
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	-	961,785,000
Jumlah Belanja	(31,621,275,857)	(52,030,691,061)

Arus Kas dari
Aktivitas Pendanaan
Rp0

F.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Nilai Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp 0 dikarenakan penerimaan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga berjumlah sama yaitu Rp0.

Arus Kas dari
Aktivitas Transitoris
(Rp1.165.447.999)

F.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Nilai Arus Kas dari Aktivitas Transitoris untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.165.447.999) dari pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	2023	2022
Arus Kas Masuk	6,026,654,232	8,717,078,466
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	6,026,654,232	8,717,078,466
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	-	-
Arus Kas Keluar	7,192,102,231	7,388,681,838
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	7,192,102,231	7,388,681,838
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	-	-
Jumlah Belanja	-1,165,447,999	1,328,396,628

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran Lebih
(SAL Awal)
Rp8.542.781.212

G.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL Awal)

Nilai Saldo Anggaran Lebih pada BLU awal periode adalah sebesar Rp8.542.781.212 yaitu Saldo dari Kas Badan Layanan Umum yang telah disahkan tahun lalu.

SiLPA (Sisa
Lebih/Kurang
Pembiayaan
Anggaran
(Rp133.406.156.077)

G.2 SiLPA/SiKPA (Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran)

SiLPA/SiKPA sebesar (Rp133.406.156.077) di dapat dari penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

URAIAN	2023 REALISASI
PENDAPATAN	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	58,189,802,683
Jumlah Pendapatan	58,189,802,683
BEBAN	
Belanja Pegawai	17,405,997,733
Belanja Barang	142,456,418,290
Belanja Modal	31,733,542,737
Belanja Bantuan Sosial	-
Jumlah Beban	191,595,958,760
SILPA	(133,406,156,077)

Penyesuaian Transaksi
BLU dengan BUN
Rp135.707.804.191

G.3 Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN

Nilai Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN sebesar Rp135.707.804.191, yaitu selisih dari Alokasi Pendapatan APBN sejumlah Rp135.934.606.562 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal dengan Penyetoran PNPB ke kas negara sejumlah (Rp226.802.371).

SiLPA/SiKPA Setelah
Penyesuaian
Rp2.301.648.114

G.4 SiLPA/SiKPA Setelah Penyesuaian

Nilai SiLPA/SiKPA Setelah Penyesuaian adalah sebesar Rp2.301.648.114 yaitu selisih dari SiLPA/SiKPA dengan Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN.

SAL BLU Akhir
Rp10.844.429.326

G.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Nilai SAL BLU Akhir sebesar Rp10.844.429.326 terdiri dari Saldo awal SAL sebesar Rp8.542.781.212 dan SiLPA/SiKPA setelah Penyesuaian sebesar Rp2.301.648.114.

H. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

H.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Nomor: KP-PPIC 1161 Tahun 2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tahun Anggaran 2024, Susunan Pejabat Pengelola Anggaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug adalah sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Agustono, S.Sos., M.MTr.
2. Pejabat Penandatangan SPM : Kurnia Djuprianto, S.E., M.Ak.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (Sumber Anggaran RM) : Wahyu Kurniawan, S.E., M.M.
4. Pejabat Pembuat Komitmen (Sumber Anggaran BLU) : Ichyu Machmiyana S.ST., MS. SMA.
5. Bendahara Penerimaan : Samudra Windo, A.Md.KB.N.
6. Bendahara Pengeluaran : Mirani Puspita Verbasari, A.Md.

H.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi B/584/M.KT.01/2019 tanggal 9 Juli 2019, perihal Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug telah berubah status kelembagaan sebagai Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan vokasi di bidang penerbangan berada di bawah Kementerian Perhubungan menjadi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 5042 Tahun 2023 tanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, susunan Dewan Pengawas Satker PK-BLU Politeknik Penerbangan Indonesia Curug adalah sebagai berikut:

- Ketua : Ex. Officio Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Anggota : - Budi F. Prayitno, S.H., MSTA
- Ex Officio Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Banten

Masa Jabatan Dewan Pengawas sampai dengan Bulan Agustus 2028.

3. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Nomor: KP-PPIC 276 Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Perubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktur Indonesia Curug Nomor: SK. 1367 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Nomor:

KP-PPIC 1036 Tahun 2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Perubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Nomor: KP-PPIC 315 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Bendahara Pengeluaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tahun Anggaran 2023 Susunan Pejabat Pengelola Anggaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug adalah sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Agustono, S.Sos., M.MTr.
2. Pejabat Penandatangan SPM : Kurnia Djuprianto, S.E., M.Ak.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (Sumber Anggaran RM) : Wahyu Kurniawan, S.E., M.M.
4. Pejabat Pembuat Komitmen (Sumber Anggaran BLU) : Ichyu Machmiyana S.ST., MS. SMA.
5. Bendahara Penerimaan : Abas S.E., M.A.
6. Bendahara Pengeluaran : Mirani Puspita Verbasari, A.Md.

4. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Temuan BPK tahun 2020 yang belum selesai adalah pembayaran asuransi pesawat latih tahun 2020 pada PPI Curug tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran asuransi sebesar Rp1.491.496.463. Sesuai dengan surat dari Inspektur Jenderal Kemenhub Nomor: PS.308/1/4/ITJEN/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Pendapat Hukum Mengenai Asuransi Pesawat Latih, maka disarankan agar Direktur PPI Curug tidak melakukan pembayaran premi yang terutang tersebut.
5. Terdapat Ketidaksesuaian Kode Akun dengan Kode BMN senilai Rp3.890.000 yang dikarenakan adanya pembelian barang yang nilai satuannya di bawah nilai kapitalisasi, dengan rincian sebagai berikut:

KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN										
No.	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D
1	BAST KONTRAKTUAL	SI/BAST/1.87/SPK-NT/PPK-RM/XII/PPIC-2023	14-12-2023	532111	PENGADAAN MEUBELAIR GEDUNG KANTOR	3,050,105,999	6	490,000	2,940,000	231271302016R25
2	BAST KONTRAKTUAL	SI/BAST/1.87/SPK-NT/PPK-RM/XII/PPIC-2023	14-12-2023	532111	PENGADAAN MEUBELAIR GEDUNG KANTOR	3,050,302,001	1	950,000	950,000	231271302016R25
Total							7		3,890,000	



Kuasa Pengguna Anggaran,

Agustono, S.Sos., M.MTr.
NIP. 196908311991031001

BAB III

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

I. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Setiap Satker mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi (Sundjaja, 2002:68).

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, yang merupakan ikhtisar dari transaksi keuangan untuk 1 tahun periode. Laporan keuangan terdiri dari Neraca, laporan Laba/Rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan laporan penjelasan.

Laporan yang disusun sesuai dengan Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK). Laporan keuangan merupakan informasi prestasi manajemen. Prestasi yang dimaksudkan adalah capaian kerja manajemen suatu perusahaan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal.

Sundjaja dan Inge Barlian (2002:68) mendefinisikan "laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan/aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data- data/aktivitas tersebut".

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:1) menjelaskan, "Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan".

Terdapat dua metode analisis yang digunakan, yaitu analisis horizontal dan vertikal.

1. Analisis Horisontal/Analisis Dinamis

Analisis ini sering juga disebut dengan analisis trend. Teknik analisa horizontal berguna untuk mengetahui trend pertumbuhan dari masing-masing perkiraan dari waktu ke waktu, sehingga akan dapat diprediksi arah pertumbuhan dari entitas tersebut. Tujuan dari analisis horizontal adalah untuk mengetahui perubahan dan perkembangan masing-masing pos. Perhatian pada kewajaran perubahan dan perkembangan masing-masing.

Analisis rasio keuangan horizontal juga dapat dikatakan analisa yang membandingkan suatu pos dalam laporan keuangan dengan pos yang sama tetapi pada

periode yang berbeda.

a. Analisis Perbandingan

Adapun formula yang digunakan untuk analisis horizontal yaitu:

Perubahan rupiah = Angka periode tahun berjalan – angka periode tahun dasar

Perubahan persentase = perubahan rupiah dibagi angka periode dasar x 100%.

Tabel 35 :

Ilustrasi Analisis Perbandingan Neraca

Sumber : data diolah (Neraca Tingkat Satuan Kerja PPI Curug)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2023	2022	Jumlah	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	880,067,129	2,045,515,128	(1,165,447,999)	(56.98)
Kas pada Badan Layanan Umum	C.3	10,844,429,326	8,542,781,212	2,301,648,114	26.94
Piutang Bukan Pajak	C.4	430,659,300	-	430,659,300	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.5	(430,659,300)	-	(430,659,300)	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)					
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.6	8,113,000,513	9,487,278,971	(1,374,278,458)	(14.49)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.7	(2,736,265,866)	(2,804,736,018)	68,470,152	(2.44)
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)					
Persediaan	C.8	5,376,734,647	6,682,542,953	(1,305,808,306)	(19.54)
		71,949,351,793	71,408,081,589	541,270,204	0.76
JUMLAH ASET LANCAR		89,050,582,895	88,678,920,882	371,662,013	0.42
ASET TETAP					
Tanah	C.9	2,702,017,500,000	2,702,017,500,000	-	-
Peralatan dan Mesin	C.10	2,327,438,153,615	2,296,700,740,064	30,738,413,551	1.34
Gedung dan Bangunan	C.11	398,019,126,750	398,019,126,750	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.12	23,705,500,855	27,684,794,712	(3,979,293,857)	(14.37)
Aset Tetap Lainnya	C.13	29,975,048,140	31,127,088,574	(1,152,040,434)	(3.70)
Akumulasi Penyusutan	C.14	(2,020,291,652,251)	(1,946,367,053,741)	(73,924,598,510)	3.80
JUMLAH ASET TETAP		3,460,864,677,109	3,509,182,196,359	(48,317,519,250)	(1.38)
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	C.15	35,438,237,692	35,438,237,692	-	-
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	C.16	907,096,681	-	907,096,681	-
Aset Lain-lain	C.17	6,002,177,000	6,002,177,000	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.18	(23,144,495,850)	(23,144,049,450)	(446,400)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA		19,203,015,523	18,296,365,242	906,650,281	4.96
JUMLAH ASET		3,569,118,275,527	3,616,157,482,483	(47,039,206,956)	(1.30)

Dari tabel di atas untuk kolom 1 dan 2 data di peroleh dari Neraca PPI Curug tahun 2023 dan 2022, kolom 3 menunjukkan perubahan yang terjadi dalam absolutnya (jumlah dalam rupiah), sedangkan kolom 4 menunjukkan penambahan atau pengurangan yang dinyatakan dalam persentase. Persentase ini dihitung dengan membagi jumlah kenaikan/penurunan dari setiap pos dengan jumlah yang terdapat dalam sebelumnya atau tahun yang dijadikan pembanding (tahun dasar). Kolom 5 ratio dihitung dengan membagi jumlah rupiah tiap pos dari tahun yang diperbandingkan dengan tahun dasar. Kolom 6 dan 7 atau persentase dari total dihitung dari masing-masing pos asset dengan total asset.

Tabel 36 :

Ilustrasi Analisis Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	% thd Angg	REALISASI 2022
PENDAPATAN	B.1					
Pendapatan Negara dan Hibah						
Penerimaan Perpajakan						
Penerimaan Negara Bukan Pajak		116,680,360,000	58,189,802,683	(58,490,557,317)	49.87	57,280,766,475
Penerimaan Hibah						
Jumlah Pendapatan dan Hibah		116,680,360,000	58,189,802,683	(58,490,557,317)	49.87	57,280,766,475
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai		17,518,458,000	17,405,997,733	(112,460,267)	99.36	17,024,897,778
Belanja Barang		142,557,811,000	142,456,418,290	(101,392,710)	99.93	108,532,672,570
Belanja Modal		31,743,148,000	31,733,542,737	(9,605,263)	99.97	52,460,234,498
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang					0.00	
Belanja Subsidi					0.00	
Belanja Hibah					0.00	
Belanja Bantuan Sosial					0.00	
Belanja Lain-lain					0.00	
Jumlah Belanja	B.3	191,819,417,000	191,595,958,760	(223,458,240)	99.88	178,017,804,846
SURPLUS / (DEFISIT)						
			(133,406,156,077)	(133,406,156,077)		(120,737,038,371)
PEMBIAYAAN						
Penerimaan Pembiayaan						
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan						
Pengeluaran Pembiayaan						
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri						
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan						
SILPA / (SILKPA)						
			(133,406,156,077)	(133,406,156,077)		(120,737,038,371)

Sumber : Data Diolah (LRA PPI Curug)

Tabel di atas menunjukkan kolom 1 dan 2 dari laoran Neraca perbandingan PPI Curug tahun 2023 dan 2022, kolom 3 menunjukkan perubahan yang terjadi dalam absolutnya (jumlah rupiah), sedangkan kolom 4 menunjukkan penambahan persentase atau pengurangan yang dinyatakan dengan persentase. Persentase ini dihitung dengan membagi jumlah kenaikan/penurunan dari setiap pos dengan jumlah yang terdapat dalam tahun sebelumnya. atau tahun yang dijadikan pembandingan. Kolom 5 dihitung dengan membagi jumlah rupiah tiap pos dari tahun yang diperbandingkan dengan tahun dasar. Kolom 6 dan 7 dihitung dari membagi masing-masing pos pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan totalnya.

b. Trend atau tendensi

Salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan adalah dengan menggunakan metode trend analisis.

Dimana menurut S. Munawir (2007:17) menjelaskan "Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi dari pada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun".

Dengan menggunakan teknik analisis tersebut akan diketahui perubahan mana yang cukup penting untuk dianalisa lebih lanjut. Teknik analisa tersebut hanya akan praktis bila digunakan untuk menganalisa dua atau tiga (periode) laporan keuangan, karena bila laporan keuangan yang diperbandingkan lebih dari tiga tahun akan ditemui kesulitan.

Cara yang terbaik untuk menganalisa laporan keuangan yang lebih dari tiga tahun tersebut adalah dengan menggunakan angka index, dan semua data laporan keuangan yang dianalisa dihubungkan dengan angka index tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Dengan menganalisa laporan keuangan untuk jangka waktu lebih dari tiga tahun akan diketahui kecenderungan atau arah atau trend dari posisi keuangan ataupun hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, apakah menunjukkan arah yang tetap, meningkat atau bahkan menurun.

Teknik analisis ini biasanya digunakan untuk menganalisis laporan keuangan yang meliputi minimal 3 periode atau lebih. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui tentang perjalanan waktu yang sudah lalu dan memprediksi situasi masa itu ke masa yang akan datang. Selanjutnya menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2005:73) mendefinisikan, "Suatu analisis yang dilakukan dengan menggunakan data-data masa lalu perusahaan untuk tujuan komparasi, dengan melihat kecenderungan (trend) angka-angka ratio tertentu, dapat diperoleh gambaran apakah ratio-ratio tersebut cenderung naik, turun atau relatif konstan. Dari gambaran ini akan dapat dideteksi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan dan dapat diobservasi baik buruknya pengelolaan perusahaan".

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis trend atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Analisis ini dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat apakah perusahaan mengalami perubahan yaitu naik, turun, ataupun menetap, serta seberapa besar perubahan tersebut yang dihitung dalam persentase.

Berikut ini data yang diperoleh dari laporan operasional tahun 2018 sampai dengan 2022:

Tabel 37 :

Laporan Operasional 31 Desember 2019 – 2023

POS POS LO	2023	2022	2021	2020	2019
Pendapatan Operasional	193,126,483,082	178,005,689,565	127,521,919,876	197,859,838,498	277,542,330,336
Beban Operasional	232,283,910,538	223,901,618,701	245,665,337,743	315,797,317,051	449,325,886,320
Surplus (Defisit)	(39,157,427,456)	(45,895,929,136)	(118,143,417,867)	(117,937,478,553)	(171,783,555,984)

Sumber : data diolah (LO PPI Curug)

Tahun 2019 dipilih sebagai tahun dasar karena berbagai pertimbangan maka angka pada tahun tersebut diberikan nilai 100. Angka pada tahun berikutnya dibandingkan dengan tahun dasar sehingga diperoleh trend selama empat tahun untuk setiap pos.

Trend dari angka tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 38 :

Trend Laporan Operasional 31 Desember Tahun 2019 – 2023

POS POS LO	2023	2022	2021	2020	2019
Pendapatan Operasional	70%	64%	46%	71%	100%
Beban Operasional	52%	50%	55%	70%	100%

Sumber : data diolah (LO PPI Curug)

Dari analisis tersebut diketahui bahwa trend kenaikan pendapatan dan belanja menurun hingga tahun 2021 kemudian meningkat.

2. Analisis Vertikal/ Analisis Statis

Analisis vertikal (statis) analisis laporan keuangan yang terbatas hanya pada Satu periode akuntansi saja, misalnya berupa analisis rasio, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan yang lainnya sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat tersebut. Analisis ini juga disebut analisis statis karena kesimpulan yang diperoleh hanya untuk periode tersebut tanpa mengetahui perkembangannya. Anggaran belanja PPI Curug pada tahun 2023 sebesar Rp191.723.658.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp191.595.958.760, yang berarti persentase daya serapnya sebesar 99,88%, sehingga dapat disimpulkan kemampuan satker mengelola keuangan pada tahun 2023 sangat baik.

II. ANALISIS RASIO KEUANGAN

Rasio merupakan alat ukur yang digunakan satker untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya.

Analisis rasio keuangan adalah analisis yang menghubungkan perkiraan laporan keuangan satu dengan lainnya, yang memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap keadaan suatu perusahaan tertentu. Analisis rasio keuangan memungkinkan manajer keuangan meramalkan reaksi para calon investor dan kreditur serta dapat ditempuh untuk memperoleh tambahan dana. (Zaki Baridwan, 1997 :17)

Suatu rasio tidak memiliki arti dalam dirinya sendiri, melainkan harus diperbandingkan dengan rasio yang lain agar rasio tersebut menjadi lebih sempurna dan untuk melakukan analisis ini dapat dengan cara membandingkan prestasi suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga diketahui adanya kecenderungan selama periode tertentu, selain itu dapat juga dilakukan dengan membandingkan dengan perusahaan sejenis dalam industri

tersebut sehingga dapat diketahui bagaimana keuangan dalam industri.

Dalam mengadakan interpretasi dan analisis laporan keuangan suatu perusahaan, seorang penganalisis memerlukan adanya ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam analisis keuangan adalah rasio. Pengertian rasio sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam "arithmetic terms" yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data keuangan.

Secara garis besar ada empat jenis rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage finansial dan rasio keuntungan.

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas satker dan asset lancar lainnya dengan utang lancar. Rasio digunakan untuk mengukur kemampuan satker dalam memenuhi kewajiban – kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi (kewajiban jangka pendek).

a. *Current Rasio* (Rasio Lancar)

Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi. Rasio lancar menggambarkan kemampuan pemerintah pusat (satker) untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nilai standar rasio lancar dianggap aman adalah 2 : 1 dan nilai minimalnya adalah 1 : 1, jika nilai rasio lancar kurang dari 1 : 1 maka keuangan tidak lancar.

$$\text{Current Ratio (CR)} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Tabel 39 :

Analisis Rasio Lancar 31 Desember 2023 dan 2022

TAHUN	ASET LANCAR	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	RASIO LANCAR
2023	89,050,582,895	4,192,843,920	2124%
2022	88,678,920,882	5,275,842,647	1681%

Sumber : data diolah (Neraca PPI Curug)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan keuangan PPI Curug cukup lancar karena berada di atas 100%

b. *Quick Rasio* (Rasio Cepat)

Rasio Cepat merupakan perbandingan antara asset lancar setelah dikurangi persediaan terhadap kewajiban jangka pendek suatu satker. Alat ini lebih akurat untuk mengukur likuiditas dimana persediaan tidak diikutsertakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek karena sifatnya yang kurang likuid. Untuk prinsip kehati – hatian, maka besarnya rasio cepat minimal 100%, artinya kewajiban jangka pendek Rp1 dijamin oleh asset lancar selain persediaan Rp1.

$$\text{QUICK RATIO} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Tabel 40 :

Analisis Rasio Cepat 31 Desember 2023 dan 2022

TAHUN	ASET LANCAR	PERSEDIAAN	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	RASIO LANCAR
2023	89,050,582,895	71,949,351,793	4,192,843,920	408%
2022	88,678,920,882	71,408,081,589	5,275,842,647	327%

Sumber : data diolah (Neraca PPI Curug)

Dari perhitungan rasio di atas dapat disimpulkan kemampuan PPI Curug dalam mengelola kewajiban jangka pendeknya dianggap baik karena berada pada posisi aman lebih dari 100%

2. Ratio Utang (*Leverage Ratio*)

Yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak satker menggunakan dana dari aktivitas pembiayaan (pembiayaan).

a. Rasio Total Utang terhadap Modal Sendiri (*Debt To Equity Ratio*)

DTER merupakan perbandingan antaraj total hutang dengan ekuitas sendiri (Modal), data ini dapat diperoleh dari neraca tahunan satker yang akan dianalisis.

$$\text{Debt To Equity Ratio (DTER)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 41 :

Analisis DTER tahun 31 Desember 2023 dan 2022

TAHUN	UTANG	EKUITAS	DTER
2023	4,192,843,920	4,925,431,607	85.13%
2022	5,275,842,647	3,610,881,639,836	0.15%

Sumber : data diolah (Neraca PPI Curug)

Dari data DTER diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PPI Curug sangatlah baik, dikarenakan jumlah ekuitas jauh lebih besar dibanding dengan total hutangnya.

b. Ratio Utang (Debt Rasio)

Merupakan perbandingan antara total hutang terhadap total aset. Cara perhitungan ratio utang yaitu :

$$\text{Ratio Utang} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 42 :

Analisis Rasio Utang 31 Desember 2023 dan 2022

TAHUN	UTANG	ASET	DTER
2023	4,192,843,920	3,569,118,275,527	0.12%
2022	5,275,842,647	3,616,157,482,483	0.15%

Sumber : data diolah (Neraca PPI Curug)

Dari perhitungan rasio di atas dapat disimpulkan pengelolaan keuangan PPI Curug sangat baik, karena rasio utangnya < 50 %

3. Rasio POBO

Yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan satker untuk membiayai kebutuhan operasionalnya melalui pendapatan layanannya secara mandiri. Realisasi PNBPN merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan dari APBN.

Biaya Operasional merupakan seluruh biaya yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat meliputi belanja pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa serta biaya lainnya Satker BLU, baik yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni APBN maupun pendapatan operasional Satker BLU.

$$\text{POBO} = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Belanja Operasoional}} \times 100\%$$

Tabel 43 :

Rasio POBO 31 Desember 2023 dan 2022

TAHUN	PENDAPATAN OPERASIONAL	BELANJA OPERASIONAL	POBO
2023	58,189,802,683	159,862,416,023	36.40%
2022	56,625,754,607	125,557,570,348	45.10%

Sumber : Data Diolah (LRA PPI Curug)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan satker PPI Curug dalam menghasilkan pendapatan kurang baik, karena belum mampu menutupi biaya operasional dengan rata-rata lebih dari 60%,

4. Rasio Kemandirian

Tabel 44 :

Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75%-100%

Rasio Kemandirian Politeknik Penerbangan Indonesia Curug dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Pagu DIPA}} \times 100 \%$$

Tabel 45 :

Rasio Kemandirian 31 Desember 2022 dan 2021

TAHUN	PENDAPATAN	PAGU DIPA	Rasio Kemandirian
2023	58,189,802,683	191,723,658,000	30.35%
2022	57,280,766,475	180,229,729,000	31.78%

Sumber : Data Diolah (LRA PPI Curug)

Hasil Perhitungan rasio Kemandirian Keuangan tahun 2023-2021 PPI Curug dapat dilihat pada perhitungan rasio berikut ini :

Dari perhitungan rasio di atas dapat disimpulkan bahwa proyeksi tingkat kemandirian PPI Curug per 30 September tahun 2023 dan 2022 berada pada posisi 30,35% dan 31,78% yang berarti tingkat kemandirian PPI Curug dalam mengelola keuangan kurang baik karena berada pada posisi cukup rendah.

5. Rasio Efektifitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan satker (PPI Curug) dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Satker dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 100 persen, tetapi semakin tinggi rasio efektifitas berarti kemampuan satker semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio ini perlu didampingi dengan rasio efisiensi. Pemerintah telah menyusun pedoman penilaian tingkat

efektivitas keuangan, melalui Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996 berikut ini:

Tabel 46:

Kriteria Efektivitas Keuangan

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	> 100
Efektif	> 90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≥60

Sumber : Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Perhitungan Rasio Efektivitas PPI Curug 31 Desember 2023 dan 2022, yaitu :

Tabel 45 :

Rasio Efektifitas

TAHUN	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Rasio Efektifitas
2023	116,680,360,000	58,189,802,683	49.87%
2022	56,000,000,000	57,280,766,475	102.29%

Sumber : Data Diolah (LRA PPI Curug)

Dari perhitungan rasio efektivitas PPI Curug di atas dapat disimpulkan tingkat efektivitas PPI Curug untuk pengelolaan keuangan pada 31 Desember 2023 dan 2022 tidak efektif.

6. Rasio Serapan Anggaran

Rasio Serapan Anggaran belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja dengan anggaran belanja. Formula yang digunakan untuk menghitung rasio serapan anggaran belanja itu :

$$\text{Rasio Serapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Belanja Negara}}{\text{Anggaran Belanja Negara}} \times 100\%$$

Tabel 46:

Rasio Serapan Anggaran PPI Curug

TAHUN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	RASIO SERAPAN ANGGARAN
2023	191,723,658,000	191,595,958,760	99.93%
2022	180,229,729,000	178,017,804,846	98.77%

Sumber : Data Diolah (LRA PPI Curug)

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Pokok disusun sebagai salah satu persyaratan Administratif untuk mengelola keuangan dengan PPK-BLU, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuan Dokumen kepada Menteri Keuangan.

Dengan ditetapkannya Politeknik Penerbangan Indonesia Curug menjadi Satuan Kerja yang menerapkan PPK-BLU maka sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan di bawah Kementerian Perhubungan mampu mewujudkan SDM yang handal dan berdaya saing tinggi.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - BLU
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022

ESELON I : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN 12

SATUAN KERJA : POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG 288127

Waktu Olap: 2024-05-07 15:43:54.0 / B@383ba25

Kode Lap : LRA_BLU_STK

Tanggal : 07/05/24 4:11 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_blu_lra_face_satker

NO	URAIAN	2023			2022		
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN %	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN %
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0		0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	116,680,360,000	58,189,802,683	(58,490,557,317)	50	56,000,000,000	1,280,766,475
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	116,680,360,000	58,189,802,683	(58,490,557,317)	50	56,000,000,000	1,280,766,475
B	BELANJA				0		0
	BELANJA PEGAWAI	17,422,698,000	17,405,997,733	(16,701,287)	100	17,746,541,000	(721,643,222)
	BELANJA BARANG	142,557,811,000	142,456,418,290	(101,392,710)	100	109,995,974,000	(1,463,301,430)
	BELANJA MODAL	31,743,148,000	31,733,542,737	(9,605,263)	100	52,487,214,000	(26,979,502)
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - BLU
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022

ESELON I : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN 12

SATUAN KERJA : POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG 288127

Waktu Cetak: 2024-05-07 15:43:54.0 / B@6c6c4d83

Kode Lap : LRA.BLU.STK

Tanggal : 07/05/24 4:11 PM

Halaman : 2

Prig ID : lap_blu_ira_face_satker

NO	URAIAN	2023			2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN %	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN %	
1	2	3	4	5	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	191,723,658,000	191,595,958,760	(127,699,240)	180,229,729,000	178,017,804,846	(2,211,924,154)	199
C	PEMBIAYAAN							0

Tangerang, 08 Mei 2024
 Direktur,
 Agustono, S.Sos., M.MTr.
 NIP. 196908311991031001

NERACA - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KDUAPPAW : 022122900KP

BA(022) ES1(12) BANTEN

KODE SATKER : 288127

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Tgl Data 07/05/24 3:40 PM

Tgl. Cetak 07/05/2024 4:11 PM

lap_blu_neraca_satker

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	880,067,129	2,045,515,128	(1,165,447,999)	(56.98)
Kas pada Badan Layanan Umum	10,844,429,326	8,542,781,212	2,301,648,114	26.94
Piutang Bukan Pajak	430,659,300	0	430,659,300	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(430,659,300)	0	(430,659,300)	0.00
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	8,113,000,513	9,487,278,971	(1,374.278,458)	(14.49)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(2,736,265,866)	(2,804,736,018)	68,470,152	(2.44)
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	5,376,734,647	6,682,542,953	(1,305,808,306)	(19.54)
Persediaan	71,949,351,793	71,408,081,589	541,270,204	0.76
JUMLAH ASET LANCAR	89,050,582,895	88,678,920,882	371,662,013	0.42
ASET TETAP				
Tanah	2,702,017,500,000	2,702,017,500,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,327,439,153,615	2,296,700,740,064	30,738,413,551	1.34
Gedung dan Bangunan	398,019,126,750	398,019,126,750	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	23,705,500,855	27,684,794,712	(3,979,293,857)	(14.37)
Aset Tetap Lainnya	29,975,048,140	31,127,088,574	(1,152,040,434)	(3.70)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,020,291,652,251)	(1,946,367,053,741)	(73,924,598,510)	3.80
JUMLAH ASET TETAP	3,460,864,677,109	3,509,182,196,359	(48,317,519,250)	(1.38)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	35,438,237,692	35,438,237,692	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	907,096,681	0	907,096,681	0.00
Aset Lain-lain	6,002,177,000	6,002,177,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(23,144,495,850)	(23,144,049,450)	(446,400)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	19,203,015,523	18,296,365,242	906,650,281	4.96
JUMLAH ASET	3,569,118,275,527	3,616,157,482,483	(47,039,206,956)	(1.30)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	4,141,803,420	4,774,983,647	(633,180,227)	(13.26)
Pendapatan Diterima Dimuka	51,040,500	500,859,000	(449,818,500)	(89.81)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4,192,843,920	5,275,842,647	(1,082,998,727)	(20.53)
JUMLAH KEWAJIBAN	4,192,843,920	5,275,842,647	(1,082,998,727)	(20.53)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,564,925,431,607	3,610,881,639,836	(45,956,208,229)	(1.27)
JUMLAH EKUITAS	3,564,925,431,607	3,610,881,639,836	(45,956,208,229)	(1.27)

NERACA - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KDUAPPAW : 022122900KP

BA(022) ES1(12) BANTEN

KODE SATKER : 288127

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Tgl Data 07/05/24 3:40 PM

Tgl. Cetak 07/05/2024 4:11 PM

lap_blu_neraca_satker

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH EKUITAS	3,564,925,431,607	3,610,881,639,836	(45,956,208,229)	(1.27)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,569,118,275,527	3,616,157,482,483	(47,039,206,956)	(1.30)

Tangerang, 08 Mei 2024

Direktur,



Agustono, S.Sos., M.MTr.
NIP. 196908311991031001

LAPORAN OPERASIONAL - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 288127
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BANTEN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Kode Lap : LO.SATBLU
 Tanggal : 07/05/24 4:11 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_blu_lo_satker
 Tgl Data : 07/05/24 3:49 PM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
Pendapatan Alokasi APBN	135,934,606,562	121,805,885,118	14,128,721,444	11.599
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	28,134,689,150	36,376,663,003	(8,241,973,853)	(22.657)
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	5,853,554,000	9,232,540,750	(3,378,986,750)	(36.599)
Pendapatan Hibah BLU	0	0	0	
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	19,267,514,225	8,258,084,109	11,009,430,116	133.317
Pendapatan BLU Lainnya	3,936,119,145	2,332,516,585	1,603,602,560	68.75
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	193,126,483,082	178,005,689,565	15,120,793,517	8.495
JUMLAH PENDAPATAN	193,126,483,082	178,005,689,565	15,120,793,517	8.495
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	36,763,594,296	32,251,943,903	4,511,650,393	13.989
Beban Persediaan	9,068,724,060	7,437,766,755	1,630,957,305	21.928
Beban Barang dan Jasa	83,930,555,399	70,875,510,861	13,055,044,538	18.42
Beban Pemeliharaan	21,872,105,869	11,196,214,681	10,675,891,188	95.353
Beban Perjalanan Dinas	6,866,770,347	6,473,678,325	393,092,022	6.072
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	72,891,929,963	95,377,573,422	(22,485,643,459)	(23.575)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1,016,713,686	288,930,754	727,782,932	251.888
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	232,410,393,620	223,901,618,701	8,508,774,919	3.8
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(39,283,910,538)	(45,895,929,136)	6,612,018,598	(14.407)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	112,266,880	(13,303,299,864)	13,415,566,744	(100.844)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	112,266,880	429,543,437	(317,276,557)	(73.864)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	13,732,843,301	(13,732,843,301)	(100)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(55,597,665)	(301,507,323)	245,909,658	(81.56)
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	171,248,045	355,033,024	(183,784,979)	(51.766)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	226,845,710	656,540,347	(429,694,637)	(65.448)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	56,669,215	(13,604,807,187)	13,661,476,402	(100.417)
SURPLUS/DEFISIT - LO	(39,227,241,323)	(59,500,736,323)	20,273,495,000	(34.073)

LAPORAN OPERASIONAL - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 288127
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BANTEN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Kode Lap : LO.SATBLU
Tanggal : 07/05/24 4:11 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lo_satker
Tgl Data : 07/05/24 3:49 PM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
--------	------	------	------------------------	-----



Pangerang, 08 Mei 2024
Direktur,

Agustono, S.Sos., M.MTr.
NIP. 196908311991031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - BLU
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**
WILAYAH/PROVINSI : 2900 **BANTEN**
JENIS SATUAN KERJA : K8
SATUAN KERJA : 288127 **POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG**

Tgl Data : 07/05/24 3:45 PM
Kode Lap : LPE.BLU.STK
Tanggal : 07/05/24 4:11 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	3,610,881,639,836	3,817,161,604,132	(206,279,964,296)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(39,227,241,323)	(59,500,736,323)	20,273,495,000	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(6,944,676,906)	4,577,756,800	(11,522,433,706)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(7,371,398,424)	3,223,081,058	(10,594,479,482)	-
LAIN-LAIN	426,721,518	1,354,675,742	(927,954,224)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	215,710,000	(151,356,984,773)	151,572,694,773	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(45,956,208,229)	(206,279,964,296)	160,323,756,067	-
EKUITAS AKHIR	3,564,925,431,607	3,610,881,639,836	(45,956,208,229)	-



Tangerang, 08 Mei 2024
Direktur,

Agustono, S.Sos., M.MTr.
NP. 196908311991031001

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 288127
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BA(022) ES1(12) BANTEN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 07/05/24 4:11 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 07/05/24 3:13 PM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
AKTIVITAS OPERASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS OPERASI	0	0	0	0
Pendapatan dari Alokasi APBN	135,934,606,562	121,805,885,118	14,128,721,444	11.6
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	28,884,999,850	38,936,129,403	(10,051,129,553)	(25.81)
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	5,853,554,000	9,232,540,750	(3,378,986,750)	(36.6)
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	19,233,019,663	6,491,330,000	12,741,689,663	196.29
Pendapatan dari Hibah	0	0	0	0
Pendapatan Usaha Lainnya	3,936,119,145	1,838,071,585	2,098,047,560	114.14
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	55,307,654	127,682,869	(72,375,215)	(56.68)
Pendapatan PNPB Umum	114,535,491	225,468,431	(110,932,940)	(49.2)
JUMLAH ARUS MASUK KAS OPERASI	194,012,142,365	178,657,108,156	15,355,034,209	8.59
ARUS KELUAR KAS OPERASI	0	0	0	0
Pembayaran Pegawai	(34,871,896,239)	(32,251,943,903)	(2,619,952,336)	8.12
Pembayaran Barang	(57,176,039,248)	(50,468,886,627)	(6,707,152,621)	13.29
Pembayaran Jasa	(14,849,568,518)	(10,759,428,099)	(4,090,140,419)	38.01
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(4,782,369,886)	(6,225,907,600)	1,443,537,714	(23.19)
Pembayaran Pemeliharaan	(27,365,107,333)	(8,547,981,437)	(18,817,125,896)	220.14
Pembayaran Perjalanan Dinas	(7,045,928,420)	(6,473,678,325)	(572,250,095)	8.84
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(13,771,506,379)	(10,829,744,357)	(2,941,762,022)	27.16
Pembayaran Bantuan Sosial	0	0	0	0
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(226,802,371)	(655,011,868)	428,209,497	(65.37)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS OPERASI	(160,089,218,394)	(126,212,582,216)	(33,876,636,178)	26.84
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	33,922,923,971	52,444,525,940	(18,521,601,969)	(35.32)
AKTIVITAS INVESTASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	0	0	0
Penjualan atas Tanah	0	0	0	0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	112,266,880	7,766,660	104,500,220	1,345.5
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	277,777,777	(277,777,777)	(100)
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 288127
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BA(022) ES1(12) BANTEN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 07/05/24 4:11 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 07/05/24 3:13 PM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0	143,999,000	(143,999,000)	(100)
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS INVESTASI	112,266,880	429,543,437	(317,276,557)	(73.86)
ARUS KELUAR KAS INVESTASI	0	0	0	0
Perolehan atas Tanah	0	0	0	0
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(31,733,542,737)	(12,917,361,868)	(18,816,180,869)	145.67
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	0	(38,581,087,630)	38,581,087,630	(100)
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	(961,785,000)	961,785,000	(100)
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS INVESTASI	(31,733,542,737)	(52,460,234,498)	20,726,691,761	(39.51)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(31,621,275,857)	(52,030,691,061)	20,409,415,204	(39.23)
AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penyetoran ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
AKTIVITAS TRANSITORIS	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	6,026,654,232	6,337,733,635	(311,079,403)	(4.91)
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	6,026,654,232	6,337,733,635	(311,079,403)	(4.91)
ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(7,192,102,231)	(5,009,337,007)	(2,182,765,224)	43.57
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	(7,192,102,231)	(5,009,337,007)	(2,182,765,224)	43.57

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
 (dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 288127
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BA(022) ES1(12) BANTEN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Kode Lap : LAK.SAT
 Tanggal : 07/05/24 4:11 PM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lak_satker
 Tgl Data : 07/05/24 3:13 PM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	(1,165,447,999)	1,328,396,628	(2,493,844,627)	(187.73)
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	1,136,200,115	1,742,231,507	(606,031,392)	(34.78)
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0
Saldo Awal Kas	10,588,296,340	10,935,966,969	(347,670,629)	(3.18)
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0
SALDO AKHIR KAS	11,724,496,455	12,678,198,476	(953,702,021)	(7.52)
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU	10,844,429,326	8,542,781,212	2,301,648,114	26.94
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	880,067,129	2,045,515,128	(1,165,447,999)	(56.98)
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0
Jumlah Rincian Saldo	11,724,496,455	10,588,296,340	1,136,200,115	10.73
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0



Pangerang, 08 Mei 2024
 Direktur,

Agustono, S.Sos., M.MTr.
 NIP. 196908311991031001

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**
WILAYAH/PROVINSI : 2900 **BANTEN**
JENIS SATUAN KERJA : K8
SATUAN KERJA : 288127 **POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG**

Tgl Data : 07/05/24 3:45 PM
Kode Lap : LPSAL.SATKER
Tanggal : 07/05/24 4:12 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpsal_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	8,542,781,212	8,128,946,333	413,834,879	-
PENGUNAAN SAL	0	0	0	-
Sub Total	8,542,781,212	8,128,946,333	413,834,879	-
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(133,406,156,077)	(120,737,038,371)	(12,669,117,706)	-
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0	0	0	-
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	135,707,804,191	121,150,873,250	14,556,930,941	-
Pendapatan Alokasi APBN	135,934,606,562	121,805,885,118	14,128,721,444	-
Penyetoran PNBK ke Kas Negara	(226,802,371)	(655,011,868)	428,209,497	-
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	0	0	0	-
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	-
Transaksi antar BLU	0	0	0	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	2,301,648,114	413,834,879	1,887,813,235	-
Sub Total	10,844,429,326	8,542,781,212	2,301,648,114	-
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0	0	-
Lain-lain	0	0	0	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	10,844,429,326	8,542,781,212	2,301,648,114	-



Tangerang, 08 Mei 2024
Direktur,

Agustono, S.Sos., M.MTr.
NIP. 196908311991031001

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023**

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Tgl.Data : 08/05/24 6:00 AM
Tgl.Cetak : 08/05/24 8:29 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	5,046,863,575
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	625,000
117114	Suku Cadang	64,037,984,740
117131	Bahan Baku	2,431,220,575
117199	Persediaan Lainnya	432,657,903
131111	Tanah	2,702,017,500,000
132111	Peralatan dan Mesin	2,327,439,153,615
133111	Gedung dan Bangunan	398,019,126,750
134111	Jalan dan Jembatan	3,970,182,000
134112	Irigasi	1,636,800,000
134113	Jaringan	18,098,518,855
135121	Aset Tetap Lainnya	29,975,048,140
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,952,015,054,070)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(56,911,455,770)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(3,572,914,500)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(377,088,260)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(7,315,529,651)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(99,610,000)
162121	Hak Cipta	31,247,000
162151	Software	17,133,985,300
162161	Lisensi	3,200,000
162171	Hasil Kajian/Penelitian	5,200,215,047
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	13,069,590,345
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	6,002,177,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(6,002,177,000)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(5,133,550)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(17,133,985,300)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(3,200,000)
J U M L A H		3,551,109,947,744



Tangerang, 8 Mei 2024
Bertanggung Jawab UAKPB
Direktur

Agustono, S.Sos., M.MTr.
NIP. 196908311991031001

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 2023
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 288127

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BANTEN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Tgl Data 07/05/24 3:36 PM

Tgl. Cetak 07/05/2024 4:09 PM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	880,067,129	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	10,844,429,326	0
0.0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	0	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	430,659,300	0
0.0	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	3,421,715,300	0
0.0	115719	Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0	0
0.0	115791	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	4,691,285,213	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	430,659,300
0.0	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	1,540,584,195
0.0	116619	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0	0
0.0	116691	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU	0	1,195,681,671
0.0	117111	Barang Konsumsi	5,046,863,575	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	625,000	0
0.0	117114	Suku Cadang	64,037,984,740	0
0.0	117131	Bahan Baku	2,431,220,575	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	432,657,903	0
0.0	117911	Persediaan yang belum diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	2,702,017,500,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,327,439,153,615	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	398,019,126,750	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	3,970,182,000	0
0.0	134112	Irigasi	1,636,800,000	0
0.0	134113	Jaringan	18,098,518,855	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	29,975,048,140	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,952,015,054,070
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	56,911,455,770
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	3,572,914,500
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	377,088,260
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	7,315,529,651
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	99,610,000
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162121	Hak Cipta	31,247,000	0
0.0	162151	Software	17,133,985,300	0
0.0	162161	Lisensi	3,200,000	0

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 288127

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BANTEN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Tgl Data 07/05/24 3:36 PM

Tgl. Cetak 07/05/2024 4:09 PM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	5,200,215,047	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	13,069,590,345	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	907,096,681	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	6,002,177,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	6,002,177,000
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	5,133,550
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	17,133,985,300
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	3,200,000
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	1,891,698,057
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	431,226,553
0.0	212113	Beban modal yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0	31,715,000
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	907,096,681
0.0	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	0	880,067,129
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	51,040,500
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	215,710,000
0.0	391111	Ekuitas	0	3,610,881,639,836
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	7,371,398,424	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	426,721,518
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	28,120,097,501
3.0	424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	14,591,649
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	19,267,514,225
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	135,957,407,077
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	22,800,515	0
3.0	424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	1,230,201,000
3.0	424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	4,623,353,000
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	434,574,284
3.0	424915	Penerimaan Kembali Beban Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	55,307,654
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	141,857,041
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	861,472,800
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	385,295,020
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	13,000,000
3.0	424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	2,099,920,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	112,266,880
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	72,752,252

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 288127

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BANTEN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Tgl Data 07/05/24 3:36 PM

Tgl. Cetak 07/05/2024 4:09 PM

lap_blu_neraca_percobaan_aktual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	41,783,239
3.0	491111	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	0	1,404,900
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	10,957,870,240	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	728,655
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	170,499	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	3,134
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	825,497,886	0
3.1	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	14,280
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	204,830,172	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	82,435,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	8,100,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	927,311,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	51,054,308	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	594,640,620	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,547,967,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	332,825,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	7,845,000
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	1,458,337,600	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	286,064,500	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	3,205	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,620,480	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	4,990,172	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	28,535,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	16,533,120	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	61,530,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	27,473,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	8,339,423,000	0
3.1	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	6,109,446
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	190,150,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	182,127,693	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	441,610,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	7,813,223,016	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	7,773,150,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	13,513,492,773	0
3.0	521832	Beban Barang Persediaan Lainnya	0	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	5,475,748,162	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,739,600,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	196,894,500	0

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 288127

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BANTEN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Tgl Data 07/05/24 3:36 PM

Tgl. Cetak 07/05/2024 4:09 PM

lap_blu_neraca_percobaan_aktual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522141	Beban Sewa	1,748,328,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	358,012,500	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	386,285,356	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,901,738,289	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,506,743,673	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,717,792,755	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5,571,234,526	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	490,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	507,486,395	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53,136,500	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	328,540,072	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	19,357,596,563	0
3.0	525112	Beban Barang	17,438,903,466	0
3.0	525113	Beban Jasa	4,564,320,000	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	49,785,000	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	405,882,854	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	13,771,506,379	0
3.0	525152	Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	62,243,911,516	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9,389,196,420	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	188,827,150	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	58,144,360	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	928,598,917	0
3.0	592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	446,400	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	82,805,200	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	7,100,448,230	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6,768,000	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	5,689,278,152	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	1,934,915,970	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	33,359,860	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	430,659,300	0
3.0	594612	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	338,895,262	0
3.0	594619	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0	0
3.0	594641	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	247,159,124	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	3,890,000	0
3.0	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	43,339	0
3.0	596511	Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara	226,802,371	0

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 288127

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BANTEN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Tgl Data 07/05/24 3:36 PM

Tgl. Cetak 07/05/2024 4:09 PM

lap_blu_neraca_percobaan_akrua1_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
		JUMLAH	5,855,775,587,578	5,855,775,587,578

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 288127

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
BANTEN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 08/05/24 11:13 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_ira_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	116,680,360,000	28,870,408,201	0	28,870,408,201	24.74
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	14,591,649	0	14,591,649	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	116,680,360,000	28,884,999,850	0	28,884,999,850	24.76
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU					
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	19,233,019,663	0	19,233,019,663	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4243	0	19,233,019,663	0	19,233,019,663	
4244	Pendapatan Dari Alokasi APBN					
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah	0	1,230,201,000	0	1,230,201,000	0
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah	0	4,623,353,000	0	4,623,353,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4244	0	5,853,554,000	0	5,853,554,000	
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	434,574,284	0	434,574,284	0
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	55,307,654	0	55,307,654	0
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	141,857,041	0	141,857,041	0
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	861,472,800	0	861,472,800	0
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	385,295,020	0	385,295,020	0
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	13,000,000	0	13,000,000	0
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	2,099,920,000	0	2,099,920,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	0	3,991,426,799	0	3,991,426,799	
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
BANTEN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 08/05/24 11:13 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_ira_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	112,266,880	0	112,266,880	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	72,752,252	0	72,752,252	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	185,019,132	0	185,019,132	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	41,783,239	0	41,783,239	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	41,783,239	0	41,783,239	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	116,680,360,000	58,189,802,683	0	58,189,802,683	49.87
	JUMLAH PENDAPATAN	116,680,360,000	58,189,802,683	0	58,189,802,683	49.87

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 288127
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
BANTEN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 08/05/24 11:13 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 8/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	3	4	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				5	6	7=5-6		
		ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	12,685,335,000	10,957,872,000	10,957,870,240	728,655	10,957,141,585	100	730,415
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	199,000	172,000	170,499	3,134	167,365	99.13	4,635
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,225,577,000	825,499,000	825,497,886	14,280	825,483,606	100	15,394
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	254,122,000	204,831,000	204,830,172	0	204,830,172	100	828
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	131,980,000	82,435,000	82,435,000	8,100,000	74,335,000	100	8,100,000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	901,390,000	927,311,000	927,311,000	0	927,311,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	81,276,000	51,055,000	51,054,308	0	51,054,308	100	692
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	748,060,000	594,641,000	594,640,620	0	594,640,620	100	380
511126	Belanja Uang Makan PNS	1,880,652,000	1,547,967,000	1,547,967,000	0	1,547,967,000	100	0
511129	Belanja Tunjangan Umum PNS	467,760,000	332,825,000	332,825,000	7,845,000	324,980,000	100	7,845,000
511151	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	2,774,400,000	1,458,338,000	1,458,337,600	0	1,458,337,600	100	400
511153	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	21,150,751,000	16,982,946,000	16,982,939,325	16,691,069	16,966,248,256	100	16,697,744
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	286,065,000	286,064,500	0	286,064,500	100	500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	4,000	3,205	0	3,205	80.12	795
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	14,621,000	14,620,480	0	14,620,480	100	520
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	4,991,000	4,990,172	0	4,990,172	99.98	828
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	28,535,000	28,535,000	0	28,535,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	16,534,000	16,533,120	0	16,533,120	99.99	880
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	61,530,000	61,530,000	0	61,530,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	412,280,000	412,276,477	0	412,276,477	100	3,523
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	698,992,000	27,473,000	27,473,000	0	27,473,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	698,992,000	27,473,000	27,473,000	0	27,473,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	21,849,743,000	17,422,699,000	17,422,688,802	16,691,069	17,405,997,733	100	16,701,267
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5,371,150,000	8,339,423,000	8,339,423,000	6,109,446	8,333,313,554	100	6,109,446
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	142,080,000	190,670,000	190,150,000	0	190,150,000	99.73	520,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	997,572,000	615,298,000	615,295,000	0	615,295,000	100	3,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	382,000,000	441,750,000	441,610,000	0	441,610,000	99.97	140,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	6,892,802,000	9,587,141,000	9,586,478,000	6,109,446	9,580,368,554	99.99	6,772,446

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 288127
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
BANTEN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 08/05/24 11:13 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 8/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	5,854,022,000	7,814,477,000	7,813,223,016	0	7,813,223,016	99.98	1,253,984
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	11,420,210,000	7,898,850,000	7,873,650,000	0	7,873,650,000	99.68	25,200,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	16,073,109,000	13,515,413,000	13,512,131,212	0	13,512,131,212	99.98	3,281,788
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	33,347,341,000	29,228,740,000	29,199,004,228	0	29,199,004,228	99.9	29,735,772
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,430,735,000	3,513,315,000	3,513,097,000	0	3,513,097,000	99.99	218,000
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	790,378,000	665,378,000	665,377,086	0	665,377,086	100	914
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	5,221,113,000	4,178,693,000	4,178,474,086	0	4,178,474,086	99.99	218,914
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	5,400,000,000	5,475,750,000	5,475,748,162	0	5,475,748,162	100	1,838
522112	Belanja Langganan Telepon	60,000,000	0	0	0	0	0	0
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,800,000,000	1,739,600,000	1,739,600,000	0	1,739,600,000	100	0
522131	Belanja Jasa Konsultansi	228,800,000	197,000,000	196,894,500	0	196,894,500	99.95	105,500
522141	Belanja Sewa	239,450,000	1,748,328,000	1,748,328,000	0	1,748,328,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	618,900,000	358,012,500	358,012,500	0	358,012,500	99.89	387,500
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	386,305,000	386,285,356	0	386,285,356	99.99	19,644
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	68,750,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	8,415,900,000	9,905,383,000	9,904,868,518	0	9,904,868,518	99.99	514,482
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,065,146,000	5,901,749,000	5,901,738,289	0	5,901,738,289	100	10,711
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	2,507,497,000	2,506,743,673	0	2,506,743,673	99.97	753,327
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,225,324,000	7,719,181,000	7,717,792,755	0	7,717,792,755	99.98	1,388,245
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,800,000,000	1,822,509,000	1,822,350,211	0	1,822,350,211	99.99	158,789
523125	Belanja Barang Persediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	5,286,270,000	9,366,984,000	9,366,697,405	0	9,366,697,405	100	286,595
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	17,376,740,000	27,317,920,000	27,315,322,333	0	27,315,322,333	99.99	2,597,667
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,207,156,000	5,728,665,000	5,727,375,406	0	5,727,375,406	99.98	1,289,594
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	900,000	490,000	0	490,000	54.44	410,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,000,426,000	516,150,000	507,486,395	0	507,486,395	98.32	8,663,605
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	163,143,000	53,180,000	53,136,500	0	53,136,500	99.92	43,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	6,371,625,000	6,298,895,000	6,288,488,301	0	6,288,488,301	99.83	10,406,699
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	81,240,000	328,541,000	328,540,072	0	328,540,072	100	928

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 288127
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
BANTEN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 08/05/24 11:13 AM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 8/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	81,240,000	328,541,000	328,540,072	0	328,540,072	100	928
5251	Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	32,797,462,000	17,465,899,000	17,465,898,506	0	17,465,898,506	100	494
525112	Belanja Barang	34,511,894,000	18,409,690,000	18,396,666,466	0	18,396,666,466	99.93	13,023,534
525113	Belanja Jasa	2,342,350,000	4,952,302,000	4,944,700,000	0	4,944,700,000	99.85	7,602,000
525114	Belanja Pemeliharaan	943,903,000	49,785,000	49,785,000	0	49,785,000	100	0
525115	Belanja Perjalanan	375,412,000	439,698,000	428,900,047	0	428,900,047	97.54	10,797,953
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	43,516,983,000	13,791,228,000	13,771,506,379	0	13,771,506,379	99.86	19,721,621
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	2,192,366,000	603,896,000	603,895,800	0	603,895,800	100	200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	116,680,360,000	55,712,498,000	55,661,352,198	0	55,661,352,198	99.91	51,145,802
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	194,387,121,000	142,557,811,000	142,462,527,736	6,109,446	142,456,418,290	99.93	101,392,710
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,254,245,000	15,947,740,000	15,940,175,656	0	15,940,175,656	99.95	7,564,344
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	32,296,170,000	15,795,408,000	15,793,367,081	0	15,793,367,081	99.99	2,040,919
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	37,550,415,000	31,743,148,000	31,733,542,737	0	31,733,542,737	99.97	9,605,263
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	37,550,415,000	31,743,148,000	31,733,542,737	0	31,733,542,737	99.97	9,605,263
	JUMLAH BELANJA	253,787,279,000	191,723,658,000	191,618,759,275	22,800,515	191,595,958,760	99.95	127,699,240

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 288127
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
BA(022) ES1(12) BANTEN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/24 11:13 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid --rekon17
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA		BELANJA NETTO	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA			
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	382,000,000	441,750,000	441,610,000	0	441,610,000	99.97	140,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	382,000,000	441,750,000	441,610,000	0	441,610,000	99.97	140,000
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	68,750,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	68,750,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	450,750,000	441,750,000	441,610,000	0	441,610,000	99.97	140,000
	JUMLAH BELANJA	450,750,000	441,750,000	441,610,000	0	441,610,000	99.97	140,000

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1760000874030 IDR RPL 127 STPI CURUG U RPL 127 STPI CURUG U
 Period 01 Dec 2023 - 31 Dec 2023
 Currency IDR
 Branch KCP Tangerang Curug
 Opening Balance 0.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
01/12/2023 15:13:04	SPT 056 Transfer 17611	-		0.00 1,974,348,897.00	1,974,348,897.00
01/12/2023 15:21:05	CK 506918- Tarik Tunai 00506918 17611	-	1,974,348,897.00	0.00	0.00
08/12/2023 14:51:03	Transfer 17611	-		0.00 1,118,032,000.00	1,118,032,000.00
08/12/2023 15:04:04	CK 506919- Tarik Tunai 00506919 17611	-	1,118,032,000.00	0.00	0.00
11/12/2023 11:11:52	SPT 058 Transfer 17611	-		0.00 47,356,000.00	47,356,000.00
11/12/2023 11:13:17	CK 506920- Tarik Tunai 00506920 17611	-	47,356,000.00	0.00	0.00
13/12/2023 11:40:46	SPT 60 Transfer 17611	-		0.00 18,214,000.00	18,214,000.00
13/12/2023 11:42:22	CK 506921- Tarik Tunai 00506921 17611	-	18,214,000.00	0.00	0.00
14/12/2023 15:32:05	SPT 059 Transfer 17611	-		0.00 1,059,689,917.00	1,059,689,917.00
14/12/2023 15:33:50	CK 506922- Tarik Tunai 00506922 17611	-	1,059,689,917.00	0.00	0.00
15/12/2023 17:09:10	SPT 061 Transfer 17611	-		0.00 1,605,547,000.00	1,605,547,000.00
15/12/2023 17:10:28	CK 506923- Tarik Tunai 00506923 17611	-	1,605,547,000.00	0.00	0.00
15/12/2023 17:11:18	REMUN NOV 23 Transfer 17611	-		0.00 1,734,642,000.00	1,734,642,000.00
15/12/2023 17:12:20	CK 506924- Tarik Tunai 00506924 17611	-	1,734,642,000.00	0.00	0.00
22/12/2023 17:12:33	SPT 63 Transfer 17611	-		0.00 4,791,409,943.00	4,791,409,943.00
22/12/2023 17:18:45	CK 506925- Tarik Tunai 00506925 17611	-	4,791,409,943.00	0.00	0.00
28/12/2023 15:33:22	SPT 65 Transfer 17611	-		0.00 133,930,000.00	133,930,000.00
28/12/2023 15:34:59	CK 506951- Tarik Tunai 00506951 17611	-	133,930,000.00	0.00	0.00
28/12/2023 15:45:13	SPT 64 Transfer 17611	-		0.00 881,167,200.00	881,167,200.00
28/12/2023 16:00:46	CK 506952- Tarik Tunai 00506952 17611	-	881,167,200.00	0.00	0.00
29/12/2023 15:37:16	SPT 66 Transfer 17611	-		0.00 24,900,000.00	24,900,000.00
29/12/2023 15:39:24	CK 506953- Tarik Tunai 00506953 17611	-	24,900,000.00	0.00	0.00

No of Debit	11
Total Amount Debited	13,389,236,957.00
No of Credit	11
Total Amount Credited	13,389,236,957.00
Closing Balance	0.00

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1760000874055 IDR RPL 127 STPI CURUG U RPL 127 STPI CURUG U
 Period 01 Dec 2023 - 31 Dec 2023
 Currency IDR
 Branch KCP Tangerang Curug
 Opening Balance 9,445,501,004.08

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
01/12/2023 12:11:21	UBP66668877301FFFFFF887 7315112230003 PRMA CR Transf 1760000874055 5379412114563280 9503 /964833 /PRM-M- BCA99105	-		0.00 10,000,000.00	9,455,501,004.08
01/12/2023 15:13:04	CK 506936-SPT 056 Transfer 00506936 17611	-	1,974,348,897.00	0.00	7,481,152,107.08
01/12/2023 15:24:47	UBP66668877301FFFFFF887 7316032010005 PRMA CR Transf 1760000874055 5307952068554808 9503 /876566 /PRM-M- BCA99105	-		0.00 3,000,000.00	7,484,152,107.08
01/12/2023 17:07:19	QR30112023STATIC UNKES PPI CURUG UNKES PPI CURUG MCM InhouseTrf DARI MITRA TRANSAKSI INDONESIA Transfer Fee UNKES PPI CURUG99102	UNKES PPI CURUG		0.00 49,650.00	7,484,201,757.08
01/12/2023 18:22:03	UBP66668877301FFFFFF887 7316032010005 PRMA CR Transf 1760000874055 5307952068554808 9503 /428341 /PRM-M- BCA99105	-		0.00 3,600,000.00	7,487,801,757.08
01/12/2023 21:59:35	UBP60148877301FFFFFF887 7316012110022 99101	-		0.00 8,600,000.00	7,496,401,757.08
02/12/2023 08:43:57	UBP66668877301FFFFFF887 7315112230003 PRMA CR Transf 1760000874055 5379412114563280 9503 /428501 /PRM-M- BCA99105	-		0.00 8,000,000.00	7,504,401,757.08
02/12/2023 10:04:44	UBP60148877301FFFFFF887 7315112130025 99101	-		0.00 38,680,000.00	7,543,081,757.08
03/12/2023 16:58:59	UBP60148877301FFFFFF887 7316022130043 99101	-		0.00 30,000,000.00	7,573,081,757.08
04/12/2023 09:58:53	UBP60108877302FFFFFF887 7316012110023 10000000 P887731601211002317611 UBP60108877302FFFFFF887 7316012110023 3600000 P887731601211002317611 UBP60228877301FFFFFF887 7316022130041 ATMB trf Cred 94866596 /0000832980/ATB- 0000000000013 418872492899105	-		0.00 10,000,000.00	7,583,081,757.08
04/12/2023 10:07:34	UBP60108877302FFFFFF887 7316012110023 3600000 P887731601211002317611 UBP60228877301FFFFFF887 7316022130041 ATMB trf Cred 94866596 /0000832980/ATB- 0000000000013 418872492899105	-		0.00 3,600,000.00	7,586,681,757.08
04/12/2023 10:38:32	UBP60108877302FFFFFF887 7315102210011 8100000 P887731510221001114517 UBP60108877302FFFFFF887 7315102210011 13100000 P887731510221001114517 UBP60108877302FFFFFF887 7315102210011 8100000 P887731510221001114517 UBP60108877302FFFFFF887 7315102210011 1850000 P887731510221001114517	-		0.00 39,040,000.00	7,625,721,757.08
04/12/2023 19:27:11	UBP60148877302FFFFFF887 7315062110016 99101	-		0.00 13,600,000.00	7,639,321,757.08
05/12/2023 08:57:30	UBP60108877302FFFFFF887 7315102210011 8100000 P887731510221001114517 UBP60108877302FFFFFF887 7315102210011 13100000 P887731510221001114517 UBP60108877302FFFFFF887 7315102210011 8100000 P887731510221001114517 UBP60108877302FFFFFF887 7315102210011 1850000 P887731510221001114517	-		0.00 8,100,000.00	7,647,421,757.08
05/12/2023 08:59:31	UBP60108877302FFFFFF887 7315102210011 13100000 P887731510221001114517 UBP60108877302FFFFFF887 7315102210011 8100000 P887731510221001114517 UBP60108877302FFFFFF887 7315102210011 1850000 P887731510221001114517	-		0.00 13,100,000.00	7,660,521,757.08
05/12/2023 09:00:11	UBP60108877302FFFFFF887 7315102210011 8100000 P887731510221001114517 UBP60108877302FFFFFF887 7315102210011 1850000 P887731510221001114517	-		0.00 8,100,000.00	7,668,621,757.08
05/12/2023 09:01:31	UBP60108877302FFFFFF887 7315102210011 1850000 P887731510221001114517	-		0.00 1,850,000.00	7,670,471,757.08
05/12/2023 11:45:37	UBP60148877301FFFFFF887 7315112230003 99101	-		0.00 3,000,000.00	7,673,471,757.08

06/12/2023 06:33:39	UBP66668877301FFFFFF887 7316022130040 PRMA CR Transf 176000874055 5307952063648241 9527 /612947 /PRM-MYBCA 9527199105	-	0.00	39,040,000.00	7,712,511,757.08
06/12/2023 14:38:08	UBP60108877302FFFFFF887 7315112130026 38680000 P8877315112130026 S11101	-	0.00	38,680,000.00	7,751,191,757.08
06/12/2023 18:02:16	UBP66668877301FFFFFF887 7315112230003 PRMA CR Transf 176000874055 5307952053353661 9503 /964987 /PRM-M- BCA99105	-	0.00	15,000,000.00	7,766,191,757.08
07/12/2023 15:29:24	QR05122023STATIC UNKES PPI CURUG UNKES PPI CURUG MCM InhouseTrf DARI MITRA UNKES PPI CURUG TRANSAKSI INDONESIA Transfer Fee UNKES PPI CURUG99102	-	0.00	248,250.00	7,766,440,007.08
07/12/2023 21:47:53	UBP60148877301FFFFFF887 7316022010014 99101	-	0.00	4,000,000.00	7,770,440,007.08
07/12/2023 22:16:50	UBP60148877301FFFFFF887 7315102210003 99101	-	0.00	13,100,000.00	7,783,540,007.08
08/12/2023 14:51:03	CK 506937- Transfer 00506937 17611	-	1,118,032,000.00	0.00	6,665,508,007.08
08/12/2023 16:26:48	Irvan TNU25 MCM InhouseTrf DARI IRVAN Irvan TNU2599101	-	0.00	3,500,000.00	6,669,008,007.08
09/12/2023 21:09:16	UBP60148877301FFFFFF887 730090036 99101	-	0.00	199,620,000.00	6,868,628,007.08
10/12/2023 19:03:22	UBP60148877301FFFFFF887 7315112130032 99101	-	0.00	30,000,000.00	6,898,628,007.08
11/12/2023 11:11:52	CK 506938-SPT 058 Transfer 00506938 17611	-	47,356,000.00	0.00	6,851,272,007.08
12/12/2023 09:19:16	UBP60148877301FFFFFF887 7316022130032 99101	-	0.00	39,040,000.00	6,890,312,007.08
13/12/2023 11:40:46	CK 506939-SPT 60 Transfer 00506939 17611	-	18,214,000.00	0.00	6,872,098,007.08
13/12/2023 16:16:50	UBP60148877301FFFFFF887 7315092210024 99101	-	0.00	8,100,000.00	6,880,198,007.08
14/12/2023 15:04:25	QR13122023STATIC UNKES PPI CURUG UNKES PPI CURUG MCM InhouseTrf DARI MITRA UNKES PPI CURUG TRANSAKSI INDONESIA Transfer Fee UNKES PPI CURUG99102	-	0.00	49,650.00	6,880,247,657.08
14/12/2023 15:32:05	CK 506940-SPT 059 Transfer 00506940 17611	-	1,059,689,917.00	0.00	5,820,557,740.08
15/12/2023 10:12:23	UBP60148877301FFFFFF887 7312012130002 99101	-	0.00	17,200,000.00	5,837,757,740.08
15/12/2023 17:09:10	CK 506941-SPT 061 Transfer 00506941 17611	-	1,605,547,000.00	0.00	4,232,210,740.08
15/12/2023 17:11:18	CK 506942-REMUN NOV 23 Transfer 00506942 17611	-	1,734,642,000.00	0.00	2,497,568,740.08
16/12/2023 14:32:24	UBP60148877301FFFFFF887 7315092210003 99101	-	0.00	6,600,000.00	2,504,168,740.08
19/12/2023 14:19:40	UBP60108877302FFFFFF887 7315112130042 38680000 P8877315112130042 S16406	-	0.00	38,680,000.00	2,542,848,740.08
21/12/2023 08:27:15	UBP60148877301FFFFFF887 7315112130036 99101	-	0.00	29,120,000.00	2,571,968,740.08
21/12/2023 14:02:17	UBP60108877302FFFFFF887 7316022130029 39040000 P887731602213002915544	-	0.00	39,040,000.00	2,611,008,740.08
22/12/2023 08:40:59	UBP60148877301FFFFFF887 7315112130034 99101	-	0.00	38,680,000.00	2,649,688,740.08
22/12/2023 15:30:42	PINDAH BUKU Transfer 17611	-	0.00	8,781,208,486.00	11,430,897,226.08
22/12/2023 17:12:33	CK 506943-SPT 63 Transfer 00506943 17611	-	4,791,409,943.00	0.00	6,639,487,283.08
22/12/2023 17:21:32	QR21122023STATIC UNKES PPI CURUG UNKES PPI CURUG MCM InhouseTrf DARI MITRA UNKES PPI CURUG TRANSAKSI INDONESIA Transfer Fee UNKES PPI	-	0.00	506,430.00	6,639,993,713.08

CURUG99102

23/12/2023 09:24:19	UBP60148877301FFFFFF887 7316022130044 99101	-	0.00	39,040,000.00	6,679,033,713.08
23/12/2023 16:12:07	UBP60228877301FFFFFF887 7315062210008 ATMB trf Credit 69691544 /1223094598/ATB- 0000000000121 385030701499299105	-	0.00	3,700,000.00	6,682,733,713.08
25/12/2023 14:18:57	UBP60148877301FFFFFF887 7316022010014 99101	-	0.00	1,000,000.00	6,683,733,713.08
25/12/2023 20:03:43	UBP60148877301FFFFFF887 7315112130038 99101	-	0.00	33,680,000.00	6,717,413,713.08
27/12/2023 08:25:16	UBP60148877301FFFFFF887 7316022130046 99101	-	0.00	39,040,000.00	6,756,453,713.08
27/12/2023 11:28:22	UBP60108877302FFFFFF887 7315112130046 38680000 P887731511213004610775	-	0.00	38,680,000.00	6,795,133,713.08
28/12/2023 09:38:14	UBP60148877301FFFFFF887 7316042110017 99101	-	0.00	3,000,000.00	6,798,133,713.08
28/12/2023 15:33:22	CK 506945-SPT 65 Transfer 00506945 17611	-	133,930,000.00	0.00	6,664,203,713.08
28/12/2023 15:45:13	CK 506944-SPT 64 Transfer 00506944 17611	-	881,167,200.00	0.00	5,783,036,513.08
29/12/2023 09:48:19	UBP60108877302FFFFFF887 7316022130036 30540000 P887731602213003617503	-	0.00	30,540,000.00	5,813,576,513.08
29/12/2023 09:58:20	UBP60108877302FFFFFF887 7316042010009 8100000 P887731604201000918502	-	0.00	8,100,000.00	5,821,676,513.08
29/12/2023 15:37:16	CK 506946-SPT 66 Transfer 00506946 17611	-	24,900,000.00	0.00	5,796,776,513.08
30/12/2023 12:36:02	UBP60148877301FFFFFF887 7316022130027 99101	-	0.00	30,540,000.00	5,827,316,513.08
30/12/2023 13:42:58	UBP60148877301FFFFFF887 7316022130043 99101	-	0.00	9,040,000.00	5,836,356,513.08
31/12/2023 11:50:28	UBP60148877301FFFFFF887 7316022130033 99101	-	0.00	39,040,000.00	5,875,396,513.08
31/12/2023 23:59:00	Bunga 17611	-	0.00	9,184,660.23	5,884,581,173.31

No of Debit	11
Total Amount Debited	13,389,236,957.00
No of Credit	50
Total Amount Credited	9,828,317,126.23
Closing Balance	5,884,581,173.31

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1760000874071 IDR RPL 127 STPI CURUG U RPL 127 STPI CURUG U
 Period 01 Dec 2023 - 31 Dec 2023
 Currency IDR
 Branch KCP Tangerang Curug
 Opening Balance 3,115,775,542.43

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
01/12/2023 07:17:27	PEMBAYARAN PENDIDIKAN I NYOMAN DODY Setor Tunai 17503	-	0.00	12,500,000.00	3,128,275,542.43
01/12/2023 12:35:49	PRMA CR Transf 1760000874071 5260512015058066 S1ACMB9503/175141 /PRM-M-BCA99105 9221/SP2D-LS/OTSUS-SG/1. 01.2.22.0.0 0.02.0000	-	0.00	12,500,000.00	3,140,775,542.43
01/12/2023 14:20:35	/2023 PEMERINTAH KOTA JAYAPURA17611 PEMERINTAH KOTA JAYAPURA	-	0.00	299,970,000.00	3,440,745,542.43
03/12/2023 17:17:40	MCM InhouseTrf DARI ERBUATY ROSJOETYASTUTY 99101	-	0.00	1,000,000.00	3,441,745,542.43
05/12/2023 11:58:26	PEMB TYPE RATING 4 ORG Transfer DARI BUANA CAKRA AVIA 17611	-	0.00	400,000,000.00	3,841,745,542.43
05/12/2023 12:55:41	Ibu SRI WIDAYATI - 009 17611 Ibu SRI WIDAYATI	-	0.00	397,000,000.00	4,238,745,542.43
05/12/2023 13:53:49	PEMB TYPE RATING 4 ORANG Overbooking DARI BUANA CAKRA AVIA 17611 20231205BRINIDJA0100022 6739627	-	0.00	200,000,000.00	4,438,745,542.43
05/12/2023 14:01:00	BRINIDJA/SUKARNO 08190103690553699102	-	0.00	300,000.00	4,439,045,542.43
05/12/2023 14:08:24	PEMB TYPE RATING Transfer DARI BHUTALA CONNECTING INTERGRATED 17611 An Prasetya Jati Hutamanusi manusi MCM	-	0.00	100,000,000.00	4,539,045,542.43
05/12/2023 17:04:39	InhouseTrf DARI ELINDIA FARAHYAH ADANI An Prasetya Jati Hutamanusi99101	manusi	0.00	75,000,000.00	4,614,045,542.43
06/12/2023 05:21:58	MCM InhouseTrf DARI MASAGUNG WISNU MURTI 99101 20231206BTANIDJA0100021 2503344	-	0.00	600,000.00	4,614,645,542.43
06/12/2023 11:25:22	BTANIDJA/ARNOL PANGGABEAN 5090150004848799102 GARBARATA 202312061125594048	-	0.00	75,000,000.00	4,689,645,542.43
06/12/2023 13:13:53	202312061125594048 MCM InhouseTrf DARI ANGKASA PURA SOLUSI Transfer Fee 2023120611255940489910 2	202312061125594048	0.00	13,230,000.00	4,702,875,542.43
06/12/2023 15:42:35	MCM InhouseTrf DARI HILDA ADELIA AHMAD 99101 20231206BNINIDJA0100021 8190802	-	0.00	13,600,000.00	4,716,475,542.43
06/12/2023 17:42:21	BNINIDJA/DEDI HERMAWAN 012332056799102	-	0.00	3,000,000.00	4,719,475,542.43
06/12/2023 20:37:21	MCM InhouseTrf DARI SURYANA 99101 20231207CENAIIDJA0100026 0519061	-	0.00	900,000.00	4,720,375,542.43
07/12/2023 15:44:03	CENAIIDJA/PANDENYOMAN ANDHIKO SURY 217127987199102	-	0.00	13,000,000.00	4,733,375,542.43

07/12/2023 15:45:50	20231207CENAIJJA0100026 0526651 CENAIJJA/TIKO RISQAL MANSUR 546530649999102	-	0.00	23,000,000.00	4,756,375,542.43
07/12/2023 16:34:22	MCM InhouseTrf DARI YANUAR TRISANTYO 99101	-	0.00	23,000,000.00	4,779,375,542.43
07/12/2023 16:40:27	MCM InhouseTrf DARI ARIE RISMANTO 99101	-	0.00	23,000,000.00	4,802,375,542.43
07/12/2023 16:58:14	MCM InhouseTrf DARI NUR MUHAMMAD 99101	-	0.00	23,000,000.00	4,825,375,542.43
08/12/2023 10:48:26	20231208CENAIJJA0100026 3546000 CENAIJJA/TIKO RISQAL MANSUR 546530649999102 PPC A320 adrianus eghi kotet p i kotet p	-	0.00	10,000,000.00	4,835,375,542.43
08/12/2023 12:10:34	MCM InhouseTrf DARI ADRIANUS EGI KRISTANTYO PRASASTO PPC A320 adrianus eghi kotet p99101	i kotet p	0.00	46,000,000.00	4,881,375,542.43
08/12/2023 13:42:05	202312081123889499 MCM InhouseTrf DARI AVIASI SOLUSI PRIMA Transfer Fee 2023120811238894999910 2	-	0.00	327,600,000.00	5,208,975,542.43
08/12/2023 13:42:13	OSHutangPPICNov2023 202312061611910049 202312061611910049 MCM InhouseTrf DARI AVIASI SOLUSI PRIMA Transfer Fee 2023120616119100499910 2	202312061611910 049	0.00	45,500,000.00	5,254,475,542.43
10/12/2023 12:04:19	20231210DANAIDJ10100998 5943640 DANAIDJ1/SUTISNA 628131873224999102 SPAN 231331302027664000001 00001 MCM	-	0.00	900,000.00	5,255,375,542.43
11/12/2023 10:56:11	InhouseTrf Nomor : PKS. 015/SP/SWAKELOLA/PPK. SDM.OR Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak99111 2 SISWA TJP TERM 1 212 212 MCM	00001	0.00	291,000,000.00	5,546,375,542.43
11/12/2023 15:19:44	InhouseTrf DARI TIRTA JATI PERSADA Transfer Fee 21299102	212	0.00	56,000,000.00	5,602,375,542.43
11/12/2023 17:12:54	20231211CENAIJJA0100027 6599678 CENAIJJA/ZAMMAH SARI 7620732804999102 SPAN 231331302027893000001 00001 MCM	-	0.00	300,000.00	5,602,675,542.43
12/12/2023 11:54:22	InhouseTrf No. 08/SP/SWAKELOLA/XI/2023 tanggal 20 N Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak99111 SPAN 231331302027902000001 00001 MCM	00001	0.00	199,590,000.00	5,802,265,542.43
12/12/2023 11:55:02	InhouseTrf No. 09/SP/SWAKELOLA/XI/2023 tanggal 24 N Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak99111 SPAN 231331302027902000001 00001 MCM	00001	0.00	199,383,000.00	6,001,648,542.43
12/12/2023 13:56:17	M Farid K Taj airbus Rating Rating MCM InhouseTrf DARI NUR MUHAMMAD M Farid K Taj airbus Rating99101 PERUM LPPNPI	Rating	0.00	20,000,000.00	6,021,648,542.43
13/12/2023 16:11:35	11249/624 11249/624 MCM InhouseTrf DARI LPPNPI Transfer Fee 11249/62499102 PERUM LPPNPI	11249/624	0.00	336,000,000.00	6,357,648,542.43
13/12/2023 16:13:36	11474/629 11474/629 MCM InhouseTrf DARI LPPNPI Transfer Fee 11474/62999102 Pembayaran Wisma Alfa dan Oscar dan Oscar	11474/629	0.00	336,000,000.00	6,693,648,542.43
13/12/2023 17:41:33	MCM InhouseTrf DARI ARINI ZULFA HIMAYATI Pembayaran Wisma Alfa dan Oscar99101	dan Oscar	0.00	8,100,000.00	6,701,748,542.43
14/12/2023 08:37:47	20231214CENAIJJA0100028 6056426 CENAIJJA/SUMARUCHYAT 714024403699102	-	0.00	1,800,000.00	6,703,548,542.43
14/12/2023 09:57:25	MCM InhouseTrf DARI SABARDI 99101	-	0.00	600,000.00	6,704,148,542.43

15/12/2023 09:37:08	COLLECTION PPIC DES 2023 Transfer 17611	-	0.00	125,894,201.00	6,830,042,743.43
15/12/2023 12:58:22	KUNJUNGAN LWM MELATI Setor Tunai 17611	-	0.00	1,800,000.00	6,831,842,743.43
15/12/2023 13:00:08	KUNJUNGAN AL-WILDAN Setor Tunai 17611	-	0.00	3,000,000.00	6,834,842,743.43
15/12/2023 14:03:08	AN BLUPEM AN BP3 CURUG 00039RPL 127 STPI CURUG UTK DANA KELOLA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG17611	-	0.00	142,108,000.00	6,976,950,743.43
15/12/2023 17:16:48	CK 507065- Tarik Tunai 00507065 17611	-	125,894,201.00	0.00	6,851,056,542.43
17/12/2023 20:04:47	Training A2 program MCM InhouseTrf DARI DOMINUS MARIO PHILIPS RIBERU Training A2 program99101 AIS CHECKER	-	0.00	23,000,000.00	6,874,056,542.43
19/12/2023 10:31:42	11657/633 11657/633 MCM InhouseTrf DARI LPPNPI Transfer Fee 11657/63399102 11656/633	11657/633	0.00	336,000,000.00	7,210,056,542.43
19/12/2023 10:31:46	MCM InhouseTrf DARI LPPNPI Transfer Fee 11656/63399102	-	0.00	336,000,000.00	7,546,056,542.43
19/12/2023 10:31:50	11659/633 11659/633 MCM InhouseTrf DARI LPPNPI Transfer Fee 11659/63399102 OJTI 6-10 NOV 2023	11659/633	0.00	336,000,000.00	7,882,056,542.43
19/12/2023 10:31:54	11569/631 11569/631 MCM InhouseTrf DARI LPPNPI Transfer Fee 11569/63199102 OJTI 23-27 OKT 2023	11569/631	0.00	336,000,000.00	8,218,056,542.43
19/12/2023 10:31:58	11568/631 11568/631 MCM InhouseTrf DARI LPPNPI Transfer Fee 11568/63199102	11568/631	0.00	336,000,000.00	8,554,056,542.43
19/12/2023 10:32:09	PANS OPS PBN 11658/633 11658/633 MCM InhouseTrf DARI LPPNPI Transfer Fee 11658/63399102 OJTI 18-23 SEP 2023	11658/633	0.00	408,000,000.00	8,962,056,542.43
19/12/2023 10:32:13	11577/631 11577/631 MCM InhouseTrf DARI LPPNPI Transfer Fee 11577/63199102 PERUM LPPNPI	11577/631	0.00	336,000,000.00	9,298,056,542.43
19/12/2023 10:39:14	11670/633 11670/633 MCM InhouseTrf DARI LPPNPI Transfer Fee 11670/63399102 PERUM LPPNPI	11670/633	0.00	93,000,000.00	9,391,056,542.43
19/12/2023 17:18:37	11688/633 11688/633 MCM InhouseTrf DARI LPPNPI Transfer Fee 11688/63399102 20231221BNINIDJA0100023 6590432	11688/633	0.00	92,000,000.00	9,483,056,542.43
21/12/2023 10:04:36	BNINIDJA/DANANG BAGASKORO 041585308499102 Profit Share Nov 202	-	0.00	750,000.00	9,483,806,542.43
21/12/2023 16:30:52	MCM InhouseTrf DARI MUARA JUARA KREASI INDONESIA Transfer Fee 2023122115036364699910 2	-	0.00	779,133.00	9,484,585,675.43
22/12/2023 14:06:24	Setor Tunai 17611	-	0.00	750,000.00	9,485,335,675.43
22/12/2023 15:30:42	CK 507066-PINDAH BUKU Transfer 00507066 17611	-	8,781,208,486.00	0.00	704,127,189.43
22/12/2023 17:27:29	FFS54Hour Des2023 202312211422555448 202312211422555448 MCM InhouseTrf DARI AVIASI SOLUSI PRIMA Transfer Fee 2023122114225554489910 2	202312211422555 448	0.00	245,700,000.00	949,827,189.43
23/12/2023 16:54:06	20231223BNINIDJA0100024 0172302 BNINIDJA/SOEGENG WAHYUDIONO 018811134399102	-	0.00	12,000,000.00	961,827,189.43
28/12/2023 10:08:03	PEMB BY SEWA LAB UJI ASPAL Setor Tunai 17611	-	0.00	13,000,000.00	974,827,189.43
28/12/2023 10:48:00	20231228BNINIDJA0100024 5604284 BNINIDJA/DANANG BAGASKORO 041585308499102	-	0.00	1,000,000.00	975,827,189.43

28/12/2023 11:39:13	PERUM LPPNPI 11886/637 11886/637 MCM InhouseTrf DARI LPPNPI Transfer Fee 11886/63799102 PERUM LPPNPI	11886/637	0.00	336,000,000.00	1,311,827,189.43
28/12/2023 11:39:25	11764/635 11764/635 MCM InhouseTrf DARI LPPNPI Transfer Fee 11764/63599102 PERUM LPPNPI	11764/635	0.00	174,000,000.00	1,485,827,189.43
28/12/2023 11:39:37	11697/633 11697/633 MCM InhouseTrf DARI LPPNPI Transfer Fee 11697/63399102 PERUM LPPNPI	11697/633	0.00	336,000,000.00	1,821,827,189.43
28/12/2023 11:39:41	11855/637 11855/637 MCM InhouseTrf DARI LPPNPI Transfer Fee 11855/63799102 PERUM LPPNPI	11855/637	0.00	200,000,000.00	2,021,827,189.43
28/12/2023 11:39:45	11779/635 11779/635 MCM InhouseTrf DARI LPPNPI Transfer Fee 11779/63599102	11779/635	0.00	208,000,000.00	2,229,827,189.43
28/12/2023 17:25:39	MCM InhouseTrf DARI ATHIRA FARINA PUTRI 99101 11691/633	-	0.00	2,590,000.00	2,232,417,189.43
29/12/2023 05:04:06	MCM InhouseTrf DARI LPPNPI Transfer Fee 11691/63399102	-	0.00	504,000,000.00	2,736,417,189.43
29/12/2023 08:19:03	ANGKASA PURA SUPORT PT - 009 17611	-	0.00	402,800,000.00	3,139,217,189.43
29/12/2023 11:16:36	Setor Tunai 17611	-	0.00	1,500,000.00	3,140,717,189.43
29/12/2023 11:59:17	HLC 2887 REFRESHMENT MCM InhouseTrf DARI ANGKASA PURA II Transfer Fee99102 OS STPICurugDec2023 202312281157594788	-	0.00	175,000,000.00	3,315,717,189.43
29/12/2023 13:28:32	202312281157594788 MCM InhouseTrf DARI AVIASI SOLUSI PRIMA Transfer Fee 2023122811575947889910 2	202312281157594788	0.00	45,500,000.00	3,361,217,189.43
31/12/2023 03:05:16	PEMBAYARAN SEWA Capt NICKODA E NICKODA E MCM InhouseTrf DARI NICKODA EFFENDI PEMBAYARAN SEWA Capt NICKODA E99101	NICKODA E	0.00	2,000,000.00	3,363,217,189.43
31/12/2023 23:59:00	Bunga 17611	-	0.00	6,942,588.27	3,370,159,777.70

No of Debit	2
Total Amount Debited	8,907,102,687.00
No of Credit	71
Total Amount Credited	9,161,486,922.27
Closing Balance	3,370,159,777.70



Account Information

ACCOUNT STATEMENT

SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN
JL RAYA CURUG TANGERANG BANTEN
INDONESIA

Account No. : 2312201542 / RPL 127 STPI utk Dana Kelolaan BLU(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							535,175,340.00
31/12/2023 08.00.00	31/12/2023 08.00.00	INTERNAL BRANCH	902704	JASA GIRO/BUNGA	438,645.00	K	

Ending Balance : 535,613,985.00
Total Debet : 0 0.00
Total Credit : 1 438,645.00



Report Satker

Tanggal :2023-12-01 - 2023-12-31
Kementerian :Kementerian Perhubungan (022)
Eselon :Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (12)
Satker :SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA (288127)
Rekening Induk :RKK BADAN PENGEMBANGAN SDM KEMENHUB OPS (1210007881422)
Rekening Satker :BPG 127 PPI CURUG (8100122881271000)

Total Mutasi
Debit : 3,362,117,317.00
Kredit : 3,362,038,157.00
Saldo Akhir : 0.00

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
01-12-2023	12:59:49	Transfer Credit SPAN SPAN 23127130201509600001 Pembayaran Belanja Barang berupa Pembaya	79,160.00	0.00	5,297,308.00	5,376,468.00	SPAN	
01-12-2023	14:41:22	Transfer Credit SPAN SPAN 231271302015094000001 Pembayaran Belanja Barang berupa Honorar	5,376,468.00	0.00	26,220,000.00	31,596,468.00	SPAN	
01-12-2023	14:44:47	Transfer Credit SPAN SPAN 231271302015097000001 Pembayaran Belanja Barang berupa Pembaya	31,596,468.00	0.00	23,330,070.00	54,926,538.00	SPAN	
01-12-2023	14:58:10	Transfer Credit SPAN SPAN 231271302015095000001 Pembayaran Belanja Barang berupa Honorar	54,926,538.00	0.00	11,400,000.00	66,326,538.00	SPAN	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
19-12-2023	09:08:49	Transfer Credit SPAN SPAN 231271302016908000001 Pembayaran Belanja Barang berupa Pembaya	2,172,404,453.00	0.00	5,546,500.00	2,177,950,953.00	SPAN	
19-12-2023	09:09:11	Transfer Credit SPAN SPAN 231271302016929000001 Pembayaran Belanja Barang berupa Pembaya	2,177,950,953.00	0.00	8,788,391.00	2,186,739,344.00	SPAN	
19-12-2023	09:09:59	Transfer Credit SPAN SPAN 231271302016954000001 Pembayaran Belanja Barang berupa Pembaya	2,186,739,344.00	0.00	6,581,210.00	2,193,320,554.00	SPAN	
19-12-2023	09:10:07	Transfer Credit SPAN SPAN 231271302016934000001 Pembayaran Belanja Barang berupa Pembaya	2,193,320,554.00	0.00	8,551,979.00	2,201,872,533.00	SPAN	
19-12-2023	09:10:38	Transfer Credit SPAN SPAN 231271302016925000001 Pembayaran Belanja Barang berupa Pembaya	2,201,872,533.00	0.00	79,792,697.00	2,281,665,230.00	SPAN	
19-12-2023	09:11:04	Transfer Credit SPAN SPAN 231271302016898000001 Pembayaran Belanja Barang berupa Pembaya	2,281,665,230.00	0.00	63,028,204.00	2,344,693,434.00	SPAN	
19-12-2023	09:11:10	Transfer Credit SPAN SPAN 231271302016914000001 Pembayaran Belanja Barang berupa Pembaya	2,344,693,434.00	0.00	8,355,500.00	2,353,048,934.00	SPAN	
19-12-2023	09:11:14	Transfer Credit SPAN SPAN 231271302016959000001 Pembayaran Belanja Barang berupa Pembaya	2,353,048,934.00	0.00	7,620,000.00	2,360,668,934.00	SPAN	
19-12-2023	09:11:16	Transfer Credit SPAN SPAN 231271302016961000001 Pembayaran Belanja Barang berupa Pembaya	2,360,668,934.00	0.00	750,000.00	2,361,418,934.00	SPAN	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
19-12-2023	09:12:22	Transfer Credit SPAN SPAN 231271302016880000001 Pembayaran Belanja Barang berupa Pembaya	2,361,418,934.00	0.00	9,125,446.00	2,370,544,380.00	SPAN	
19-12-2023	09:12:42	Transfer Credit SPAN SPAN 231271302016960000001 Pembayaran Belanja Barang berupa Pembaya	2,370,544,380.00	0.00	5,481,000.00	2,376,025,380.00	SPAN	
22-12-2023	15:28:58	Withdrawal BDS KE	2,376,025,380.00	1,511,261,228.00	0.00	864,764,152.00	TELLER	
27-12-2023	15:37:19	Withdrawal BDS KE	864,764,152.00	411,143,109.00	0.00	453,621,043.00	TELLER	
28-12-2023	15:29:46	Withdrawal BDS KE	453,621,043.00	453,621,043.00	0.00	0.00	TELLER	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG

Jl. TMP. Taruna No.12, Tangerang Banten, 15118
Email: kppn.tangerang@gmail.com Telepon : (021) 5514899 Faksimile : (021) 5533725

Nomor : S- 83 /MPB.11/KP.127/2016
Lampiran : Satu berkas
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening
Atas Nama STPI

08 Januari 2016

Yth. KPA Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia
Tangerang

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/lembaga/Satker dan Surat Saudara tanggal 08 Januari 2016 Nomor : KU.310/1/1/STPI-2016, dengan ini kami memberikan persetujuan pembukaan rekening untuk keperluan menampung seluruh penerimaan yang bersumber dari PNBPN BLU pada PT BNI Cabang Tangerang, Rekening tersebut **akan diberi nama : RPL 127 STPI utk BLU**. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.

Selanjutnya Saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban sebagai berikut
 - a. Melaporkan pembukaan rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan ini kepada Kepala KPPN Tangerang.
 - b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Tangerang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - c. Menyajikan rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga/Satker
 - d. Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ijin rekening.
 - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak rekening digolongkan dalam rekening pasif.

2. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan rekening apabila :
 - a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat persetujuan permohonan pembukaan rekening kepada Kepala KPPN Tangerang.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Tangerang.
 - c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan
 - d. Terjadi penyalahgunaan atas rekening yang disetujui BUN/Kuasa BUN

*Terima kasih untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun
Atas layanan yang kami berikan*

3. Surat persetujuan berlaku sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2016.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor


Sofia Rita Diana
NIP 196401071984032001

Tembusan :

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara
2. Kepala Kanwil DJPBN Prov. Banten

*Terima kasih untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun
Atas layanan yang kami berikan.*



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG

Jl. TMP. Taruna No.12, Tangerang Banten, 15118
Email: kppn.tangerang@gmail.com Telepon : (021) 5514889 Faksimile : (021) 5533725

Nomor : S- 880 /WPB.11/KP.127/2017
Lampiran : Satu berkas
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening
Atas Nama STPI

04 Agustus 2017

↗ Yth. KPA Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)
PO BOX 509
Tangerang 15001

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satker dan Surat Saudara tanggal 31 Juli 2017 Nomor : KU.310/I/8/STPI-2017 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini kami memberikan persetujuan pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang STPI Curug untuk keperluan menampung dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU dan akan diberi nama :

- **RPL 127 STPI Curug utk Operasional Belanja**

Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.

Selanjutnya Saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban sebagai berikut
 - a. Melaporkan pembukaan rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan ini kepada Kepala KPPN Tangerang.
 - b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Tangerang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - c. Menyajikan rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga/Satker.
 - d. Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ijin rekening.
 - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak rekening digolongkan dalam rekening pasif.

2. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan rekening apabila :
 - a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat persetujuan permohonan pembukaan rekening kepada Kepala KPPN Tangerang.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Tangerang.
 - c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan
 - d. Terjadi penyalahgunaan atas rekening yang disetujui BUN/Kuasa BUN

3. Surat persetujuan berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Mohamad Yusuf Salim
NIP. 196507241986031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.
2. Kepala Kanwil DJPBN Prov. Banten.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
4. Pimpinan Bank Mandiri Cabang STPI Curug.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG

Jl. TMP. Taruna No.12 , Tangerang Banten, 15118
Email: koon.tangerang@gmail.com Telepon : (021) 5514889 Faksimile : (021) 5533725

Nomor : S- 881/WPB.11/KP.127/2017
Lampiran : Satu berkas
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening
Atas Nama STPI

04 Agustus 2017

Yth. KPA Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)
PO BOX 509
Tangerang 15001

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satker dan Surat Saudara tanggal 31 Juli 2017 Nomor : KU.310/I/8/STPI-2017. hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini kami memberikan persetujuan pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang STPI Curug untuk keperluan menampung dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU dan akan diberi nama :

- RPL 127 STPI Curug utk Operasional Penerimaan

Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.

Selanjutnya Saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban sebagai berikut
 - a. Melaporkan pembukaan rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan ini kepada Kepala KPPN Tangerang.
 - b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Tangerang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - c. Menyajikan rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga/Satker.
 - d. Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ijin rekening.
 - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak rekening digolongkan dalam rekening pasif.

2. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan rekening apabila :
 - a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat persetujuan permohonan pembukaan rekening kepada Kepala KPPN Tangerang.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Tangerang.
 - c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan
 - d. Terjadi penyalahgunaan atas rekening yang disetujui BUN/Kuasa BUN
3. Surat persetujuan berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Mohamad Yusuf Salim
NIP. 196507241986031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.
2. Kepala Kanwil DJPBN Prov. Banten.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
4. Pimpinan Bank Mandiri Cabang STPI Curug.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG

Jl. TMP. Taruna No.12, Tangerang, Banten, 15118
Email: kppn.tangerang@gmail.com Telepon : (021) 5514899 Faksimile : (021) 5533725

Nomor : S- 878 /WPB.11/KP.127/2017
Lampiran : Satu berkas
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening
Atas Nama STPI

04 Agustus 2017

Yth. KPA Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)
PO BOX 509
Tangerang 15001

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satker dan Surat Saudara tanggal 31 Juli 2017 Nomor : KU.310//18/STPI-2017 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini kami memberikan persetujuan pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang STPI Curug untuk keperluan menampung dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU dan akan diberi nama :

- **RPL 127 STPI Curug utk Dana Kelolaan**

Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.

Selanjutnya Saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban sebagai berikut
 - a. Melaporkan pembukaan rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan ini kepada Kepala KPPN Tangerang.
 - b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Tangerang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - c. Menyajikan rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga/Satker.
 - d. Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ijin rekening.
 - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak rekening digolongkan dalam rekening pasif.

2. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan rekening apabila :
 - a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat persetujuan permohonan pembukaan rekening kepada Kepala KPPN Tangerang.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Tangerang.
 - c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan
 - d. Terjadi penyalahgunaan atas rekening yang disetujui BUN/Kuasa BUN
3. Surat persetujuan berlaku sampai dengan tanggal **24 Agustus 2017**.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Menteri Keuangan
Kepala Kantor

Mohamad Yusuf Salim
NIP. 196507241986031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.
2. Kepala Kanwil DJPBN Prov. Banten.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
4. Pimpinan Bank Mandiri Cabang STPI Curug.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

JL. RAYA PLP CURUG
TANGERANG 15820

Telp. (021) 598-2203/04/05
Fax. (021) 598-2234

email : ppi@ppicurug.ac.id
website : www.ppicurug.ac.id

Nomor : Ku. 409/3/5/PPIC/2023
Klasifikasi :
Lampiran : -
Hal : Laporan Penutupan Rekening Deposito

Curug, 20 JUL 2023

Yth. Kepala KPPN Tangerang
di
Tempat

Mendasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara Lembaga dan Surat dari Kepala KPPN Tangerang nomor : S-498/WPB.11/KP.02/2019 dan S-499/WPB.11/KP.02/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya an. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, dengan ini kami laporkan sebagai berikut :

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Bank	Tanggal Penutupan Rekening
1	RPL 127 BLU STPI UNTUK PKD	0830750628	Bank BNI	29 Mei 2023
2	RPL 127 BLU STPI UNTUK PKD	0004301400110586	Bank BTN	25 Mei 2023

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Direktur
Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

AGUSTONO, S.Sos, M.MTr
NIP. 19690831 199103 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

JL. RAYA PLP CURUG
TANGERANG 15820

Telp. (021) 598-2203/04/05
Fax. (021) 598-2234

email : ppi@ppicurug.ac.id
website : www.ppicurug.ac.id

Nomor : Ku.409/3/5/PPIC/2023
Klasifikasi :
Lampiran : -
Hal : Laporan Penutupan Rekening Deposito

Curug, 20 JUL 2023

Yth. Kepala KPPN Tangerang
di
Tempat

Mendasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara Lembaga dan Surat dari Kepala KPPN Tangerang nomor : S-498/WPB.11/KP.02/2019 dan S-499/WPB.11/KP.02/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya an. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, dengan ini kami laporkan sebagai berikut :

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Bank	Tanggal Penutupan Rekening
1	RPL 127 BLU STPI UNTUK PKD	0830750628	Bank BNI	29 Mei 2023
2	RPL 127 BLU STPI UNTUK PKD	0004301400110586	Bank BTN	25 Mei 2023

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur
Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

AGUSTONO, S.Sos, M.MTr
NIP. 19690831 199103 1 001



Account Information

ACCOUNT STATEMENT

SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN
JL RAYA CURUG TANGERANG BANTEN
INDONESIA.

Account No. : 2312201542 / RPL 127 STPI utk Dana Kelolaan BLU(IDR)

Account Type : CURRENT

Period : 29-May-23 - 29-May-23

Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							509,032,871.00
29/05/2023 13.19.04	29/05/2023 13.19.04	TANGERAN G	175216	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 830750628 RPL 127 BLU STPI UNTUK PKD	1,497,955,322.00	K	
Ending Balance :							2,006,988,193.00
Total Debet :							0 0.00
Total Credit :							1 1,497,955,322.00



**Rekening Koran
(Account Statement)**

Periode : From 25 May 2023
 To 29 May 2023
 Account No : 1780000874055 - RPL 127 STPI CURUG U
 Currency : IDR
 Branch : KCP Tangerang Curug
 Opening Balance : 805.796.196.98

Date & Time	Value Date	Description	Reference No.	Debit	Credit	Balance
25/05/2023 09:50:46	25/05/2023	UBP60148877301FFFFFF88773491223 0309		0.00	150.000.00	805.946.196.98
25/05/2023 09:57:33	25/05/2023	UBP60118877301FFFFFF88773491223 0062 150000		0.00	150.000.00	806.096.196.98
25/05/2023 10:14:05	25/05/2023	UBP60118877301FFFFFF88773491223 0062 150000		0.00	150.000.00	806.246.196.98
25/05/2023 11:09:49	25/05/2023	RPL 127 STPI CURUG UNTUK OPERASI Inward RTGS - RPL 127 BLU STPI UNTUK PKDPT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK		0.00	2.596.412.263.00 ✓	3.402.658.459.98
25/05/2023 11:59:35	25/05/2023	RPL 127 STPI BLU STPI UNTUK PKD - 200		0.00	1.600.626.11	3.404.259.086.09
28/05/2023 13:11:46	28/05/2023	UBP60228877301FFFFFF88773491223 0193 ATMB Inf Credit: 87000645 /7454155884/ATB-0000000380003		0.00	150.000.00	3.404.409.086.09
28/05/2023 20:24:55	28/05/2023	UBP66668877301FFFFFF88773491223 0394 PRMA CR Transf 178000874055 6019007546799843		0.00	150.000.00	3.404.559.086.09
29/05/2023 11:27:33	29/05/2023	UBP60108877302FFFFFF88773491223 0191 150000		0.00	150.000.00	3.404.709.086.09
29/05/2023 12:12:16	29/05/2023	UBP60108877302FFFFFF88773491223 0372 150000		0.00	150.000.00	3.404.859.086.09
29/05/2023 12:30:17	29/05/2023	UBP60108877302FFFFFF88773491223 0278 150000		0.00	150.000.00	3.405.009.086.09
29/05/2023 17:52:23	29/05/2023	GR26052023STATIC LINKES PPI CURUG MCM InhouseTR DARI MITRA TRANSAKSI INDONESIA	LINKES PPI CURUG	0.00	99.30	3.405.009.087.39
29/05/2023 21:33:51	29/05/2023	UBP66668877301FFFFFF88773491223 0410 PRMA CR Transf 178000874055 6019008500211015		0.00	150.000.00	3.405.159.087.39

No of Credit	12
Total Amount Credited	2,599,382,890.41
No of Debit	0
Total Amount Debited	0.00
Closing Balance	3,405,159,087.39



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

JL. RAYA PLP CURUG
TANGERANG 15820

Telp. : (021) 598-2203/04/05
Fax : (021) 598-2234

email : ppi@ppicurug.ac.id
website : www.ppicurug.ac.id

Nomor : Ku-409/2/11/PPIC/2023
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pencairan Deposito

Curug, 16 Mei 2023

Yth. Pimpinan PT Bank Tabungan Negara Tbk
Kantor Cabang Tangerang

Dengan hormat bersama ini kami mohon PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kantor cabang Tangerang untuk dapat melakukan pencairan Deposito Berjangka atas nama RPL 127 BLU STPI Untuk PKD sebesar Rp 2.596.412.263 yang dibukukan terhitung mulai tanggal 19 Juni 2019 (Asli Surat Deposito Berjangka Terlampir) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nominal	No. Rekening	No. Bilyet	Jangka Waktu
1.	Rp2.596.412.263	00043-01-40-011058-8	A1907795	1 Bulan

Dana penempatan deposito dimaksud mohon perkenan Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tangerang untuk dapat dikirimkan ke rekening Bendahara Penerimaan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug berikut :

Nama Rekening : RPL 127 STPI CURUG UNTUK OPERASIONAL PENERIMAAN
Nomor Rekening : 1760000874055
Nama Bank : Bank Mandiri

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur
Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

Agustono, S.Sos., M.MTr.
NIP. 196908311991031001



Branch Name: ...

Formulir ...

No	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



PT BNI

...

...

...

...

...

...

...

19 Juni 2023



Teller

()

Penyetor

Bank telah melaksanakan transaksi sesuai dengan permintaan Penyetor. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyetor dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan transaksi di atas. Bukti Setoran Tunai ini merupakan alat bukti yang sah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1268/KM.05/2013

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH TINGGI PERUBAHAN INDONESIA CURUG
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor: KU.202/81/17Phb-2015 tanggal 9 Juni 2015 telah mengajukan permohonan agar Sekolah Tinggi Perhubungan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan ditetapkan sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang ditugaskan dalam Batin Acara Nomor: BA-06/Tim-Penilai/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Sekolah Tinggi Perhubungan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sekolah Tinggi Perhubungan Indonesia Curug Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Peraturan Administratif Dalam Rangka Pengumpulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA
- KEDUA
- KETIGA
1. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEKOLAH TINGGI PERUBAHAN INDONESIA CURUG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
 2. Menetapkan Sekolah Tinggi Perhubungan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan status Badan Layanan Umum secara penuh (BLU secara penuh).
 3. Status BLU secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Sekolah Tinggi Perhubungan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya.
 4. Sekolah Tinggi Perhubungan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan yang telah berstatus BLU secara penuh wajib menyusun sistem akuntansi paling lambat 2 (dua) tahun setelah Sekolah Tinggi Perhubungan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KEEMPAT** : Sekolah Tinggi Penerimaan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib menyusun dan menyampaikan usulan tarif layanan dan remunerasi paling lambat 6 (enam) bulan setelah Sekolah Tinggi Penerimaan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang mencaripkan PK-BLU.
- KELIMA** : Dalam hal Sekolah Tinggi Penerimaan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Menteri Keuangan dapat meninjau status pencaripan PK-BLU sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pembina Keuangan;
 2. Menteri Perhubungan;
 3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
 4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
 6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
 7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
 8. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
 9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
 10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
 11. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
 12. Kepala Biro Hukum, Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
 13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

+

14. Ketua Sekolah Tinggi Penerimaan Indonesia Curug, Kementerian Perhubungan;
15. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tangerang, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

td.

BAMBANG P. S. BRODJOONEGORO

Salinan sesuai dengan salinya

Kepala-Biro Hukum

Kepala-Biro Umum

Kepala-Biro Kerja Sama Internasional

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Perencanaan dan Pengendalian Anggaran

Kepala-Biro Sistem Informasi

Kepala-Biro Hubungan Masyarakat

Kepala-Biro Umum dan Administrasi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

Kepala-Biro Pengawasan dan Inspeksi

CIABTU
NIP. 19590131912014021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/PMK.05/2018
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA CURUG
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor PR.303/1/1 PHB 2016 tanggal 24 Juni 2016 hal Usulan Tarif Layanan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA CURUG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang

diberikan oleh Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Calon Peserta Diklat;
- b. Tarif Diklat Pembentukan;
- c. Tarif Diklat Penjenjangan; dan
- d. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung;
- b. Tarif Penggunaan Laboratorium dan Simulator;
- c. Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin;
- d. Tarif Penggunaan Sarana Transportasi; dan
- e. Tarif Klinik.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Tarif Diklat Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berlaku untuk taruna mulai angkatan tahun 2018/2019.



- (2) Tarif Diklat Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk taruna sebelum angkatan tahun 2018/2019 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 8

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 9

Tarif Penggunaan Laboratorium dan Simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, bahan bakar, alat transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, bahan bakar, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 11

Tarif Penggunaan Sarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 12

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Ketua Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Ketua Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan Diklat Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.



- (2) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. taruna teladan;
 - b. taruna berprestasi nasional atau internasional;
 - c. taruna dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. taruna korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 16

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 670

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 806/KMK.05/2018

TENTANG

PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS,
DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN
INDONESIA CURUG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan menetapkan besaran remunerasi untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - bahwa Menteri Perhubungan melalui surat nomor: KP201/20/12 PHB 2018 tanggal 14 Agustus 2018, telah mengajukan usulan penetapan remunerasi untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan;
 - bahwa usulan remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan telah disertai pertimbangan proporsionalitas, kepatutan, kesetaraan, dan kinerja operasional Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan;

HK.102/11/STPI-2018

17 DES 2018
Kai-STPI

BI/1/30

16



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA CURUG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
- PERTAMA
- : Menetapkan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA
- : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan.
- KETIGA
- : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA terdiri atas gaji, honorarium, dan insentif kinerja.
- KEEMPAT
- : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan gaji tertinggi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai dalam *grade* yang sama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KELIMA : Besaran gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang diberikan kepada masing-masing Pejabat Pengelola/Pegawai dalam *grade* yang sama ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua dengan memperhatikan nilai jabatan, tanggung jawab, masa kerja dan/atau golongan.
- KEENAM : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersumber dari RM dan PNBP.
- KETUJUH : Gaji yang bersumber dari RM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM merupakan gaji dan tunjangan sebagai PNS sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Dalam hal terdapat selisih antara gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan dapat membayar selisih dimaksud yang bersumber dari PNBP.
- KESEMBILAN : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus Non PNS yang bersumber dari PNBP.
- KESEPULUH : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, ditetapkan dengan Keputusan Ketua yang besarnya paling tinggi disetarakan dengan Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus PNS dengan memperhatikan skala *grade*, nilai jabatan, tanggung jawab, masa kerja dan/atau golongan.
- KESEBELAS : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Dewan Pengawas yang bersumber dari PNBP.
- KEDUABELAS : Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang bersumber dari PNBP berdasarkan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja.
- KETIGABELAS : Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS ditandatangani antara Pejabat Pengelola/Pegawai dengan masing-masing atasan langsung yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEEMPATBELAS : Khusus untuk Ketua, selain kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS, Ketua menandatangani kontrak kinerja dengan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KELIMABELAS : Besaran insentif kinerja bagi Pejabat Pengelola/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua dengan mengacu pada *range* besaran insentif kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAMBELAS : Insentif kinerja bagi Pejabat Pengelola/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS, yang diangkat dalam jabatan tenaga pendidik tidak diberikan atas capaian kinerja yang telah dihargai dari tunjangan profesi yang bersumber dari RM sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUHBELAS : Dalam hal capaian KPI Pejabat Pengelola/Pegawai melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS, Ketua dapat memberikan insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI.
- KEDELAPANBELAS : Khusus untuk Ketua, dalam hal capaian KPI Ketua melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATBELAS, Ketua dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan persetujuan pemberian insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI.
- KESEMBILANBELAS : Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Dewan Pengawas yang bersumber dari PNPB dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari insentif kinerja yang diterima Ketua;
 - b. Anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari insentif kinerja yang diterima Ketua; dan
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari insentif kinerja yang diterima Ketua.

f



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KEDUAPULUH : Insentif kinerja Ketua yang menjadi dasar perhitungan pemberian insentif kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS, dibatasi paling tinggi sebesar insentif kinerja yang diterima Ketua dengan capaian KPI 100% (seratus persen).
- KEDUAPULUHSATU : Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas dapat diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan.
- KEDUAPULUH DUA : Pesangon berupa santunan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHSATU diberikan dengan mengikutsertakan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi/iurannya ditanggung oleh Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan yang ditetapkan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari gaji/honorarium dalam satu tahun.
- KEDUAPULUH TIGA : Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai dapat diberikan remunerasi bulan ketigabelas dengan Keputusan Ketua.
- KEDUAPULUH EMPAT : Remunerasi bulan ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH TIGA, dibayarkan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali remunerasi yang telah dibayarkan pada bulan sebelum pembayaran remunerasi ketigabelas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan.
- KEDUAPULUH LIMA : Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan tunjangan uang makan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi yang berstatus PNS diberikan uang makan yang bersumber dari RM atau PNBP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Bagi yang berstatus Non PNS diberikan uang makan yang bersumber dari PNBP dengan Keputusan Ketua yang besarnya paling tinggi setara dengan Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus PNS yang setingkat.
- KEDUAPULUH ENAM : Pejabat Pengelola dan Pegawai yang diangkat dalam jabatan akademik Guru Besar diberikan tunjangan kehormatan profesor yang bersumber dari RM sesuai peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KEDUAPULUHTUJUH** : Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan mengikutsertakan Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEDUAPULUHDELAPAN** : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini, tidak berlaku bagi pekerja pada Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dengan pihak ketiga (*outsourcing*).
- KEDUAPULUHSEMBILAN** : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.
- KETIGAPULUH** : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai, ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- KETIGAPULUHSATU** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

9. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
10. Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug, Kementerian Perhubungan;
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, Kementerian Keuangan;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tangerang, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : SK 5042 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, maka perlu dilakukan penetapan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan Menteri ini, merupakan Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum yang diusulkan berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-726/MK.05/2023 tanggal 1 September 2023;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu penetapan anggota Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 509/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1267/KMK.05/2015 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1268/KMK.05/2015 tentang Penetapan Sekolah Tinggi Penerbang Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1269/KMK.05/2015 tentang Penetapan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1270/KMK.05/2015 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Keputusan

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1271/KMK.05/2015 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1330/KMK.05/2015 tentang Penetapan Akademi Teknik Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1334/KMK.05/2015 tentang Penetapan Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 709/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 736/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 737/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 738/KMK.05/2016 tentang Penetapan Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 830/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 831/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 96 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 60 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 47 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 48 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Makassar;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 51 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Medan;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD;

27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 105 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Bali;
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 106 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 111 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh;
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 112 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Barombong;
32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 113 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar;
33. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Banten;
34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 117 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau, Dan Penyeberangan Palembang;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

PERTAMA : Menetapkan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri.

KEDUA

- KEDUA : Dewan Pengawas pada Diktum PERTAMA bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola BLU, serta memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Dewan Pengawas berkewajiban:
- a. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
 - b. Memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
 - c. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan RBA;
 - d. membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
 - e. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan, dan Pejabat Pengelola BLU mengenai, tetapi tidak terbatas pada, RSB dan RBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU;
 - f. melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
 - h. memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari satuan pemeriksaan intern, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, pembina BLU, dan pihak lain telah ditindaklanjuti;
 - i. mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola; dan
 - j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

KEEMPAT : Masa kerja Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A
pada tanggal 7 September 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI KARYA SUMADI

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
5. Kepala Biro Keuangan;
6. Kepala Biro SDM dan Organisasi;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
8. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan;
9. Para Pemimpin BLU;
10. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi setempat;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
12. Yang bersangkutan.

3.	POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Capt. Avirianto Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> M. Yugihartiman Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Ex. <i>Officio</i> Kepala Kanwil DJPb Provinsi Banten Anggota Dewan Pengawas</p>	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Ex. <i>Officio</i> Direktur Jenderal Perhubungan Udara Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Budi F. Prayitno, S.H., MSTA Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Ex. <i>Officio</i> Kepala Kanwil DJPb Provinsi Banten Anggota Dewan Pengawas</p>	Agustus 2028
4.	POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Ahmad Wahid Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Mayjen TNI MAR (Purn) Buyung. L Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Des Arman Anggota Dewan Pengawas</p>	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Ir. Ahmad, M.M.Tr Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Andi Hartono Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Tunas Agung Jiwa Brata, S.E., M.A Anggota Dewan Pengawas</p>	Agustus 2028

5.	POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Drs. Agung Rahardjo, M.T Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Junaidi Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Ex officio Kakanwil DJPB Prov Aceh Anggota Dewan Pengawas</p>	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Drs. Agung Raharjo, M.T Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Ir. Sugihardjo Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Ex. Officio Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh Anggota Dewan Pengawas</p>	Agustus 2028
6.	POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Pandu Yudianto Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Ir. Imran Rasyid, M.B.A Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Ex. Officio Kepala KPPN Palembang Anggota Dewan Pengawas</p>	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Amirulloh, S.SiT., M.M.Tr Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Ir. Imran Rasyid, M.B.A Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Ex. Officio Kepala KPPN Palembang Anggota Dewan Pengawas</p>	Agustus 2028
7.	POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Hindro Surahmat Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Zamrides Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Ex. Officio Kepala KPPN Madiun Anggota Dewan Pengawas</p>	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Drs. Nahduddin, M.Sc Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Suranto, ATD., M.T Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Ex. Officio Kepala KPPN Madiun Anggota Dewan Pengawas</p>	Agustus 2028

8.	POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Muhammad Risal Wasal Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Jumardi Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Goro Ekanto Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Perhubungan</u> Robby Kurniawan Ketua Dewan Pengawas</p>	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Jumardi, S.T., M.T Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Pandu Yudianto, ATD., M.Eng.Sc Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Woro Triwening Renggani, S.P., M.Si Anggota Dewan Pengawas</p>	Agustus 2028
9.	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Robby Kurniawan Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Wahju Satrio Utomo Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Setiawan Basuki, Ak, MBA, CFE Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Perhubungan</u> Amirulloh, S.SiT., M.M.Tr Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Capt. Weku Frederick Karuntu Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Ex. <i>Officio</i> Ka Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Anggota Dewan Pengawas</p>	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Ex. <i>Officio</i> Sekretaris Jenderal Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Sigit Widodo, S.T., M.T.Ars Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Dwi Apriany, S.E., Ak Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Perhubungan</u> Ex. <i>Officio</i> Direktur Jenderal Perkeretaapian Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Achmad Setiyo Prabowo, S.T., M.T Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Ex. <i>Officio</i> Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Anggota Dewan Pengawas</p>	Agustus 2028
10.	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Amirulloh, S.SiT., M.M.Tr Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Capt. Weku Frederick Karuntu Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Ex. <i>Officio</i> Ka Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Anggota Dewan Pengawas</p>	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Ex. <i>Officio</i> Sekretaris Jenderal Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Achmad Setiyo Prabowo, S.T., M.T Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Ex. <i>Officio</i> Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Anggota Dewan Pengawas</p>	Agustus 2028

11.	POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Marwanto Heru Santoso, S.T., M.T Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Fery Subekti, SSiT., M.T Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Ade Rohman Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Perhubungan</u> Gunung Hutapea Ketua Dewan Pengawas</p>	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Capt. Weku Frederick Karuntu, M.M Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Fery Subekti, SSiT., M.T Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Bambang Juli Istanto, S.E., M.M Anggota Dewan Pengawas</p>	Agustus 2028
12.	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Dr. Hartanto, M.H., M.Mar.E Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Drs. Boedi Prihandono, M.Si Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Drs. Rudy Widodo Anggota Dewan Pengawas</p>	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Drs. Boedi Prihandono, M.Si Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Drs. Rudy Widodo Anggota Dewan Pengawas</p>	Agustus 2028
13.	POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Baitul Ihwan, S.H., DESS Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Joko Murdyono Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Nugroho Wahyu Widodo, S.S.T., Ak Anggota Dewan Pengawas</p>	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Baitul Ihwan, S.H., DESS Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Ir. Gunung Hutapea, M.M Anggota Dewan Pengawas</p>	Agustus 2028

14.	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Eddy Gunawan Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Cucu Mulyana Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Ex <i>Officio</i> Kabid PPA I DJPb Sumsel Anggota Dewan Pengawas</p>	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Ir. Zamrides, M.Si Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Ir. Cucu Mulyana, DESS Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Muhammad Syukur, S.H Anggota Dewan Pengawas</p>	Agustus 2028
15.	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN CURUG	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Sigit Irfansyah, ATD., M.Sc Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Israfulhayat Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Bambang Juli Istanto Anggota Dewan Pengawas</p>	<p><u>Kementerian Perhubungan</u> Sigit Irfansyah, ATD., M.Sc Ketua Dewan Pengawas</p> <p><u>Tenaga Ahli</u> Wasis Danardono, S.Psi., M.B.A Anggota Dewan Pengawas</p> <p><u>Kementerian Keuangan</u> Ex. <i>Officio</i> Kepala KPPN Tangerang Anggota Dewan Pengawas</p>	Agustus 2028

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

JL. RAYA PLP CURUG
TANGERANG 15820

Telp. (021) 598-2203/04/05
Fax. (021) 598-2234

email : ppi@ppicurug.ac.id
website : www.ppicurug.ac.id

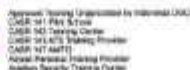
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
NOMOR.: SK.1367 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTUR POLITEKNIK
PENERBANGAN INDONESIA CURUG NOMOR SK. 1325 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug perlu melaksanakan Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
 - b. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap serta memenuhi syarat untuk memangku jabatan tersebut huruf a.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 47 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 75 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.20 Tahun 2017 Tanggal 11 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Penetapan Pengelola Anggaran dilingkungan Kementerian Perhubungan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG TAHUN ANGGARAN 2023.

PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Pejabat Pengelola Anggaran, sebagaimana tercantum pada lampiran I Surat keputusan kuasa pengguna anggaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug tahun anggaran 2023 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum pada lampiran II Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran pada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tahun Anggaran 2023, memenuhi prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance* dan *good corporate governance*), menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan Ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Nomor SK. 1325 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tahun Anggaran 2023 dibatalkan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curug-Tangerang
Pada tanggal : 16 DEC 2022

Kuasa Pengguna Anggaran
Politeknik Penerbangan Indonesia Curug



Asri Santosa, ST., S.SiT.,
NIP. 19710706 199301 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Kepala Sadan Pengembangan SOM Perhubungan;
4. Kepala Pusat Pengembangan SOM Perhubungan Udara;
5. Kepala KPPN Tangerang.

Lampiran I Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran PPI Curug

Nomor : SK. 1367 Tahun 2022

Tanggal : 16 DEC 2022

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	ASRI SANTOSA, ST., S.SiT., MT. NIP. 19710706 1993011 001	Pembina Utama Muda(IV/c)	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	WAHYU KURNIAWAN, SE., MM NIP. 19761011 199903 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Pembuat Komitmen (Sumber Anggaran RM)
3.	MARTHA SAULINA, S.S.T., M.A., MS.ASM NIP. 19900301 201012 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pejabat Pembuat Komitmen (Sumber Anggaran BLU)
4.	ICHYU MACHMIYANA, S.ST., MS.SMA NIP. 19880110 200912 1 003	Penata (III/c)	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
4.	ABAS, SE., MA NIP. 19680822 198903 1 003	Pembina (IV/a)	Bendahara Penerimaan
5.	SAMUDRA WINDO NIP. 19970731 201812 1 001	Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran
6.	DIAN ANGGRAINI P, SE., MT NIP. 19850304 201012 2 001	Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu

Kuasa Pengguna Anggaran
Politeknik Penerbangan Indonesia Curug



Asri Santosa, ST., S.SiT.,
NIP. 19710706 199301 1 001

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar dan memiliki tugas :
 - a. Menguji kebenaran surat permintaan pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukung;
 - b. Menolak dan mengembalikan surat permintaan pembayaran (SPP), apabila surat tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d. Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

2. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan wewenang :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan SPP;
 - i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

3. Bendahara Penerimaan bertugas :
 - a. Menerima dan menyimpan uang pendapatan negara;
 - b. Menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening kas negara secara periodik sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. Menatausahakan transaksi uang pendapatan negara di lingkungan kementerian/lembaga/satker;
 - d. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan negara;
 - e. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang pendapatan negara;
 - f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.

4. Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang persediaan meliputi :
 - a. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - b. Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
 - c. Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA;
 - d. Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 - f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke rekening kas umum negara;
 - g. Menatausahakan transaksi uang persediaan;
 - h. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
 - i. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
 - j. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN;
 - k. Menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

5. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas :
 - a. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan;
 - b. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari Uang Persediaan;
 - c. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari Uang Persediaan berdasarkan perintah PPK;
 - d. Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 - f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada kas negara;
 - g. Menatausahakan transaksi uang persediaan;
 - h. Menyelenggarakan pembukuan transaksi Uang Persediaan;
 - i. Mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan;

Kuasa Pengguna Anggaran
Politeknik Penerbangan Indonesia Curug



Asri Santosa, ST., S.SiT., MT
NIP. 19710706 199301 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG**

JL. RAYA PLP CURUG
TANGERANG 15820

Telp. (021) 598-2203/04/05
Fax. (021) 598-2234

email : ppi@ppicurug.ac.id
website : [www://ppicurug.ac.id](http://www.ppicurug.ac.id)

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
NOMOR : *KP-PPIC 315 Tahun 2023***

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
TAHUN ANGGARAN 2023**

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug perlu di tunjuk Pejabat Bendahara Pengeluaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;

b. bahwa untuk mendukung huruf a dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Bendahara Pengeluaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tahun Anggaran 2023;

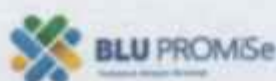
c. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Bendahara Pengeluaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

2. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 53 Tahun 2010;

3. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-undangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73);
- 10.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.71 Tahun 2009 dan Perubahan Kedua Nomor PM. 81 Tahun 2010 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2020 tentang statuta Politeknik Penerbangan Indonesia);
- 12.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG TENTANG PENETAPAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG TAHUN ANGGARAN 2023

PERATAMA : Mengangkat Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan sebagai Pejabat Bendahara Pengeluaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tahun Anggaran 2023;

- KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana Diktum PERTAMA memiliki tugas :
- a. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - b. Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan ;
 - c. Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA;
 - d. Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 - f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke rekening kas umum negara;
 - g. Menatausahakan transaksi uang persediaan;
 - h. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
 - i. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
 - j. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN;
 - k. Menjalankan tugas Kebendaharaan lainnya :
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran pada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curug - Tangerang
Pada tanggal : 10 Maret 2023



Kuasa Pengguna Anggaran
Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

AGUSTONO
NIP. 196908311991031001

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
4. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan;
5. Kepala KPPN Tangerang;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
Nomor : *KP-PPIC 315 Tahun 2023*
Tanggal : *10 Maret 2023*

PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
UNTUK PELAKSANAAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Dian Anggraini Puspaningrum., SE., MT NIP. 198503042010122001	Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran



Kuasa Pengguna Anggaran
Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

AGUSTONO
NIP. 196908311991031001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

JL. RAYA PLP CURUG
TANGERANG 15820

Telp. (021) 598-2203/04/05
Fax. (021) 598-2234

email : ppi@ppicurug.ac.id
website : www.ppicurug.ac.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
NOMOR.: *Kp- ppic 1036 Tahun 2023*

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTUR POLITEKNIK
PENERBANGAN INDONESIA CURUG NOMOR KP.315 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug perlu mengganti Pejabat Bendahara Pengeluaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa untuk mendukung huruf a dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Bendahara Pengeluaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan tersebut huruf a.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73);
 - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 2009 dan Perubahan Kedua Nomor PM.81 Tahun 2010 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 75 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
- : Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.20 Tahun 2017 Tanggal 11 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Penetapan Pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG TENTANG PENETAPAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG TAHUN ANGGARAN 2023.
- PERTAMA : Menunjuk/mengangkat pegawai sebagaimana tercantum pada lampiran I Surat keputusan kuasa pengguna anggaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug tahun anggaran 2023 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum pada lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dalam Diktum PERTAMA memiliki tugas:
- a. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - b. Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
 - c. Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA;
 - d. Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 - f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke rekening kas umum negara;
 - g. Menatausahakan transaksi uang persediaan;
 - h. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
 - i. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
 - j. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN;
 - k. Menjalankan tugas ke bendaharaan lainnya.

- KETIGA : Dengan Ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Nomor SK. 315 Tahun 2023 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tahun Anggaran 2023 dibatalkan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curug-Tangerang
Pada tanggal : 31 Agustus 2023



Kuasa Pengguna Anggaran
Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

AGUSTONO
NIP. 196908311991031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
4. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara;
5. Kepala KPPN Tangerang.

Lampiran I Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran PPI Curug
Nomor : KP-PPIC 1036 Tahun 2023
Tanggal : 31 Agustus 2023

PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Mirani Puspita Verbasari, A.Md NIP. 198001102006042001	Penata Muda Tk,I (III/b)	Bendahara Pengeluaran

Kuasa Pengguna Anggaran
Politeknik Penerbangan Indonesia Curug



AGUSTONO
NIP. 196908311991031001





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

JL. RAYA PLP CURUG
TANGERANG 15820

Telp. (021) 598-2203/04/05
Fax. (021) 598-2234

email : ppi@ppicurug.ac.id
website : [www://ppicurug.ac.id](http://www.ppicurug.ac.id)

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
NOMOR: *KP-PPIC 16/11 Tahun 2023*
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug perlu melaksanakan Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
 - bahwa para pejabat/pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap serta memenuhi syarat untuk memangku jabatan tersebut huruf a.
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010;
 - Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 - Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



PRESTASI



BLU PROMISE



Badan Pengembangan SDM Perhubungan
Jl. Raya PLP Curug
Tangerang 15820
Telp. (021) 598-2203/04/05
Fax. (021) 598-2234
Email: ppi@ppicurug.ac.id
Website: www.ppicurug.ac.id



TRAINAIR
PLUS



9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 47 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 75 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.20 Tahun 2017 Tanggal 11 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Penetapan Pengelola Anggaran dilingkungan Kementerian Perhubungan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG TAHUN ANGGARAN 2024.

PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Pejabat Pengelola Anggaran, sebagaimana tercantum pada lampiran I Surat keputusan kuasa pengguna anggaran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tahun Anggaran 2024 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum pada lampiran II Surat Keputusan ini.

KEDUA : Dalam menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran pada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tahun Anggaran 2023, memenuhi prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance* dan *good corporate governance*), menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curug-Tangerang

Pada tanggal : 6 Desember 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



Agustono, S.Sos., M.MTr

NIP. 196908311991031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
4. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara;
5. Kepala KPPN Tangerang.

Lampiran I Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran PPI Curug
 Nomor : KP PPI C 611 Tahun 2023
 Tanggal : 6 Desember 2023

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	AGUSTONO, S.Sos., M.MTr. NIP.196908311991031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran
2	WAHYU KURNIAWAN, SE.,MM NIP. 197610111999031001	Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Pembuat Komitmen Sumber Anggaran Rupiah Murni kecuali Diklat Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Modal yang terdiri dari : 1) Overhaul Pesawat Latih Sayap Tetap Single Engine 2) Pengadaan Penyulingan Air Minum untuk Taruna di Asrama Curug I. 3) Rehabilitasi Hanggar 1 dan 2 4) Meubelair Asrama Curug 1 5) Upgrade Lab X-Ray
3	ICHYU MAHMIYANA S.S.T., MS.SMA NIP.198001102009121001	Penata (III/c)	Pejabat Pembuat Komitmen Sumber Anggaran BLU, Diklat Pemberdayaan Masyarakat Sumber Anggaran Rupiah Murni dan Belanja Modal yang terdiri dari : 1) Pengadaan Peralatan Praktek Prodi TBL 2) Pengadaan Special Tools Weighing Kit Helicopter 3) Pengadaan Peralatan Fasilitas Ekstrakurikuler Taruna 4) Pengadaan Komputer / Laptop dan Printer/Scanner
4	KURNIA DJUPRIANTO, S.E., M.AK NIP.197804272008121001	Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
5	SAMUDRA WINDO, A.Md.KB.N. NIP.199707312018121001	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Penerimaan
6	MIRANI PUSPITA VERBASARI, A.Md NIP. 198001102006042001	Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran



Kuasa Pengguna Anggaran

Agustono, S.Sos., M.MTr
 NIP. 196908311991031001

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Kuasa Pengguna Anggaran memiliki Tugas dan wewenang:
 - a. Menyusun DIPA;
 - b. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - c. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
 - d. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
 - e. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - f. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
 - g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar dan memiliki tugas:
 - a. Menguji kebenaran surat permintaan pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukung;
 - b. Menolak dan mengembalikan surat permintaan pembayaran (SPP), apabila surat tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d. Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

3. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan wewenang :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan SPP;
 - i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

4. Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang persediaan meliputi :
 - a. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - b. Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
 - c. Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA;
 - d. Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;

- f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke rekening kas umum negara;
 - g. Menatausahakan transaksi uang persediaan;
 - h. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
 - i. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
 - j. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN;
 - k. Menjalankan tugas kebhendaharaan lainnya.
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas :
- a. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan;
 - b. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari Uang Persediaan;
 - c. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari Uang Persediaan berdasarkan perintah PPK;
 - d. Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 - f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada kas negara;
 - g. Menatausahakan transaksi uang persediaan;
 - h. Menyelenggarakan pembukuan transaksi Uang Persediaan;
 - i. Mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan;
6. Bendahara Penerimaan bertugas :
- a. Menerima dan menyimpan uang pendapatan negara;
 - b. Menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening kas negara secara periodik sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. Menatausahakan transaksi uang pendapatan negara di lingkungan kementerian/lembaga/satker;
 - d. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan negara;
 - e. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang pendapatan negara;
 - f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.



Kuasa Pengguna Anggaran

Agustono, S.Sos., M.MTr

NIP. 198908311991031001

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG BANTEN

Jalan Diponegoro Nomor 9 - 11, Serang, Banten - 42112
Telepon: (0254) 210103 Faksimile: (0254) 210112 SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

Nomor : SPPNL-14/PUPNC.14.02/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pernyataan Piutang Negara Lunas

02 September 2022

Yth. Restu W. Ayu Anggreni
1) Jalan Kelapa Mas No 5 Matraman Jakarta Timur 2) Kp.
Mekarsari, RT/RW. 2/6, Kel. Panunggangan Barat, Kec.
Cibodas, Tangerang- Banten

Pengurusan Piutang Negara atas nama Restu W. Ayu Anggreni yang kami terima dari Kementerian Perhubungan c.q. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (d.h. STPI) dengan surat penyerahan nomor KU.307/26/18/STPI-2019 tanggal 12 Maret 2019 sesuai dengan SP3N Nomor SP3N-06/PUPNC.14.02/2019 tanggal 25 Maret 2019 ditetapkan sebesar Rp28.710.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan persetujuan Crash Program berupa pemberian keringanan utang nomor S-1038/KNL.0602/2022 tanggal 03 Agustus 2022 telah dilakukan pembayaran/pelunasan melalui rekening Bendahara Penerima KPKNL, dan berdasar hasil verifikasi, dengan ini kami nyatakan bahwa Piutang Negara atas nama Saudara telah LUNAS.

Demikian untuk Saudara ketahui.

a.n. Ketua Panitia,
Anggota PUPN Cabang Banten



Rini Fransiska
NIP. 197807062002122002

Tembusan:

1. Ketua PUPN Cabang Banten;
2. Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPIC);
3. Kepala KPKNL Tangerang l u.p.
 - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
 - b. Kepala Seksi Piutang Negara.



PERHITUNGAN CRASH PROGRAM PIUTANG NEGARA TAHUN 2022

BKPN atas nama	: RESTU W. AYU ANGGRENI
Nomor Register	: 2019.03.00006.1402

NO	URAIAN	PERHITUNGAN KERINGANAN					
		%	X	NILAI	KERINGANAN	JUMLAH	TOTAL
A	Jumlah Sisa Kewajiban Penanggung Utang:						
	1 Sisa Pokok Utang					28,710,000.00	
	2 Sisa Bunga, Denda, Ongkos/Blaya Lainnya (BDO)					0.00	
	Total sisa utang						28,710,000.00
B	Perhitungan Keringanan Utang (BKPN Pengkhususan):						
	1 Keringanan (Pokok Utang+BDO)	80%	X	28,710,000.00	(22,968,000.00)		
	Keringanan Utang					(22,968,000.00)	
	Saldo Utang setelah dikurangi keringanan						5,742,000.00

REKAPITULASI DAN PERSETUJUAN CRASH PROGRAM	
URAIAN	PELUNASAN
	Periode
	1 Januari s.d. 31 Desember 2022
Saldo Utang	28,710,000.00
Total Keringanan Utang (dibulatkan)	(22,968,000.00)
Saldo Utang setelah keringanan (dibulatkan)	5,742,000.00
Blaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10%	574,200.00
Total Kewajiban	6,316,200.00
PERSETUJUAN CRASH PROGRAM	✓

Kepala Seksi Hukum dan Informasi

Kepala Seksi Piutang Negara

Pemegang Berkas


Nural Fajri
NIP 19651218 199203 1 001

Rio Hindersah
NIP 19790725 200012 1 003

Tomi Cahyadi
NIP 19761224 199803 1 002

Kepala Kantor,


Rihel Fransiska
NIP 19780708 200212 2 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
BANTEN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG I
JL. TAMAN MAKAM PAHLAWAN TARUNA, KOTA TANGERANG 15111
TELEPON: (021) 55794272; FAKSIMILE: (021) 55794017

Nomor : S-1038/KNL.0602/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Persetujuan Keringanan Utang
a.n. Restu W. Ayu Anggreni

03 Agustus 2022

Yth. Restu W. Ayu Anggreni / Dra. Sri Handayani
Kp. Mekarsari, RT. 002/006, Kel. Panunggangan Barat,
Kec. Cibodas, Tangerang - Banten

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 tahun 2022 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta surat permohonan Saudari tanggal 27 Juli 2022, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudari untuk melunasi kewajiban dengan keringanan utang dengan ketentuan harus dibayar paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dan/atau sampai dengan tanggal 1 September 2022. Adapun jumlah utang yang harus Saudari selesaikan sebesar **Rp6.316.200,00** (enam juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.
2. Pelunasan utang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan penyetoran dan/atau tranfer ke rekening Bank BRI Cabang Tangerang Nomor **0120-01-001406-30-6** atas nama **RPL 127 KPKNL Tangerang Utk Piutang**.
3. Apabila Saudari tidak melunasi kewajiban sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka persetujuan keringanan ini menjadi batal dan pembayaran yang Saudari lakukan akan kami bukukan sebagai pengurang pokok hutang.

Demikian untuk Saudari ketahui.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang
Tangerang I



Transibangine secara elektronik
Nural Fajri

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten
2. Kepala Seksi Piutang Negara
3. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
4. Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (d.h. STPI)
5. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara


Tangerang, 27 Juli 2022

Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Mengikuti Crash Program Penyelesaian Utang

Yth. Kepala KPKNL Tangerang I
Jalan Taman Makam Pahlawan (T.M.P.) Taruna
Kota Tangerang - 15111

Sehubungan dengan adanya *Crash Program* penyelesaian utang yang ditawarkan pemerintah, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mengikuti *Crash Program* berupa pemberian keringanan utang sesuai skema yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengikuti *Crash Program* tersebut terlampir persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Terhadap persyaratan administrasi yang saya ajukan, saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran formil dan materil dari persyaratan tersebut.

Selanjutnya kami bertanggungjawab untuk mematuhi keputusan *Crash Program*. Sebagai sarana komunikasi dapat menghubungi kami di nomor Telpon/HP 081380222969 

Demikian untuk dapat disetujui.

Pemohon,

(Orang Tua/Wali a.n. Restu Winodya A. A. KP 5)



Dra. Sri Handayani

PROVINSI BANTEN
KOTA TANGERANG

NIK : 3671094207940008

Nama : RESTU WINODYA AYU
ANGGRAENI
Tempat/Tgl Lahir : TANGERANG, 02-07-1994
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : B+
Alamat : KP. MEKARSARI
RT/RW : 002/006
Kel/Desa : PANUNGGANGAN BARAT
Kecamatan : CIBODAS
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA TANGERANG
15-01-2016



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
BANTEN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG I
JL. TAMAN MAKAM PAHLAWAN TARUNA, KOTA TANGERANG 15111
TELEPON: (021) 55794272; FAKSIMILE: (021) 55794017

Nomor : S-212/KNL.0602/2022 28 Maret 2022
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Crash Program Penyelesaian Utang a.n. Restu W. Ayu Anggreni

Yth. Restu W. Ayu Anggreni

- 1) Jalan Kelapa Mas No 5, Matraman, Jakarta Timur
- 2) Kp. Mekarsari, RT/RW. 2/6, Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 tahun 2022 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program*, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah bermaksud memberikan keringanan utang Saudara yang saat ini diurus oleh PUPN/KPKNL Tangerang I.
2. Berdasarkan hal tersebut dengan ini kami minta agar Saudara dapat mengajukan permohonan atau menghadap ke PUPN/KPKNL Tangerang I dengan membawa persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Kartu Identitas;
 - b. salah satu atau lebih dokumen pendukung yang sesuai berupa:
 - 1) surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada kantor kelurahan/kantor kepala desa/kantor kecamatan/dinas pemerintah daerah atau instansi yang berwenang yang menerangkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan seluruh utang tanpa pemberian keringanan; atau
 - 2) surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada kantor kelurahan/kantor kepala desa/kantor kecamatan/dinas pemerintah daerah atau instansi yang berwenang bahwa Penanggung Utang saat mengajukan permohonan Crash Program merupakan pelaku usaha dengan skala mikro, kecil, atau menengah (UMKM) atau penerima kredit pemilikan rumah sederhana/rumah sangat sederhana (KPR RS/RSS).
3. Surat permohonan Saudara dapat dikirimkan secara langsung ke alamat kantor KPKNL Tangerang I atau dapat disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat kpknl Tangerang1@gmail.com dan/atau melalui aplikasi SIAP (*whatsapp*) dengan nomor 08111545158.
4. Adapun contoh format surat permohonan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk Saudara ketahui.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Tangerang I



Ditandatangani secara elektronik

Ririen Fransiska

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten
2. Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia
3. Kepala Seksi Piutang Negara
4. Kepala Seksi Hukum dan Informasi

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG BANTEN

Jalan Diponegoro Nomor 9 - 11, Serang, Banten - 42112
Telepon: (0254) 210103 Faksimile: (0254) 210112 SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

Nomor : SPPNL-06/PUPNE-14.02/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pernyataan Piutang Negara Lunas

03 Agustus 2023

Yth. PT. Jakarta Aviation Training Center
Kawasan Pergudangan Bandara Mas Blik J No. 5 Kav. 20-23,
Jalan Marsekal Surya Dharma, Kota Tangerang, Banten

Pengurusan Piutang Negara atas nama PT. Jakarta Aviation Training Center yang kami terima dari Kementerian Perhubungan c.q. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (d.h. STPI) dengan surat penyerahan nomor KU.408/2/23/PPIC.2022 tanggal 09 Agustus 2022 sesuai dengan SP3N Nomor SP3N-05/PUPNC.14.02/2022 tanggal 30 Agustus 2022 ditetapkan sebesar Rp874.656.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan persetujuan Crash Program berupa pemberian keringanan utang nomor S-06/KNL.060203/2023 tanggal 05 Juli 2023 telah dilakukan pembayaran/pelunasan melalui rekening Bendahara Penerima KPKNL, dan berdasar hasil verifikasi, dengan ini kami nyatakan bahwa Piutang Negara atas nama Saudara telah LUNAS.

Demikian untuk Saudara ketahui.

a.n. Ketua Panitia,
Anggota PUPN Cabang Banten



NIP 197807062002122002

Tembusan:

1. Ketua PUPN Cabang Banten;
2. Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPIC);
3. Kepala KPKNL Tangerang l u p.
 - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
 - b. Kepala Seksi Piutang Negara.

Nomor Register BKPN: 2022-08-00005



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820220927071172
Tanggal Billing : 27-09-2022 16:07:46
Tanggal Kedaluwarsa : 04-10-2022 16:07:46
Tanggal Bayar : 27-09-2022 16:24:22
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar : *Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Tangerang I
Kementerian/Lembaga : **015** - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I : **09** - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja : **506188** - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG I
Total Disetor : 574.200 (IDR)
Terbilang : *Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **220927159554**
NTPN : **0E5752G4V7D8NKU4**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - O.Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang - 1. Pembayaran dan/atau pelunasan hutang - c. Setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan
Kode Akun : 425785 - Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
Jumlah Setoran : 574.200 (IDR)
Keterangan : Biad PPN Kementerian Perhubungan c.q. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (d.h. STPI), debitur a.n. Restu W. Ayu Anggreni



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG I

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang 15111
Telepon: (021) 55794272; Faksimile: (021) 55794017

Nomor : S-1157/KNL.0602/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Persetujuan Crash Program berupa Keringanan Utang
atas nama PT. Jakarta Aviation Training Center

5 Juli 2023

Yth. Direktur PT. Jakarta Aviation Training Center
Kawasan Pergudangan Bandara Mas Blok J No. 5 Kav. 20-23,
Jalan Marsekal Surya Dharma, Kota Tangerang, Banten

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023, serta surat permohonan Saudara tanggal 03 Juli 2023, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara untuk melunasi kewajiban dengan keringanan utang dengan ketentuan harus dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 05 Juli 2023. Adapun jumlah utang yang harus Saudara selesaikan sebagai berikut:

Jika dilakukan pelunasan paling lambat tanggal 04 Agustus 2023 maka jumlah yang harus dibayar sebesar **Rp269.394.048,00** (termasuk biad).

2. Pelunasan utang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan melakukan penyeteroran ke rekening penampungan KPKNL Tangerang I pada rekening Bank BRI nomor 0120-01-001406-30-6 atas nama RPL 127 KPKNL Tangerang utk Piutang.
3. Apabila Saudara tidak melunasi kewajiban sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka persetujuan keringanan ini menjadi batal dan pembayaran yang Saudara lakukan akan kami bukukan sebagai pengurang pokok hutang.

Demikian untuk Saudara ketahui.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Tangerang I



Ririen Fransiska

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten
2. Kepala Seksi Piutang Negara
3. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
4. Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPIC)

PERHITUNGAN CRASH PROGRAM KERINGANAN UTANG TAHUN 2023

BKPN atas nama	:	PT. Jakarta Aviation Training Center
Nomor Register	:	2022.08.00005

NO.	URAIAN	PERHITUNGAN KERINGANAN				
		%	X	NILAI	KERINGANAN	JUMLAH
I Jumlah Sisa Kewajiban Penanggung Utang:						
1	Sisa Pokok Utang					874.656.000,00
2	Sisa Bunga, Denda, Ongkos/Biaya Lainnya (BDO)					-
	Total Sisa Utang					874.656.000,00
II Perhitungan Keringanan Utang (BKPN tanpa Barang Jaminan)						
1 Periode I (Jan s.d. Jun 2023)						
a	Keringanan Pokok Utang	60%	X	874.656.000,00	(524.793.600,00)	349.862.400,00
b	Keringanan BDO	100%	X	-	-	-
	Jumlah Keringanan					349.862.400,00
c	Tambahan keringanan Periode I	40%	X	349.862.400,00	(139.944.960,00)	209.917.440,00
	Total Keringanan Periode I					(664.738.560,00)
	Total Saldo Utang Periode I					209.917.440,00
2 Periode II (Jul s.d. Sep 2023)						
a	Keringanan Pokok Utang	60%	X	874.656.000,00	(524.793.600,00)	349.862.400,00
b	Keringanan BDO	100%	X	-	-	-
	Jumlah Keringanan					349.862.400,00
c	Tambahan keringanan Periode II	30%	X	349.862.400,00	(104.958.720,00)	244.903.680,00
	Total Keringanan Periode II					(629.752.320,00)
	Total Saldo Utang Periode II					244.903.680,00
3 Periode III (Okt s.d. Des 2023)						
a	Keringanan Pokok Utang	60%	X	874.656.000,00	(524.793.600,00)	349.862.400,00
b	Keringanan BDO	100%	X	-	-	-
	Jumlah Keringanan					349.862.400,00
c	Tambahan keringanan Periode III	20%	X	349.862.400,00	(69.972.480,00)	279.889.920,00
	Total Keringanan Periode III					(594.766.080,00)
	Total Saldo Utang Periode III					279.889.920,00

URAIAN	PELUNASAN CRASH PROGRAM T.A. 2023		
	PERIODE I	PERIODE II	PERIODE III
	JAN-JUN	JUL-SEP	OKT-DES
Saldo Utang	874.656.000,00	874.656.000,00	874.656.000,00
Total Keringanan Utang	(664.738.560,00)	(629.752.320,00)	(594.766.080,00)
Saldo Utang setelah keringanan Utang	209.917.440,00	244.903.680,00	279.889.920,00
Biad PPN 10%	20.991.744,00	24.490.368,00	27.988.992,00
Total Kewajiban	230.909.184,00	269.394.048,00	307.878.912,00
PERSETUJUAN CRASH PROGRAM		✓	

Kepala Seksi Hukum dan Informasi



Nurul Fajri
 NIP.19651218 199203 1 001

Kepala Seksi Perutang Negara



Rio Hindersah
 NIP.19790725 200012 1 003

Kepala Kantor,

Pemegang Berkas



Tomi Cahyadi
 NIP.19761224 199803 1 002

Ririen Fransiska
 NIP.19780706 200212 2 002

Nomor : 2330/JATC/VIII/2023

Tangerang, 3 Juli 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Permohonan Mengikuti Crash Program Penyelesaian Utang

Yth. Kepala KPKNL Tangerang I
Jalan Taman Makam Pahlawan (T.M.P.) Taruna
Kota Tangerang - 15111

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya *Crash Program* penyelesaian utang yang ditawarkan pemerintah, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mengikuti *Crash Program* berupa pemberian keringanan utang sesuai skema yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengikuti *Crash Program* tersebut terlampir persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Terhadap persyaratan administrasi yang saya ajukan, saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran formil dan materiil dari persyaratan tersebut.

Selanjutnya kami bertanggungjawab untuk mematuhi keputusan *Crash Program*. Sebagai sarana komunikasi dapat menghubungi kami di nomor Telpon/HP (021) 55910065 / 0811152711.

Demikian untuk dapat disetujui.

Pemohon,
PT Jakarta Aviation Training Center



Arif Syafrie
Direktur



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG I

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang 15111
Telepon: (021) 55794272; Faksimile: (021) 55794017

Nomor : S-908/KNL.0602/2023

31 Mei 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Crash Program Penyelesaian Utang atas nama
PT. Jakarta Aviation Training Center

Yth. PT. Jakarta Aviation Training Center

Kawasan Pergudangan Bandara Mas Blik J No. 5 Kav. 20-23, Jalan Marsekal Surya Dharma,
Kota Tangerang, Banten

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 tahun 2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah bermaksud memberikan keringanan utang Saudara/Saudari yang saat ini diurus oleh PUPN/KPKNL Tangerang I.
2. Berdasarkan hal tersebut dengan ini kami minta agar Saudara/Saudari dapat mengajukan permohonan atau menghadap ke PUPN/KPKNL Tangerang I dengan membawa persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Kartu Identitas;
 - b. Salah satu dokumen pendukung yang sesuai berupa:
 - 1) surat keterangan dari kantor kelurahan/kantor kepala desa/camat/dinas pemerintah daerah/instansi yang berwenang menerangkan bahwa Penanggung Utang tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan seluruh utang tanpa pemberian keringanan dan/atau terdampak bencana Covid-19;
 - 2) surat keterangan atau dokumen dari penyerah piutang yang membuktikan dapat diberikan keringanan.
3. Surat permohonan Saudara/Saudari dapat dikirimkan secara langsung ke alamat kantor KPKNL Tangerang I atau disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat kpknltangerang1@gmail.com dan/atau melalui Aplikasi SIAP (*Whatsapp*) ke nomor 08111545158.
4. Adapun contoh format surat permohonan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk Saudara/Saudari ketahui.

Pih. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Tangerang I



Dilampirkan secara elektronik

Nural Fajri

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten
2. Kepala Seksi Piutang Negara
3. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
4. Kementerian Perhubungan c.q. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (d.h. STPI)

